

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat ridho dan karuniaNya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP-Batam) periode 2015-2019 dapat diselesaikan. Renstra ini disusun dalam rangka upaya untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor yang mempengaruhi dalam menentukan strategi yang tepat, guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pengembangan Kawasan Batam sesuai kewenangannya.

Renstra ini merupakan upaya tindak lanjut dari telah disusunnya RPJPN 2005-2025, RPJMN 2015-2019, Master Plan Kawasan Batam 2011-2016, *Blueprint* dan *Roadmap* Pengembangan Batam yang merupakan pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan investasi di Kawasan Batam untuk tahun 2015-2019. Renstra ini juga diharapkan memudahkan para *stakeholders*, khususnya bagi para calon investor untuk memahami secara cepat tentang arah pengembangan Kawasan Batam 5 (lima) tahun ke depan, sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dalam kegiatan investasinya.

Penyusunan Renstra BP-Batam periode 2015-2019 ini dilaksanakan dengan menggunakan prinsip partisipatif, transparan dan bertanggungjawab. Seiring dengan semboyan BP-Batam "*smart and sustainable growth*", maka upaya yang berkelanjutan untuk mempertajam arah dan meningkatkan sasaran target dalam program dan kegiatan tahunannya baik substansi maupun pembiayaannya harus menjadi tolok ukur dalam setiap langkah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh BP-Batam.

Proses penyusunan Renstra ini bukanlah sesuatu yang *instan*, termasuk untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan, pimpinan dan seluruh jajaran yang ada di BP-Batam dituntut untuk memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan proses perencanaan strategis dan secara konsisten memperhatikan pelaksanaan tujuan dalam pencapaian sasaran yang akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka secara berjenjang dokumen Renstra ini harus dijabarkan lebih lanjut kedalam rencana strategis atau dokumen rencana program dan kegiatan masing-masing unit kerja dengan tetap saling berkoordinasi dan melakukan evaluasi tahunan demi tercapainya visi BP-Batam periode 2015 – 2019 yaitu, "Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara."

Akhirnya, dengan segala dukungan kerja yang optimal serta menjunjung tinggi nilai yang tertuang dalam *Spirit* BP-Batam (*service excellence, professional, innovative, integrity, entrepreneurship*), kami berharap agar seluruh target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat terpenuhi.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

MUSTOFA WIDJAJA



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NOMOR 109 TAHUN 2015

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN
BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TAHUN 2015-2019**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu disusun Rencana Strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam 5- tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2015-2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
8. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Batam, Bintan dan Karimun;
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
13. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20/KA-DK/BTM/VI/2014 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
14. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja unit kerja di Bawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TAHUN 2015-2019.
- KESATU : Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Tahun 2015-2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program pembangunan di wilayah kerja;

KETIGA : Pembiayaan atas pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2015-2019 diperoleh melalui Rencana Kerja Anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Kepala, Wakil Kepala, para Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2015

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUSTOFA WIDJAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Umum dan Sekretariat,

Teuku M. Rizasyah



RINGKASAN EKSEKUTIF

BP Batam merupakan sebuah organisasi pemerintah, dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam bentuk Perencanaan Strategik (Renstra) BP Batam tahun 2015-2019. Renstra BP Batam tersebut merupakan dokumen perencanaan taktis strategik lima tahunan yang akan menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BP Batam serta akan dikukuhkan sebagai produk hukum, sehingga nantinya akan menjadi acuan pembangunan dan investasi di Kawasan Batam. Renstra yang disusun ini berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra BP Batam ini juga memperhatikan Master Plan Kawasan Batam 2011-2016, *Blueprint* dan *Roadmap Development* BP Batam serta masukan dari para *stakeholders* bagi Batam yang akan dikembangkan melalui sektor-sektor: alih kapal, industri, jasa perdagangan dan kepariwisataan.

Dalam rancangan Renstra BP-Batam 2015-2019 dilakukan pula Identifikasi dan analisa lingkungan baik internal maupun eksternal di BP Batam, hal tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan BP Batam dalam lima tahun mendatang (2015-2019).

Adapun Potensi permasalahan yang dijadikan *issue*, adalah yang bersumber dari input lingkungan kerja BP-Batam, setelah dilakukan analisis menghasilkan peringkat *issue* yang dirasa akan berkembang dan harus dapat diselesaikan dalam 5 tahun mendatang yaitu: Target pencapaian untuk mendapatkan opini “wajar tanpa pengecualian” (WTP) atas laporan keuangan BP-Batam; Dibukanya globalisasi bidang jasa pada tingkat ASEAN yang akan mempertajam persaingan dibidang industry pelayanan di masa yang akan datang; Jenjang karier pegawai yang ber-status PNS di BP-Batam sangat terbatas dengan ditetapkannya BP-Batam menjadi instansi pemerintah non-struktural. (status PNS di BP-Batam berjumlah 2075 pegawai); Keberlangsungan status pelabuhan dibawah pengelolaan BP-Batam untuk memenuhi standar terhadap *International Ship and Port Facility Security (ISPS) code*; Evaluasi peningkatan kualitas aparatur negara/ SDM BP Batam; Kepastian kewenangan pengelolaan Pulau Rempang dan Pulau Galang; Pengelolaan manajemen asset; Kepastian kepemilikan lahan melalui sertifikasi hak milik di atas hak pengelolaan lahan; Berkembangnya kawasan investasi sejenis di kawasan regional Asia.

Melalui visi BP Batam 2015-2019 “ **Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara**”, dengan misi : Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang professional; Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); serta Mewujudkan kawasan investasi berwawasan lingkungan. Maka, BP-Batam di tahun 2015-2019 diharapkan mampu pula menarik minat industrialis asing, trader dan bankir asing, serta pengelola usaha lainnya untuk menempatkan kegiatan usahanya di Batam, yang ditandai tidak hanya dengan kenaikan pertumbuhan nilai *real* investasi namun berkembang pula menjadi pusat industri inti yang maju dengan pusat-pusat industri yang terkonsentrasi khususnya dalam 8 *focus industry* yaitu Informasi dan Teknologi Komunikasi; *Green Industry*; *Shared Service Outsourcing*; *Logistic Hub/ Transshipment*; Peralatan Elektronik dan Elektrikal; Pariwisata; Galangan Kapal dan Perbaikan Kapal serta Pesawat; Pengilangan dan Penyimpanan Minyak dan Gas. Adapun untuk mewujudkan cita-cita tersebut maka disusunlah fokus agenda pembangunan yang sejalan dengan misi BP-Batam yang terdiri dari target, sasaran, dan arah kebijakan dan strategi.

Visi dan Misi BP-Batam 2015-2019 diatas tidak terlepas dari analisis lingkungan strategik dan acuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang telah masuk pada tahap ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang dituangkan dalam rumusan arahan prioritas kebijakan yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas , kemampuan IPTEK yang terus meningkat serta sasaran pokok pembangunan nasional 2015-2019 dari bidang ekonomi, lingkungan, politik, penegakan hukum, tata kelola dan reformasi birokrasi, pertahanan dan keamanan, kesejahteraan rakyat, pembangunan kewilayahan dan pengembangan ekonomi maritime dan kelautan., yang telah dirumuskan dalam Sembilan agenda prioritas nasional dan dikenal dengan *Nawa Cita*.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas BP-Batam dalam melaksanakan pengelolaan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas di Batam turut serta mendukung agenda prioritas nasional dalam hal ; *Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan; Meningkatkan kualitas manusia Indonesia; Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sector strategis ekonomi domestic.*

Perwujudan dalam mendukung agenda prioritas tersebut tertuang dalam program dan kegiatan BP-Batam yang berorientasi pada pencapaian target dan peningkatan kualitas SDM maupun sarana prasarana serta lingkungan hidup dan berbagai penyempurnaan baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka kelembagaan yang diharapkan dapat terpenuhinya target-target baik target performance kinerja aparatur, kepuasan pelayanan public maupun investasi. Berikut disampaikan rencana target dan indicator utama BP-Batam untuk tahun 2015-2019 mendatang.

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	USULAN INDIKATOR	USULAN TARGET					UNIT PENANGGUNG JAWAB
			2015	2016	2017	2018	2019	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebagai upaya pengelolaan pengembangan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas Batam	1 Pencapaian target performance kinerja aparatur dilingkungan BP-Batam	64	68	70	72	74	Biro SDM, Biro Pengembangan Manajemen Kinerja,
		2 Pencapaian kesesuaian pelaksanaan kegiatan program terhadap rencana kerja BP Batam	70%	75%	75%	80%	80%	Biro Perencanaan Program dan Litbang, Biro Perencanaan Teknik, Satuan Pemeriksa Internal,
		3 Pencapaian akuntabilitas laporan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Biro Keuangan, Satuan Pemeriksa Internal,
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB Batam	Terwujudnya nilai ekonomis tinggi bagi masyarakat dan dunia usaha di Barelang	Pendaftaran nilai investasi PMA	\$608,400,000	\$719,160,000	\$888,888,000	\$1,163,385,600	\$1,405,422,720	Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana, Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Direktorat Promosi & Humas, Direktorat Lalu Lintas Barang, Kantor Pengelolaan Lahan, Biro Perencanaan Pengembangan Usaha Pelayanan dan Pentarifan,
		1 Realisasi nilai investasi PMA	\$359,417,326	\$447,833,988	\$558,001,149	\$695,269,432	\$866,305,712	
		PDRB berdasarkan berdasarkan realisasi PMA	\$89,854,332	\$111,958,497	\$139,500,287	\$173,817,358	\$216,576,428	
		2 Penyerapan tenaga kerja	120,000	126,500	134,000	142,000	149,000	Direktorat Pemanfaatan Asset, Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		3 Pencapaian kepuasan stakeholder terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	76%	78%	80%	82%	84%	Biro Perencanaan Program dan Litbang, Satuan Pemeriksa Internal, Kantor Bandar Udara HN, Kantor Pelabuhan Laut, RSBP, Pusat PDSI, Kantor Perwakilan, Direktorat Pengamanan, Kantor Pengelolaan Lahan,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
KEPUTUSAN KEPALA BP-BATAM.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii

I. PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Perkembangan Batam 2010-2014.....	3
1.1.1.1 Perkembangan investasi.....	3
1.1.1.2 Perkembangan Eksport.....	6
1.1.1.3 Perkembangan Tenaga Kerja.....	7
1.1.1.4 Pendapatan Regional.....	8
1.1.1.5 Evaluasi Kinerja Indikator Renstra 2010-2014.....	9
1.1.2 Apresiasi Masyarakat/ <i>Stakeholder</i>	10
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	10
1.2.1 Potensi Dalam Lingkungan Organisasi Pengelolaan BP-Batam.....	14
1.2.2 Permasalahan Dalam Lingkungan Organisasi Pengelolaan BP Batam...	15

II. VISI, MISI DAN TUJUAN BP-BATAM

2.1 Visi Renstra BP-Batam	17
2.2 Misi Renstra BP-Batam	18
2.3 Tujuan BP-Batam	19
2.4 Sasaran BP-Batam	19

III. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 2015 - 2019.....	23
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BP-Batam.....	63
3.3 Kerangka Regulasi.....	74
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	78

IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1	Target kinerja.....	82
4.2	Kerangka Pendanaan.....	86

V. PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan BP-Batam	96
Lampiran 2 : Matriks Kerangka Kelembagaan.....	107
Lampiran 3 : Matriks Kerangka Regulasi.....	109

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pada awalnya Pulau Batam merupakan pangkalan logistik dan operasional yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai PN Pertamina. Berdasarkan Keppres No. 74 tahun 1971 Pemerintah menjadikan Batu Ampar sebagai wilayah entreport partikulier yang memberikan implikasi berdatangnya investor asing. Mereka mulai merelokasikan kegiatannya ke Batu Ampar, khususnya industri yang berkaitan dengan peralatan pengeboran minyak lepas pantai.

Di samping itu, dengan adanya legalitas tersebut, perusahaan yang terlibat dalam kegiatan operasi dan logistik minyak mulai memiliki keleluasaan operasi karena banyak membutuhkan barang import. Selanjutnya Pulau Batam dikembangkan sebagai kawasan industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Kawasan Batam mendapatkan insentif fiskal berupa bebas pajak PPN, PPnBM dan bea masuk. Selain itu pada kawasan tersebut dikenakan PPh tanpa treatment khusus.

Kawasan Batam yang menjadi wilayah kerja Otorita Batam merupakan daerah *bonded zone* (kawasan berikat) yang ditetapkan dengan Keppres, tidak ada bea masuk dan pajak ekspor. Berdasarkan Keppres No. 33 tahun 1974 tgl. 29 Juni 1974 dan berdasarkan PP 20/72, tiga kawasan di Pulau Batam (Batu Ampar, Sekupang dan Kabil) memperoleh status *bonded warehouse*. Akan tetapi berdasarkan Keppres No. 41 Tahun 1978 seluruh wilayah pulau Batam ditentukan sebagai Kawasan Berikat.

Kedudukan Otorita Batam mulai berubah seiring dengan berlakunya UU No. 53/1999 tentang Pembentukan Kota Batam sebagai Daerah Otonom dan UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pengembangan Kawasan Batam, Otorita Batam bekerja sama dengan pihak Pemerintah Kota Batam.

Berdasarkan PP 46/2007 kawasan Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas untuk jangka waktu 70 tahun. Kawasan Batam meliputi Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Setokok, Pulau Nipah, Pulau Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Kegiatan utama yaitu sektor perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan dan

pariwisata. Hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dan melalui PP 5/2011 ditetapkan lagi Pulau Janda Berhias beserta gugusannya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Untuk dapat mengembangkan Kawasan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, diperlukan peran yang lebih deterministik kepada badan pengelola kawasan, antara lain:

- Mengembangkan Badan Pengelola dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*.
- Tuntutan pelayanan dan pengembangan bisnis dan investasi yang berskala nasional dan internasional.
- Mewujudkan prinsip-prinsip dalam sebuah rencana kerja organisasi (*corporate plan*) yang berupa visi, misi, strategi, program, kegiatan, dan penganggaran, yang mampu menjadi “tuntunan/alat” bagi seluruh pimpinan dan karyawan.
- Mengembangkan pelayanan investasi *one stop services* serta focus pada sector industry kunci yang memberikan nilai tambah.

Sebagai sebuah badan pengelola Kawasan Batam, maka BP Batam merupakan sebuah organisasi yang dalam melaksanakan tugasnya, melalui UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam bentuk Perencanaan Strategik (Renstra) BP Batam tahun 2015-2019. Renstra BP Batam tersebut merupakan dokumen perencanaan taktis strategik lima tahunan yang akan menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BP Batam serta akan dikukuhkan sebagai produk hukum, sehingga nantinya akan menjadi acuan pembangunan dan investasi di Kawasan Batam.

Renstra yang disusun ini berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Yang dimaksud dengan “bersifat indikatif” adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku. Dalam penyusunan Renstra BP Batam ini juga memperhatikan Master Plan Kawasan Batam 2011-2016, *Blueprint* dan *Roadmap Development* BP Batam serta masukan dari para *stakeholders* bagi Batam yang akan dikembangkan melalui sektor-sektor:

alih kapal, industri, jasa perdagangan dan kepariwisataan. Dengan berlakunya PP No. 46/2007 yang telah menetapkan Kawasan Batam sebagai kawasan bebas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dimana BP Batam diberi tugas dan fungsi untuk mengembangkan daerah Batam dalam bidang ekonomi yang meliputi sector : ***Perhubungan, Perdagangan, Industri, Maritim, Pariwisata, Perbankan dan sektor lainnya.***

1.1.1 Perkembangan Batam 2010 - 2014

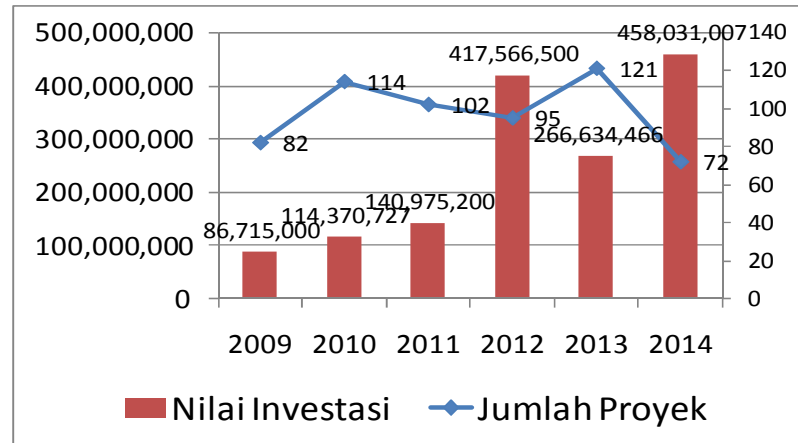
Berdasarkan letak geografisnya yang strategis, yaitu berada di sisi jalur perdagangan internasional maka perkembangan pulau Batam sejak awal diarahkan untuk menjadi pintu masuknya investasi, perdagangan dan jasa dari luar negeri. Sejak dicanangkannya kawasan Batam-Rempang-Galang sebagai FTZ tanggal 1 April 2009, berbagai kemudahan telah diberikan berkaitan dengan status tersebut dan telah berkembang menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi penanam modal, sejalan dengan penerapan Peraturan Presiden no.46/2009 dan peraturan pemerintah no.2/2009 yang akan disempurnakan hingga suatu tatanan investasi yang kompetitif. Dampak positif dari penerapan kebijakan tersebut diatas dapat dilihat dari meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) yang ada di Batam baik berupa kerjasama (*joint Venture*) dan tanpa kerjasama (*Direct Investment*), selain itu dampak positif lainnya adalah adanya peningkatan nilai ekspor-impor, jumlah tenaga kerja serta pertumbuhan perekonomian yang diatas rata-rata daerah lainnya.

1.1.1.1 Perkembangan Investasi

Investasi sering juga disebut penanaman modal atau pembentukan modal. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi merupakan hal yang penting dalam perekonomian. Investasi di Batam dibagi menjadi 2, yaitu; investasi Penanaman modal asing (PMA) dan investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Persetujuan/pendaftaran PMA baru dan perluasan secara kumulatif sejak tahun 1971 sampai dengan desember 2013 ini, dari data *Development Progress Of Batam Tahun 2013* mencapai 1563 PMA dengan nilai investasi mencapai sebesar US\$ 7.28 Miliar.

Perkembangan persetujuan/pendaftaran investasi asing (PMA baru dan dari 2009 sampai dengan pertengahan 2014 mencapai dengan total nilai investasi 1.486.292.900 US\$ dengan jumlah proyek 586 proyek. Grafik dan table pertumbuhan perkembangan pendaftaran investasi baru Tahun 2009 hingga pertengahan 2014 dapat diilustrasikan sebagai berikut:

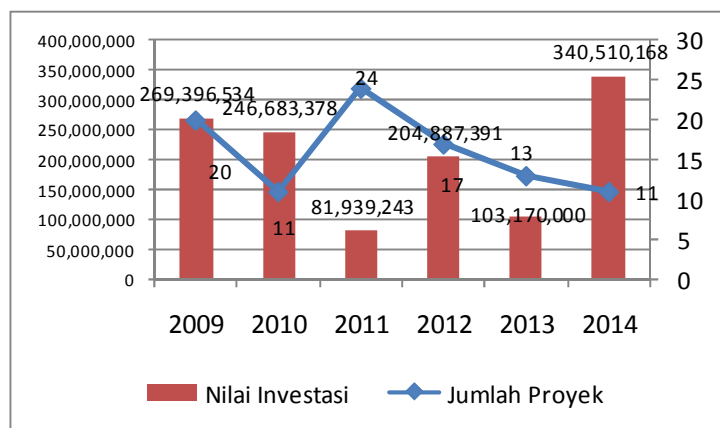


	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Jan-Jun)
Jumlah Proyek	82	114	102	95	121	72
Nilai Investasi (US\$)	86.715.000	114.370.727	140.975.200	417.566.500	268.634.466	458.031.007

Gambar 1.1: Grafik Pendaftaran Investasi Baru 2009 – 2014 (Juni)

Sumber: BKPM Agustus 2014.

Sedangkan perkembangan pendaftaran investasi untuk perluasan lapangan usaha pada tahun yang sama mencapai nilai 1.246.586.714 US\$ dengan jumlah proyek 96, Grafik dan tabel perkembangan pendaftaran investasi perluasan dapat diilustrasikan dibawah ini:



	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Jan-Jun)
Jumlah Proyek	20	11	24	17	13	11
Nilai Investasi (US\$)	269.396.534	246.683.378	81.939.243	204.887.391	103.170.000	340.510.168

Gambar 1.2: Grafik Pendaftaran Investasi Baru 2009 – 2014 (Juni)

Sumber: BKPM Agustus 2014.

Dari data diatas maka dapat diinformasikan bahwa pencapaian pendaftaran investasi PMA di Batam periode 2010 – 2014 (Juni) terjadi peningkatan sebesar 13.18% dari target 2.1 Milyar US\$. Hal ini dapat diinformasikan pada tabel dan grafik dibawah ini:



Tabel 1.1. Target dan Realisasi PMA Tahun Anggaran 2010-2014

Investasi tersebut berasal dari Negara Singapura, Malaysia, India, Australia, China(RRC), Inggris, Italia, British Virgin Island, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan, Belanda, Amerika Serikat, Philipina, Jerman, Irlandia, Ukraina, Sri Langka dan Norwegia.

Bidang-bidang usaha yang diminati antara lain Industri pembuatan dan perbaikan kapal, industri bangunan terapung dan lepas pantai, industri pipa dan sambungan pipa, industri pengelolaan bahan plastik (daur ulang) bukan logam, industri perakitan mesin, industri mesin metalurgi, dan mesin penambangan, industri pakaian jadi dan tekstil, perdagangan besar (distributor) ekspor dan impor, jasa industri berbagai pekerjaan khusus logam, angkutan barang peti kemas dan barang umum dan lainnya.

1.1.1.2 Perkembangan Ekspor

Perdagangan memegang peranan yang sangat penting dalam hubungan antar Negara termasuk Batam sebagai salah satu kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Indonesia, karena suatu Negara atau wilayah tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya hanya dengan mengandalkan produksi domestiknya. Batam, sejak era otorita Batam, melakukan perdagangan dengan banyak Negara di dunia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta menyuplai kebutuhan Negara lain.

Perhitungan data ekport yang disajikan dalam laporan ini adalah ekspor-Kota Batam termasuk wilayah FTZ dan masih menganut perhitungan dengan standar yang berlaku nasional, yaitu menganggap ekpor adalah barang keluar dari daerah pabean Indonesia saja dan impor yang masuk ke wilayah pabean Indonesia saja, belum memperhitungkan sesuai dengan kondisi wilayah FTZ.

Nilai ekspor Batam selama Januari-Desember 2013 menurut data *Development Progress Of Batam Tahun 2013* mencapai US\$ 11,754 Juta dari data tersebut nilai ekspor



Gambar 1.3: Grafik Perkembangan Ekspor Batam 2009-2013

mengalami kenaikan 1.03 % dibanding kan dengan periode yang sama di tahun

2011 yang mencapai US\$ 11,551 Juta. Selanjutnya sebagai gambaran rinci perkembangan ekspor Batam dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar diatas.

Dari data perkembangan diatas maka dapat disandingkan dengan target yang direncanakan pada periode 2010-2014 maka dapat disampaikan kegiatan ekspor diperkirakan hanya dapat tercapai sebesar 56.29% dari target yang telah direncanakan sebelumnya. Grafik perkembangan realisasi dan target ekspor dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.4: Grafik Target dan Realisasi 2009 – 2014

Sumber: Laporan BP-Batam Semester I Tahun 2014.

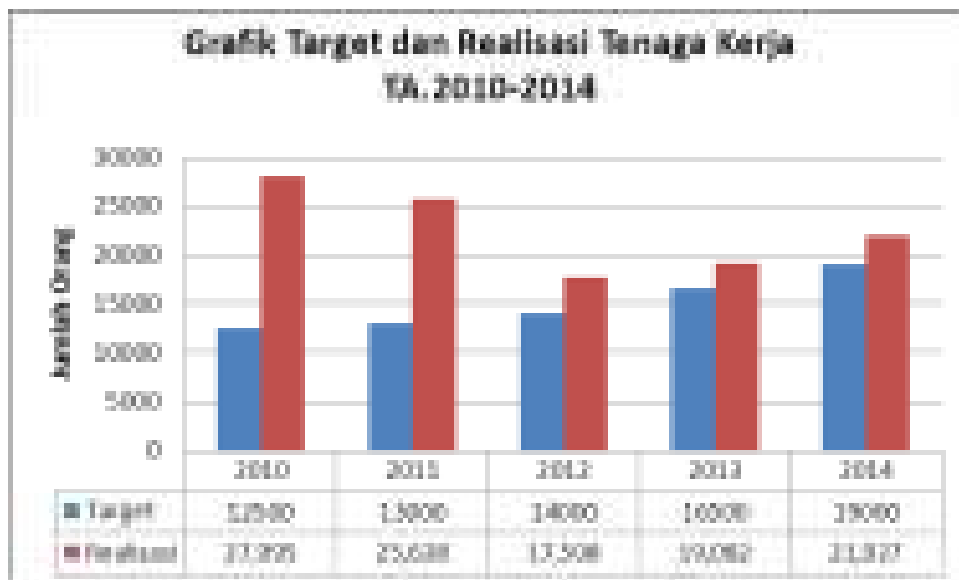
1.1.1.3 Perkembangan Tenaga Kerja

Berdasarkan data dari dinas tenaga kerja kota batam, sampai dengan Desember tahun 2013 terdaftar sebanyak 355,644 Orang tenaga kerja Jumlah tenaga kerja ini meningkat sebesar 5,67% dibandingkan dengan keadaan desember 2012 jumlah tenaga kerjanya sebanyak 336,562 Orang. Sebanyak 54,24 % tenaga kerja bekerja pada sektor industri; 14,23 % disektor jasa; 11,61% disektor perdagangan; 10,46% disektor bangunan.

Jumlah tenaga kerja perempuan mencapai 153,062 orang (43, 04 %) dan tenaga kerja laki-laki mencapai 202,582 orang (56,96%) dari total seluruh pekerja. Jumlah tenaga kerja asing tercatat sampai dengan Desember 2013 di Kota Batam sebanyak

5,995 Orang, terdiri dari 5,648 Orang pekerja laki-laki atau 94,21 % dan 347 orang pekerja perempuan atau 5,78 %. Perbandingan antara tenaga kerja formal dengan jumlah penduduk adalah 1 : 3.19.

Berdasarkan target di Renstra periode lalu target pertumbuhan tenaga kerja di Batam dalam 5 tahun terakhir sejumlah 75,000 orang yang terdiri dari tenaga kerja local dan asing. Berdasarkan perhitungan dan prediksi yang bersumber dari data *Development Progress Of Batam Tahun 2013* dan data Dinas Tenaga Kerja Kota Batam jumlah pertumbuhan tenaga kerja di Batam pada tahun 2010-2014 diperkirakan mencapai 112,140 orang, maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tenaga kerja mencapai 49,52% diatas target yang direncanakan. Grafik perkembangan realisasi dan target pertumbuhan tenaga kerja dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

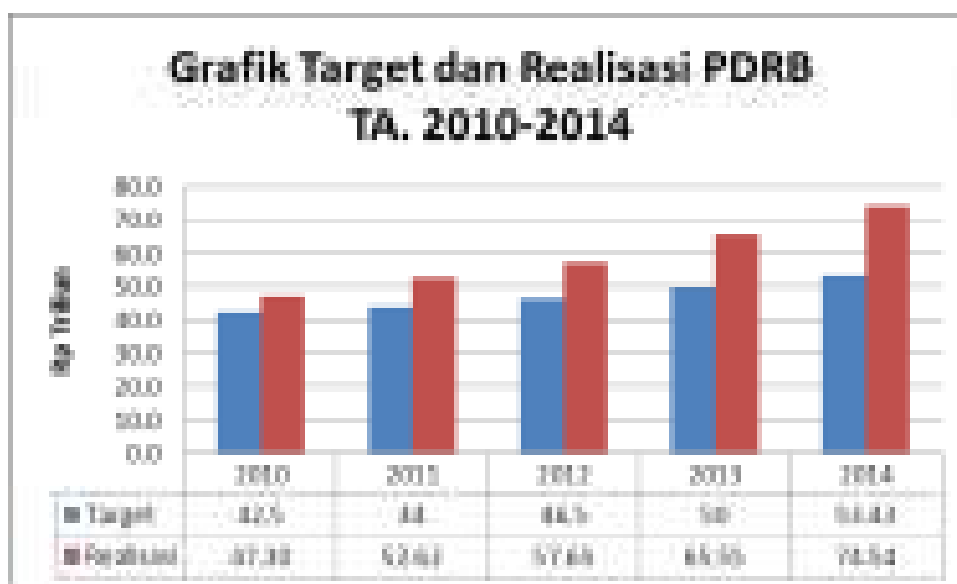


Gambar 1.5 : Grafik Target dan Realisasi tenaga kerja 2010 – 2014

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Batam 2013

1.1.1.4 Pendapatan Regional

Berdasarkan data dari BPS kota Batam peningkatan PDRB Batam di tahun 2013 mencapai 13.72 %, yaitu dari 57,65 Triliun di tahun 2012 menjadi 65,55 Triliun di tahun 2013. Adapun berdasarkan Renstra BP Batam periode lalu target yang ingin dicapai oleh BP Batam di Tahun 2014 adalah mencapai nilai PDRB sebesar 53,43 Triliun di tahun 2014. Jika diasumsikan pertumbuhan PDRB dari tahun 2013 ke tahun 2014 dianggap sama dengan tahun lalu maka prediksi nilai PDRB Batam di tahun 2014 mencapai 74.54 Triliun, maka nilai PDRB mencapai 39,5% diatas target yang direncanakan.



Gambar 1.7 : Grafik Target dan Realisasi PDRB 2010 – 2014

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Batam 2013

1.1.1.5 Evaluasi Kinerja Indikator Renstra 2010-2014

Tabel 1.2. Evaluasi Kinerja Indikator Renstra 2010-2014

PROGRAM/ KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT	INDIKATOR	TARGET 2010-2014	PREDIKSI/PENCAPAIAN 2010-2014	KESIMPULAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	Terwujudnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Upaya Pengelolaan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam	1 (%) Penyelesaian Keprotokolkan , Kesekretariatan dan Ketatausahaan Pimpinan.	100	100	Tercapai
		2 (%) Penyelesaian Tata Kelola Asset BP-Batam.	90	10	Tidak Tercapai
		3 (%) Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan Terhadap Rencana Program.	100	100	Tercapai
		4 Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga.	26	27	Tercapai
		5 (%) Terselenggaranya Rencana Pengelola Data Centre dan Sistem Informasi.	75	15	Tercapai
		6 (%) Penyelesaian Pengawasan dan Pemeriksaan Sesuai SOP.	100	100	Tercapai
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Batam	Terwujudnya Nilai Investasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Mendukung Pelayanan Kawasan Investasi	1 Nilai Investasi Swasta Asing.	US\$ 2.1 Miliar	US\$ 6.78 Miliar	Tercapai
		2 (%) Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan Satu Atap.	90	-	Tidak Tercapai (Sarana dan Prasarana Belum Memenuhi Standar Pelayanan)
		3 Penyerapan Tenaga Kerja.	75,000	110.425	Tercapai
		4 (%) Jaminan Ketersediaan Air Baku Bagi Penyediaan Air Bersih.	100	100	Tercapai
		5 Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Umum.	18	18	Tercapai

Sumber : Berbagai Sumber di Internal BP-Batam.

1.1.2 Aspirasi Masyarakat/Stakeholders

Selayaknya KPBPB di dunia KPBPB Batam mempunyai karakteristik yang berbeda unik dan unggul dengan daerah lain. Salah satunya adalah tingginya tingkat pertumbuhan industri yang merupakan kawasan unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Kota Batam itu sendiri, bahkan memiliki berbagai macam dampak bagi daerah sekitar (*multiple effects*). Di satu pihak diharapkan pertumbuhan nilai real investasi dalam pengembangan industri terus meningkat, tetapi di lain pihak dampak negatif terhadap peningkatan investasi saat ini adalah tingginya tingkat urbanisasi yang masuk ke Batam serta hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas. Oleh karena itu, untuk mendukung instrumen kebijakan dalam pengelolaan KPBPB-Batam yang berdaya saing untuk meningkatkan nilai investasi adalah pengaturan dalam pelayanan, khususnya yang dibawah naungan pengelolaan BP-Batam.

Beberapa aspirasi dari masyarakat / stake holders yang dianggap mampu menjadi daya ungkit KPBPB – Batam yaitu :

1. Pelayanan yang berhubungan dengan berbagai macam perijinan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, Pemerintah Kota Batam dan jajaran instansi baik vertical maupun horizontal agar pelaksanaannya dapat diterapkan di satu tempat saja, sehingga dapat lebih cepat dan memudahkan masyarakat/ stake holder dalam hal pengurusan perijinan;
2. BP-Batam sebagai pengelola KPBPB – Batam diharapkan segera meningkatkan kapasitas kepelabuhanan-nya khususnya dalam hal bongkar muat barang, karena kapasitas yang ada saat ini dirasa kurang efektif dan waktu tunggu keluar masuk barang menjadi kurang efisien;
3. Kebijakan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mendukung iklim investasi dan daya dukung kehidupan masyarakat.
4. Profesionalisme pengelola KPBPB-Batam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/*stake holder* yang berlandaskan atas prinsip efektif, efisien dan transparant.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi dan analisa lingkungan baik internal maupun eksternal BP Batam dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan yang tersedia seperti sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta berbagai

kelemahan yang dapat menghambat upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan BP Batam dalam lima tahun mendatang (2015-2019).

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut BP Batam didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang sampai dengan saat ini (Agustus, 2015) berjumlah 2.734 orang, dengan latar belakang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sarjana Strata 3. SDM BP Batam ini terdistribusi dalam 21 unit kerja. Sebagian besar SDM BP Batam berpendidikan SLTA (53.43%), diikuti dengan latar pendidikan terakhir Sarjana Strata 1 (S-1) 24.57%, Sarjana Strata 2 (S-2) 2.70%, dan Sarjana Strata 3 (S-3) 0,03%.

Sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dilimpahkan ke BP Batam untuk mengelola dan melaksanakan pembangunan di Pulau Batam, Pulau Rempang dan Pulau Galang, maka perlu didukung pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan tersebut oleh beberapa Instansi atau Kementerian/Lembaga terkait. Berdasarkan Jenjang Pendidikan formal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel: 1.3 Kekuatan Pegawai BP Batam Berdasarkan Jenjang Pendidikan

STATUS PENDIDIKAN PEGAWAI												
No	STATUS KEPEGAWAIAN	PENDIDIKAN										TOTAL
		S3	S2	S1/D 4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Lain-lain	
1	CPNS DPB							2	1			3
2	CPNS DPK											0
3	DPB		32	362	138	14	4	1042	67	39		1698
4	DPK	1	18	125	17	7	1	116	4	2		291
5	CAPEG NON		11	38	20							69
6	NON		3	49	67		2	65	19	53		258
total I		1	64	574	242	21	7	1225	91	94	0	2319
1	PENASEHAT			1								1
2	STAF AHLI											0
3	STAF KHUSUS		5	11								16
4	KONTRAK KHUSUS		4	9	1			5		1		20
5	STAF PENGAMANAN VIP							2				2
6	TENAGA PENGHUBUNG			1							2	3
total II		0	9	22	1	0	0	7	0	1	2	42
1	PEGAWAI KONTRAK		1	76	49			229	11	7		373
total III		0	1	76	49	0	0	229	11	7	0	373
GRAND TOTAL (I + II + III)		1	74	672	292	21	7	1461	102	102	2	2734

Sumber : Biro SDM, BP-Batam Agustus 2015.

Adapun kekuatan Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

Tabel: 1.4 Pegawai BP-Batam Berdasarkan Unit Kerja dan Golongan

		DATA PEGAWAI BERDASARKAN UNIT KERJA DAN GOLONGAN																			
NO	UNIT KERJA	Golongan																	PK	SK	Jumlah
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	BP BATAM	2																	4		6
2	WAKIL KEPALA	1																			1
3	ANGGOTA 1/ DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM		1	1															11		13
4	ANGGOTA 2/ DEPUTI BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	1																	1		2
5	ANGGOTA 3/ DEPUTI BIDANG PENGUSAHAAN SARANA USAHA		1	1															1		3
6	ANGGOTA 4/ DEPUTI BIDANG PENGUSAHAAN SARANA LAINNYA	1	1																		2
7	ANGGOTA 5/ DEPUTI BIDANG PELAYANAN UMUM		1																3		4
8	BIRO HUKUM DAN ORGANISASI				1	3	1	3	2	3		1	2						4		20
9	BIRO KEUANGAN			1	2	1	3	7	3	6		5	4	3					5		40
10	BIRO PENGEMBANGAN MANAJEMEN KINERJA	1			1	1	1	3	2	1		2				1			3		16
11	BIRO PERENCANAAN PENGEMBANGAN USAHA, PELAYANAN DAN PENTARIFAN			1	1		3	4		1		1									11
12	BIRO PERENCANAAN PROGRAM DAN LITBANG			1	2	2	1	6	2	3									6		23
13	BIRO PERENCANAAN TEKNIK				4		3	7	11	4	1	3	2	1			1				42
14	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA			1	2	4	2	2	8	9		5	9				1		5		48
15	BIRO UMUM DAN SEKRETARIAT				2	2	9	14	22	20	4	44	68	9	5	1	10		37	8	255
16	DIREKTORAT LALU LINTAS BARANG				1	2	3	9	14	10	1	14	5	2					7	1	69
17	DIREKTORAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			1	1	1	2	3		3			4						7		22
18	DIREKTORAT PEMANFAATAN ASET				4	1	4	12	14	3		5	44	8	6	8	12		48		170
19	DIREKTORAT PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA				1	2	5	5	18	10	1	8	31	10	5	11	27		5		139
20	DIREKTORAT PENGAMANAN			1		1	5	3	27	22	2	27	184	7	5	3	4		20	2	863
21	DIREKTORAT PROMOSI DAN HUMAS			1		1	3	4	2	7		3	4	1					10		36
22	KANTOR BANDAR UDARA HANG NADIM				3	1	39	19	37	27	10	93	85	4	3		2		57		880
23	KANTOR PELABUHAN LAUT BATAM			1		3	12	17	29	28	5	43	73	7	2	4	2		42	1	869
24	KANTOR PENGELOLAAN AIR DAN LIMBAH			1	1	1	7	4	14	7		16	10	4	2	4	6		2		79
25	KANTOR PENGELOLAAN LAHAN				3	1	3	9	9	13	1	7	10						31	3	95
26	KANTOR PERWAKILAN BADAN PENGUSAHAAN BATAM			1	1	3	5	4	9	6	1	3	3	12	2	2	5		4		62
27	PUSAT PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI			1		1	4	8	13	9	7	3	1						20	1	73
28	RUMAH SAKIT BADAN PENGUSAHAAN BATAM	1	7	2	5	7	11	44	84	85	34	61	63	20	2	7	7	2	58	6	476
29	SATUAN PEMERIKSA INTERNAL			1	2		1	2	1	2		2	2						2		15
		7	11	16	37	38	158	189	321	229	67	402	604	88	32	41	72	7	373	42	2734

Sumber : Biro SDM, BP-Batam Agustus 2015.

Sedangkan dari sisi asset. Asset yang dikelola BP Batam secara umum adalah berupa infrastruktur seperti gedung, jembatan, irigasi dan jaringan transportasi. Semenjak adanya pemerintah daerah di Batam maka terdapat beberapa asset yang dilimpahkan secara pengelolaannya. Berikut adalah uraian nilai asset yang dikelola BP Batam :

Tabel: 1.5 Asset BP-Batam

No	Aset	Nilai BMN	Akm Penyusutan	Nilai Netto
1	Suku Cadang	Rp45,939,000		Rp45,939,000
2	Tanah	Rp6,064,230,668,678		Rp6,064,230,668,678
3	Peralatan dan Mesin	Rp569,242,863,840	-Rp482,097,086,775	Rp87,145,777,065
4	Gedung dan bangunan	Rp877,297,781,936	-Rp244,189,064,087	Rp633,108,717,849
5	Jalan dan Jembatan	Rp5,486,270,437,011	-Rp3,331,142,118,258	Rp2,155,128,318,753
6	Irigasi	Rp466,847,191,017	-Rp223,839,988,759	Rp243,007,202,258
7	Jarigan	Rp836,944,734,207	-Rp472,726,435,295	Rp364,218,298,912
8	Aset Tetap Lainnya	Rp8,113,942,887	-Rp34,699,000	Rp8,079,243,887
9	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp335,990,714,000		Rp335,990,714,000
10	Software	Rp5,235,025,271		Rp5,235,025,271
11	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	Rp0		Rp0
	JUMLAH	Rp14,650,219,297,847	-Rp4,754,029,392,174	Rp9,896,189,905,673

Sumber : Laporan Barang Milik Negara, Semester 1 Tahun 2013- Biro Keuangan BP-Batam.

Potensi permasalahan yang menjadi *issue* yang berasal dari masukan lingkungan kerja BP-Batam, setelah dilakukan analisis menghasilkan peringkat *issue* yang dirasa akan berkembang dan dapat diselesaikan dalam 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Target pencapaian untuk mendapatkan opini “wajar tanpa pengecualian” (WTP) atas laporan keuangan BP-Batam;
2. Dibukanya globalisasi bidang jasa pada tingkat ASEAN yang akan mempertajam persaingan dibidang industry pelayanan di masa yang akan datang;
3. Jenjang karier pegawai yang ber-status PNS di BP-Batam sangat terbatas dengan ditetapkannya BP-Batam menjadi instansi pemerintah non-struktural. (status PNS di BP-Batam berjumlah 2075 pegawai);
4. Keberlangsungan status pelabuhan dibawah pengelolaan BP-Batam untuk memenuhi standar terhadap *International Ship and Port Facility Security (ISPS) code*;
5. Evaluasi peningkatan kualitas aparatur negara/ SDM BP Batam.
6. Kepastian kewenangan pengelolaan Pulau Rempang dan Pulau Galang;
7. Pengelolaan manajemen asset;
8. Kepastian kepemilikan lahan melalui sertifikasi hak milik di atas hak pengelolaan lahan;

9. Berkembangnya kawasan investasi sejenis di kawasan regional Asia;
10. Penyempurnaan hubungan kerja antara BP Batam dan pemerintah daerah;

1.2.1 Potensi dalam Lingkungan Organisasi Pengelolaan BP-Batam

Proses analisis potensi dilakukan dengan menggunakan pendekatan struktural yaitu analisis yang dilakukan dalam struktur kerja secara kualitatif yang ada dilingkungan kerja BP-Batam dengan mengkaji aspek sumber daya, kapabilitas dan kompetensi inti dengan hasil analisis lingkungan internal berupa potensi yang ada pada lingkungan pengelolaan BP-Batam.

Berikut dapat disampaikan potensi yang ada di BP-Batam setelah dilakukan proses analisis berdasarkan peringkat kekuatan yang dominan pada lingkungan BP-Batam yaitu:

1. Dukungan aspek legal sebagai pengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, berupa peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengelolaan dan pelayanan yang cukup memadai;
2. Memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang terintegrasi dengan system berbasis informatika teknologi yang handal;
3. Memiliki dua (2) kantor perwakilan di manca negara yang dapat memberikan peluang bagi peningkatan jejaring berskala internasional;
4. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran yang cukup memadai;
5. Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang banyak;
6. Memiliki hubungan kerja yang baik antar instansi dan para perwakilan negara sahabat;
7. Lingkup wilayah kerja BP-Batam yang berada dalam cakupan wilayah Hub Internasional;
8. Memiliki asset yang besar dan tersebar;

Dari peringkat potensi diatas, melalui analisis eksternal, maka dapat disampaikan peluang (*opportunities*) bagi BP-Batam yaitu:

1. Makin tingginya permintaan jumlah pengguna pada unit-unit layanan di BP-Batam;
2. Posisi yang strategis baik dari segi administrative maupun geografis dalam wilayah Hub-Internasional;
3. Cukup tingginya peminatan dalam hal kerjasama pemanfaatan dalam hal pengelolaan dan pengembangan SDM;
4. Memiliki dukungan penuh dari instansi/ lembaga terkait bagi peningkatan inspeksi, pengendalian, perencanaan dan penelitian di BP-Batam;
5. Pesatnya perkembangan IPTEK di kawasan regional Batam.

1.2.2 Permasalahan dalam Lingkungan Organisasi Pengelolaan BP-Batam

Permasalahan dalam lingkungan organisasi pengelolaan BP-Batam, Analisis eksternal dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan dan ancaman yang berasal baik dari lingkungan kerja BP-Batam maupun lingkungan luar Batam. Dalam analisis kualitatif ini dapat dipetakan hal yang menjadi permasalahan dan ancaman yang mungkin menjadi pertimbangan dalam menentukan strategi usaha ke depan.

Adapun permasalahan di BP-Batam setelah dilakukannya proses analisis, yaitu:

1. Masih kurang terintegrasinya sistem manajemen operasional dalam pengelolaan di unit-unit pelayanan BP-Batam;
2. BP-Batam belum memiliki *grand design* terhadap pengembangan bagi Sumber Daya Manusianya;
3. Masih lemahnya koordinasi antar unit kerja terkait yang ada di BP-Batam;
4. Belum optimalnya manajemen pengelolaan asset;
5. Masih rendahnya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan unit-unit kerja;
6. Belum diterapkan sistem *reward* dan *punishment*;

7. Belum terpenuhinya standar internasional dalam hal penyimpanan data dan pemeliharaan aplikasi yang masih dilakukan oleh pihak luar;
8. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan anggaran pada unit kerja.

Proses analisis lingkungan eksternal pun dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek-aspek eksternal seperti lingkungan sosial-budaya, ekonomi dan politik baik yang berada dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Berikut dapat disampaikan ancaman (*threat*) bagi BP Batam setelah dilakukan proses analisis berdasarkan peringkat ancaman yang dominan pada lingkungan BP Batam yaitu:

1. Masih adanya dualism/ tumpang tindih mengenai kewenangan dalam hal pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
2. Munculnya beberapa daerah kawasan industri yang serupa di kawasan sekitar regional Batam;
3. Belum terpenuhinya standar pelayanan perijinan yang mengacu pada standar pelayanan public yang dapat mengakibatkan kegagalan penanaman investasi di Batam;
4. Masih dijumpainya daerah pemukiman liar dan penggarap liar pada kawasan pengelolaan;
5. Adanya pemberlakuan tarif yang lebih rendah/ kompetitif dari jenis pelayanan yang sama yang diterapkan oleh pesaing;
6. Kebijakan dan regulasi dari pemerintah pusat yang sering berubah tentang investasi, perdagangan dan pengembangan wilayah;
7. Inovasi dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur bidang kepelabuhanan dan bidang lain yang dilakukan pesaing;
8. Makin tingginya tuntutan masyarakat dan stakeholder dalam hal pelayanan, pemenuhan informasi yang lengkap, akurat, komperhensif dan terpadu;
9. Makin kritisnya pengendalian dan pengawasan yang bersifat eksternal terhadap BP-Batam yang menuntut output yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan;

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN BP-BATAM

2.1 Visi BP-Batam

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi pemerintah dalam hal ini BP Batam. Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada 2010-2014 serta memperhatikan hasil analisis isu strategis dan berpedoman pada RPJMN 2015-2019, tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka visi pembangunan BP-Batam tahun 2015-2019 adalah:

Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara.

Berdasarkan visi diatas maka beberapa elemen utama yang tergabung dalam visi BP- Batam antara lain:

- a. Sebagai Pengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dalam hal ini BP-Batam memiliki komitmen untuk merealisasikan Pulau Batam dalam lingkup pengelolaannya sebagai kawasan yang mampu bersaing dengan kawasan-kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas lainnya khususnya di kawasan Asia Tenggara;
- b. Elemen kawasan investasi yang berdaya saing mengandung makna suatu kawasan yang menarik bagi kegiatan investasi yang didukung dan difasilitasi oleh:
 - b.1 Lokasi yang strategis;
 - b.2 Kemudahan perijinan baik barang maupun jasa;
 - b.3 Sarana prasarana yang berstandar internasional;
 - b.4 Birokrasi yang tidak rumit;
 - b.5 Pemberian insentif yang tunduk mengikuti aturan yang dikeluarkan organisasi perdagangan internasional (WTO);
 - b.6 Mendorong pembentukan usaha kepemilikan pribadi dan;
 - b.7 Peningkatan produktifitas tenaga kerja.

- c. Asia Tenggara, merupakan batasan kawasan regional yang ingin dituju sebagai kawasan yang mempunyai kemampuan bersaing dalam mewujudkan tempat usaha yang menguntungkan dalam kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas diantara di kawasan-kawasan sejenis di Asia Tenggara.

Dalam rangka menjadi pengelola kawasan yang mampu bersaing, diharapkan mampu pula menarik minat industrialis asing, trader dan bankir asing, serta pengelola usaha lainnya untuk menempatkan kegiatan usahanya di Batam, yang ditandai tidak hanya dengan kenaikan pertumbuhan nilai real investasi namun berkembang pula menjadi pusat industry inti yang maju dengan pusat-pusat industry yang terkonsentrasi.

2.2 Misi BP-Batam

Untuk mewujudkan dan merealisasikan visinya untuk **Menjadikan Batam sebagai Kawasan Investasi yang Berdaya Saing di Asia Tenggara**, maka BP Batam menetapkan misi pembangunan 2015-2019, sebagai berikut :

1. Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang professional;
2. Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.

Penjelasan Misi :

Misi memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang professional; misi ini merupakan langkah utama BP Batam sebagai pengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dalam upaya meningkatkan pengaturan pengelolaan tugas pokok dan fungsinya melalui cara peningkatan pembangunan sumberdaya manusia yang produktif, kompetitif, professional yang mengedepankan partisipasi, transparansi, responsibilitas dan berorientasi pada konsesi bersama secara adil, efektif, efisien, akuntabel serta tunduk dan taat dalam penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan tata kelola pengelolaan yang baik dan mendukung reformasi birokrasi.

Misi mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai melalui perwujudan kawasan- investasi yang berlandaskan pada etika bisnis

dan berkelanjutan yang didukung oleh sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik berstandar internasional serta keunggulan teknologi informatika dan komunikasi yang handal dengan focus utama pada peningkatan nilai investasi.

Misi mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan; misi ini merupakan upaya dalam memfasilitasi kawasan-kawasan investasi yang dikembangkan dengan berwawasan lingkungan khususnya dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana dasar dengan kapasitas yang memadai serta kualitas yang berstandar internasional dalam menjaga pengelolaan lingkungan hidup yang mantap guna mendukung kegiatan pengembangan dan pengelolaan investasi.

2.3 Tujuan BP-Batam

Tujuan pembangunan yang akan dicapai BP Batam 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi pada point yang sebelumnya telah dikemukakan. Adapun dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka tujuan yang akan dicapai BP-Batam mendatang yaitu:

- a. Meningkatkan peran kelembagaan yang professional dalam mengantisipasi persaingan ekonomi dan perdagangan global;
- b. Menjaring dan mengembangkan kawasan investasi dalam sector industry, perdagangan dan pariwisata yang berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
- c. Mengembangkan sarana prasarana kepelabuhanan yang berstandar internasional;
- d. Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.

Melalui tujuan diatas maka diharapkan akan Menarik dan Mengembangkan investasi dalam sektor industri, perdagangan, alih kapal (*transshipment*) dan pariwisata, juga dapat lebih mengembangkan serta Membangun sarana dan prasarana serta infrastruktur yang memadai dalam mendukung pengembangan pembangunan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.

2.4 Sasaran BP-Batam

Sesuai dengan Misi Kesatu: Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang professional; maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tujuan 1:

Meningkatkan peran kelembagaan yang professional dalam mengantisipasi persaingan ekonomi dan perdagangan global.

Dengan sasaran strategis :

- 1.1 Terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi.
- 1.2 Terwujudnya profesionalitas dalam manajemen pengelolaan yang menerapkan prinsip *good governance* dan *good corporate governance*.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Kesatu

Tujuan	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja
1. Meningkatkan peran kelembagaan yang professional dalam mengantisipasi persaingan ekonomi dan perdagangan global.	1.1 Terwujudnya aturan dan regulasi yang berpihak pada pengembangan investasi.	1.1.1 Persentase jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi di KPBPB Batam.
	1.2 Terwujudnya profesionalitas dalam manajemen pengelolaan yang menerapkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>good corporate governance</i>	1.2.1 Tersusunnya Grand Design dan reformasi birokrasi di KPBPB Batam.
		1.2.2 Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja di BP-Batam.

Sesuai dengan Misi Kedua: Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tujuan 2:

Menjaring dan mengembangkan kawasan investasi dalam sector industry, perdagangan dan pariwisata yang berbasis Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK);

Dengan sasaran strategis :

- 2.1 Tercapainya target realisasi nilai investasi dari 8 fokus industri.

Tabel 2.2**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Kedua**

Tujuan	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja
2. Menjaring dan mengembangkan kawasan investasi dalam sector industry, perdagangan dan pariwisata yang berbasis Teknologi, Informatika dan Komunikasi (TIK).	2.1 Tercapainya target realisasi nilai investasi dari 8 fokus industry	2.1.1 Nilai investasi real di 8 fokus industry yang dikembangkan KPBPB-Batam tercapai sejumlah 2.9 Milyar USD di tahun 2019 2.1.2 Waktu pelayanan perijinan investasi 15 hari

Tujuan 3:

Mengembangkan sarana prasarana kepelabuhanan yang berstandar internasional

Dengan sasaran strategis :

- 3.1 Tersedianya sarana prasarana kepelabuhanan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional.

Tabel 2.3**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Kedua**

Tujuan	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja
3. Mengembangkan sarana prasarana kepelabuhanan yang berstandar internasional	3.1 Tersedianya sarana prasarana kepelabuhanan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional	3.1.1 Target pendapatan pelabuhan laut tercapai 1.6 Trilyun di tahun 2019 3.1.2 Waktu pelayanan bongkar muat barang container dan cargo pelabuhan laut max 7hari. 3.1.3 Target pendapatan bandara tercapai 1.1 Trilyun di Tahun 2019 3.1.4 Waktu pelayanan bongkar muat barang container dan cargo bandara hang nadim max 45 menit

Sesuai dengan Misi Ketiga: Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan, maka tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tujuan 4:

Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.

Dengan sasaran strategis :

4.1 Terciptanya kawasan investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Ketiga

Tujuan	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja
4. Mengembangkan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan- kawasan investasi yang berwawasan lingkungan	4.1 Terciptanya kawasan investasi yang sehat dan berwawasan lingkungan	4.1.1 Target pendapatan Rumah Sakit tercapai 887 milyar di tahun 2019 4.1.2 Target pendapatan kantor air tercapai 356 milyar di tahun 2019 4.1.3 Terjaganya kualitas udara dan air yang baik

BAB III

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah kebijakan dan strategi BP-Batam, merupakan pedoman dalam penyusunan sasaran strategi dan program kerja yang direncanakan dan disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang segera diselesaikan dalam lima tahun mendatang dan diharapkan memiliki dampak yang positif terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis BP-Batam.

Penyusunan arah kebijakan dan strategi dijabarkan dalam program dan kegiatan BP-Batam yang mengacu pada aturan perundangan dan aturan resmi lainnya yang mendasari tugas pokok dan fungsi BP Batam dengan mempertimbangkan potensi sumber daya BP- Batam dalam melaksanakan program dan kegiatan. Bersamaan dengan hal tersebut, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan BP-Batam telah dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam upaya pencapaian visi dan misi BP Batam serta mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke tiga (2015-2019) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 masuk pada tahap ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang dituangkan dalam rumusan arahan prioritas kebijakan yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Untuk mewujudkan visi misi pembangunan dalam RPJMN 2015-2019 telah dirumuskan Sembilan agenda prioritas nasional. Kesembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Adapun kesembilan agenda tersebut yaitu :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;

2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sector strategis ekonomi domestic;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Mengacu pada sasaran pokok pembangunan nasional 2015-2019 dari bidang ekonomi, lingkungan, politik, penegakan hukum, tata kelola dan reformasi birokrasi, pertahanan dan keamanan, kesejahteraan rakyat, pembangunan kewilayahan dan pengembangan ekonomi maritime dan kelautan, maka disusun arah kebijakan umum pembangunan nasional yang memuat kebijakan dalam:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan;
3. Mempercepat pembangunan infrastuktur untuk pertumbuhan dan pemerataan;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim;
5. Penyiapan landasan pembangunan yang kokoh;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan;
7. Mengembangkan dan pemeratakan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka penugasan RPJMN 2015-2019 terhadap BP-Batam, mendukung dalam beberapa focus prioritas nasional, diantaranya:

1. **Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, yang tertuang dalam focus prioritas kedua;**

1.1 Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan; terwujudnya sistem pelaporan kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah; meningkatnya implementasi *open government* pada seluruh instansi pemerintah serta makin efektifnya penerapan *e-government* untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern.

Arah Kebijakan dan Strategi

- 1) Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain: penyempurnaan kebijakan yang mengatur sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; pemantapan implementasi SAKIP pada instansi pusat dan daerah; pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik; serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Penerapan *open government* merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi publik; penyediaan ruang partisipasi bagi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik, penguatan badan publik agar terbuka dan akuntabel melalui pelaksanaan edukasi dan advokasi bagi Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota; dan pendampingan operasionalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) badan publik daerah.

- 3) Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan *e-government*; harmonisasi kelembagaan *e-government*, penguatan system dan infrastruktur *e-government* yang terintegrasi; peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM; penetapan quick wins penerapan *e-government*; dan pengendalian pengembangan sistem dan pengadaan infrastruktur *e-government* oleh K/L/Pemda.

1.2 Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN)

Sasaran

Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitasnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang, yang ditandai dengan: terwujudnya kelembagaan birokrasi yang efektif dan efisien; meningkatkan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi; diimplementasikannya UU Aparatur Sipil Negara secara konsisten pada seluruh instansi pemerintah; dan meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Arah Kebijakan dan Strategi

- 1) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK dan LNS); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan, dan penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horisontal; serta penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
- 2) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kebijakan reformasi birokrasi nasional; penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN.
- 3) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: moratorium penerimaan CPNS selama 5 tahun ke depan, pengendalian jumlah dan redistribusi pegawai; penerapan sistem

rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis merit dan ICT; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan system promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh efektifnya KASN; penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.

- 4) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta; peningkatan pelayanan publik yang lebih terpadu, memastikan implementasi kebijakan dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik; penetapan quick wins pelayanan publik K/L/Pemda dan nasional; mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi kelembagaan pelayanan perizinan; pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik melalui citizen charter; serta penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat.

1.3 Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik

Sasaran

Sasaran pokok yang akan dicapai adalah meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

Arah Kebijakan dan Strategi

- 1) Melaksanakan secara konsisten UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan strategi:
 - (a) Penataan regulasi yang mengatur kewajiban instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - (b) Pengelolaan dan pelayanan informasi dan secara berkualitas oleh instansi pemerintah pusat dan daerah;

- (c) Penyebaran informasi publik secara berkualitas melalui berbagai media center, media komunitas dan media tradisional;
 - (d) Pembentukan PPID di setiap badan publik, terutama di daerah dan lembaga non pemerintah yang operasional sesuai dengan UU KIP serta peraturan pelaksanaannya;
 - (e) Penyediaan dan pelembagaan forum konsultasi publik dan ruang partisipasi lainnya untuk masyarakat sipil oleh seluruh badan publik;
 - (f) Penyediaan informasi yang terkait dengan rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - (g) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
- 2) Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik, dan memanfaatkannya, dengan strategi sebagai berikut:
- (a) Penguatan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - (b) Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - (c) Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat;
 - (d) Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat.

2. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan, yang tertuang dalam focus prioritas ketiga;

2.1 Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris

Pengembangan Kawasan Perbatasan

Perbatasan negara yang selama ini dianggap sebagai pinggiran negara, ditujukan pengembangannya menjadi halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (*security approach*), dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*),

yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi

Sasaran

Sasaran pembangunan kawasan perbatasan pada tahun 2015-2019, meliputi:

- 1) Berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, simpul utama transportasi wilayah, pintu gerbang internasional/ pos pemeriksaan lintas batas kawasan perbatasan negara, dengan 16 PKSN lainnya sebagai tahap persiapan pengembangan;
- 2) Meningkatnya efektifitas diplomasi maritim dan pertahanan, dan penyelesaian batas wilayah negara dengan 10 negara tetangga di kawasan perbatasan laut dan darat, serta meredam rivalitas maritim dan sengketa teritorial;
- 3) Menghilangkan aktivitas *illegal fishing*, *illegal logging*, *human trafficking*, dan kegiatan ilegal lainnya, termasuk mengamankan sumberdaya maritim dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); dan
- 4) Meningkatnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan, termasuk di 92 pulau-pulau kecil terluar/terdepan;
- 5) Meningkatnya kerjasama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara tetangga, ditandai dengan meningkatnya perdagangan ekspor-impor di perbatasan, dan menurunnya kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Untuk mempercepat pengembangan kawasan perbatasan tersebut diperlukan strategi pembangunan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara berdasarkan karakteristik wilayah, potensi lokal, dan mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga dengan didukung pembangunan infrastruktur transportasi, energi, sumber daya air, dan telekomunikasi-informasi;
- 2) Membangun sumber daya manusia (SDM) yang handal serta

pemanfaatan pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam memanfaatkan dan mengelola potensi lokal, untuk mewujudkan kawasan perbatasan negara yang berdaya saing;

- 3) Membangun konektivitas simpul transportasi utama pusat kegiatan strategis nasional dengan lokasi prioritas perbatasan dan kecamatan disekitarnya, pusat kegiatan wilayah (ibukota kabupaten), pusat kegiatan nasional (ibukota provinsi), dan menghubungkan dengan negara tetangga. Membangun konektivitas melalui pelayanan transportasi laut untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan terhadap wilayah perbatasan laut.
- 4) Membuka akses di dalam lokasi prioritas dengan transportasi darat, sungai, laut, dan udara dengan jalan/moda/dermaga non status dan pelayanan keperintisan;
- 5) Membangun kedaulatan energi di perbatasan Kalimantan, dan kedaulatan telekomunikasi di seluruh wilayah perbatasan negara.
- 6) Optimalisasi pengawasan lintas batas negara dilakukan melalui kolaborasi peran dan fungsi secara terpadu antara *Custom, Immigration, Quarantine, Security* (CIQS) sesuai dengan standar internasional dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu. Meskipun secara kelembagaan masing-masing merupakan institusi yang mandiri dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan lintas batas negara;
- 7) Meningkatkan arus perdagangan ekspor-impor di perbatasan, kerjasama perdagangan, dan kerjasama pertahanan dan keamanan batas wilayah dengan negara tetangga.
- 8) Menerapkan kebijakan desentralisasi asimetris untuk kawasan perbatasan negara dalam memberikan pelayanan publik (infrastruktur dasar wilayah dan sosial dasar) dan distribusi keuangan negara;
- 9) Mereformasi pelayanan publik di kawasan perbatasan melalui penguatan desa di kecamatan lokasi prioritas penanganan kawasan perbatasan melalui fasilitasi, supervisi, dan pendampingan.

2.2 Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia.

Pengembangan Kawasan Strategis

Sasaran

Sasaran pembangunan kawasan strategis periode 2015-2019 adalah berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk di antaranya : 10 Kawasan Industri baru, 10 KEK, 13 KAPET, 4 KPBPB, dan 169 KPI. Dengan demikian diharapkan berkurangnya kesenjangan pembangunan wilayah antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan KTI. Hal ini dicerminkan dengan peningkatan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, Bali dan Nusa Tenggara dengan sasaran kontribusi PDRB KTI meningkat dari sekitar 20 persen (2014) menjadi minimal 22 persen terhadap PDB pada tahun 2019. Dengan demikian, diharapkan kondisi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di KTI.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral dan regional. Setiap wilayah akan mengembangkan potensi dan keunggulannya, melalui pengembangan **industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan pariwisata**. Strategi yang akan dilakukan dalam pengembangan kawasan strategis tersebut adalah:

1) Pengembangan Potensi Ekonomi Wilayah

Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan, baik yang telah ada (KEK, KAPET, KPBP, dan KPI) maupun yang baru, terutama di wilayah koridor ekonomi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Pada pusat-pusat pertumbuhan tersebut akan dibangun 13 kawasan industri baru yang menjadi keunggulannya, terutama yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan banyak kesempatan kerja. Selain itu, akan dilakukan pula percepatan pembangunan ekonomi nasional berbasis maritim (kelautan) di kawasan pesisir dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa kemaritiman, yaitu peningkatan

produksi perikanan; pengembangan energi dan mineral kelautan; pengembangan kawasan wisata bahari; dan kemampuan industri maritim dan perkapalan.

2) Percepatan Pembangunan Konektivitas

Percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur di wilayah pertumbuhan, antar wilayah pertumbuhan serta antar wilayah koridor ekonomi atau antar pulau melalui percepatan pembangunan infrastruktur pelabuhan, bandara, jalan, informasi dan telekomunikasi, serta pasokan energi. Tujuan penguatan konektivitas adalah untuk (a) menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi untuk memaksimalkan pertumbuhan berdasarkan prinsip keterpaduan melalui *inter-modal supply chained system*; (b) memperluas pertumbuhan ekonomi dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi ke wilayah belakangnya (*hinterland*) (c) menyebarkan manfaat pembangunan secara luas melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan. Upaya pembangunan konektivitas tersebut antara lain akan membangun 2000 kilometer jalan, 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang yang lama, 10 bandara baru dan merenovasi yang yang lama, membangun Bank Pembangunan dan Infrastruktur, serta mendorong BUMN untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

3) Peningkatan Kemampuan SDM dan Iptek

Peningkatan pengembangan kemampuan SDM dan Iptek dilakukan melalui penyediaan SDM yang memiliki kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan industri di masing-masing pusat-pusat pertumbuhan di daerah. Membangun SMK-SMK dan politeknik dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini. Selain itu, akan dilakukan pembangunan *Science and Technology Park* dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan berinovasi untuk meningkatkan daya saing, serta mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber daya universitas, lembaga litbang, dan dunia usaha. Untuk itu, akan ditingkatkan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi.

4) Regulasi dan Kebijakan

Dalam rangka mempermudah proses pembangunan, Pemerintah akan melakukan deregulasi (*debottlenecking*) peraturan-peraturan yang menghambat pengembangan investasi dan usaha di kawasan pertumbuhan ekonomi, melalui: (i) mempercepat penyelesaian

peraturan pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan investasi, (ii) menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada baik di tingkat pusat dan daerah, maupun antara sektor/lembaga, (iii) merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah strategis, dan (iv) menyusun peraturan untuk memberikan insentif bagi pengembangan investasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

5) Peningkatan Iklim Investasi dan iklim usaha

Dalam rangka mempermudah dan memperlancar proses kemudahan berusaha dan berinvestasi, perlu dilakukan melalui: (i) penyederhanaan prosedur investasi dan prosedur berusaha di kawasan strategis, (ii) peningkatan efisiensi logistik di dalam kawasan strategis dan antar wilayah, (iii) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (PTSP) di Kawasan Strategis dengan mempercepat pelimpahan kewenangan perijinan dari Kepala Daerah kepada Kepala PTSP (iv) meningkatkan efektivitas pelaksanaan KPS terutama dalam rangka penyediaan infrastruktur dan energi untuk mendukung pengembangan kawasan strategis, (v) meningkatkan dan menggali potensi investasi kawasan strategis (vi) membatalkan perda bermasalah untuk meningkatkan kepastian berusaha di kawasan strategis, (vii) menerapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dengan tetap mempertimbangkan peningkatan produktivitas untuk menarik minat investor ke kawasan strategis; dan (viii) memberikan insentif fiskal dan non fiskal khusus untuk kawasan strategis dalam rangka yang dapat mendorong investasi sektor pengolahan yang memproduksi bahan baku untuk industri domestik dan sektor industri yang mengolah sumber daya alam.

2.3 Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat

Dalam rangka pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat, tantangan yang dihadapi utamanya adalah meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah yang dapat dicapai dengan:

- 1) **Menciptakan pertumbuhan inklusif.** Pola pertumbuhan inklusif perlu diupayakan untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan kerja dalam pasar tenaga kerja yang layak (*Decent Work*), dan membuka peluang usaha ekonomi produktif bagi penduduk kurang mampu dan rentan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan. Untuk itu, tantangannya

adalah memfasilitasi peningkatan kemampuan penduduk kurang mampu dan rentan dalam mengelola keuangan dasar, mengembangkan usaha mandiri, dan melek keuangan (*financial literacy*), serta mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor padat modal dan bukan padat tenaga kerja.

- 2) **Memperbesar investasi padat pekerja.** Terbukanya lapangan kerja baru menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk. Terciptanya lapangan kerja baru membutuhkan investasi baru untuk menyerap kesempatan kerja seluas-luasnya, untuk menyerap angkatan kerja yang berpendidikan SD dan SLTP.
- 3) **Memberikan perhatian khusus kepada usaha mikro dan kecil.** Usaha mikro dan kecil perlu memperoleh dukungan penguatan teknologi, pemasaran, dan permodalan, dan akses pasar yang bagus seperti halnya usaha besar. Dukungan semacam ini perlu diberikan mengingat sebagian besar usahanya tidak memiliki lokasi permanen, dan mayoritas tidak berbadan hukum, sehingga rentan terhadap berbagai hambatan yang dapat menghalangi potensinya untuk tumbuh kembang.

Sasaran

Sesuai dengan amanat RPJP 2005-2025 dan Visi Misi Presiden, serta mempertimbangkan tingginya tingkat ketimpangan dan tren penurunan tingkat kemiskinan selama ini, permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang, maka sasaran utama (*impact*) yang ditetapkan adalah menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 5,0 – 6,0 persen pada tahun 2019. Sasaran untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat adalah:

- 1) Meningkatnya investasi padat pekerja sehingga memperluas kesempatan pekerjaan bagi masyarakat yang kurang mampu (*decent job*);
- 2) Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi;
- 3) Terbentuknya kemitraan pemerintah, pemerintah daerah dan swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas dan keterampilan masyarakat dalam rangka peningkatan penghidupan

masyarakat;

- 4) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas;

Arah Kebijakan dan Strategi

Dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat kurang mampu, maka upaya mengurangi ketimpangan dilakukan pembangunan yang inklusif dan kebijakan afirmatif yang lebih nyata, yaitu: a) Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, b) Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, c) Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan. Agenda ini perlu didukung oleh basis data perencanaan yang handal dalam satu sistem informasi yang terpadu yang menjadi forum pertukaran data dan informasi bagi seluruh pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta penguatan kapasitas aparat pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran yang lebih berpihak pada masyarakat miskin. Adapun strategi penanggulangan kemiskinan mencakup hal-hal berikut.

- 1) Mengarahkan kebijakan fiskal yang mendukung penghidupan masyarakat kurang mampu terutama pengeluaran publik yang bersifat bantuan sosial yang bersasaran.
- 2) Sinkronisasi kerangka regulasi dan kebijakan pemerintah terutama kerangka regulasi dan kebijakan sektor pertanian, perdagangan luar negeri, aturan logistik komoditas pangan, dan aturan monopoli.
- 3) Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar untuk masyarakat kurang mampu dan rentan melalui (i) peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan; (ii) meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk kurang mampu dan rentan; (iii) penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standarisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu.
- 4) Meningkatkan penghidupan masyarakat kurang mampu melalui (i) pemberdayaan ekonomi berbasis pengembangan ekonomi lokal, (ii) perluasan akses permodalan dan layanan masyarakat kurang mampu, dan (iii) peningkatan pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu.

- 6) Kebijakan tenaga kerja yang kondusif dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat kurang mampu dengan meningkatkan iklim investasi yang bersifat padat pekerja.
- 7) Meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap informasi lapangan pekerjaan, peningkatan pelatihan, dan penyaluran tenaga kerja
 - a. Menciptakan kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah, pusat pelatihan kerja, dan pihak swasta/ BUMN
 - b. Meningkatkan kesempatan masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan formal dan non-formal sehingga dapat meningkatkan akses terhadap pekerjaan yang layak (*decent job*)
- 8) Memperkuat konektivitas lokasi pedesaan dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di pedesaan yang dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat.

3 Meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang tertuang dalam focus prioritas kelima;

Pembangunan Kesehatan Khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Sehat pada RPJMN 2015-2019 adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, meningkatnya pengendalian penyakit, meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, meningkatnya, terwujudnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta meningkatkan responsivitas sistem kesehatan. Sasaran pokok tersebut antara lain tercermin dari indikator berikut :

Tabel 3.1
Indikator Pembangunan Kesehatan

No	Indikator	Status Awal	Target 2019
1	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan		
1.	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi	0	5.600
2.	Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal s1 RSUD yang terakreditasi	10	477
3.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	-	95

Arah Kebijakan dan Strategi

Pembangunan kesehatan dan gizi bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada selurush siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat. Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (*primary health care*) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan.

- 1) Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas melalui:
 - a. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah sakit pratama termasuk peningkatan rumah sakit di setiap kabupaten/kota;
 - b. Penguatan dan pengembangan sistem rujukan nasional, rujukan regional dan sistem rujukan gugus kepulauan dan pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan online ;
 - c. Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar *guideline* pelayanan kesehatan;
 - d. Pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan;
 - e. Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; serta
 - f. Peningkatan efektivitas pengelolaan rumah sakit terutama dalam regulasi pengelolaan dana kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pemerintah daerah.

- 2) Meningkatkan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas melalui :
 - a. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah

sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah sakit pratama termasuk peningkatan rumah sakit di setiap kabupaten/kota;

- b. Penguatan dan pengembangan sistem rujukan nasional, rujukan regional dan sistem rujukan gugus kepulauan dan pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan online ;
- c. Peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar *guideline* pelayanan kesehatan;
- d. Pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan;
- e. Peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; serta
- f. Peningkatan efektivitas pengelolaan rumah sakit terutama dalam regulasi pengelolaan dana kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pemerintah daerah.

4 Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, yang tertuang dalam focus prioritas keenam;

4.1 Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

Sasaran

- 1) Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antar moda, melalui:
 - a. Meningkatnya kemandirian jalan nasional menjadi 100 persen, jalan provinsi menjadi 80 persen, dan jalan kabupaten/kota menjadi 70 persen melalui pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km, peningkatan kapasitas jalan sepanjang 1.807 Km, pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km, serta memperbaiki jalan (preservasi) sepanjang 46.770 km di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku dan Papua,
 - b. Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor (jam) untuk koridor utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km pada lintas-lintas utama.
 - c. Jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi 210 juta/penumpang/tahun dengan membangun 15 bandara baru dan merenovasi yang lama tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

- d. Membangun/mengembangkan 24 pelabuhan yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
 - e. Meningkatnya jumlah barang yang dapat diangkut oleh kereta api menjadi 1,5 juta TEUs/Tahun, pangsa muatan angkutan KA api minimal 5 persen untuk barang dan 7,5 persen untuk penumpang melalui pembangunan jalur KA sepanjang 3.258 km pada lintas Sumatera, Lintas Selatan Jawa, Lintas Kalimantan dan Lintas Sulawesi (Makassar-Parepare).
 - f. Terhubungkannya seluruh sabuk utama lintas penyeberangan melalui pengembangan pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi dan pengadaan 50 unit sarana kapal penyeberangan perintis.
- 2) Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan konektivitas global melalui:
- a. Terselenggaranya pelayanan Short Sea Shipping yang terintegrasi dengan moda lainnya seperti kereta api dan angkutan jalan di Pulau Jawa dan Sumatera.
 - b. Meningkatnya SDM transportasi yang bersertifikat menjadi 2 kali lipat dibandingkan kondisi baseline dengan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan untuk lulusan pendidikan perhubungan laut sebanyak 1 juta orang, lulusan pendidikan udara sebanyak 30 ribu orang, dan lulusan pendidikan darat sebanyak 35 ribu orang.
 - c. Terselenggaranya pelayanan transportasi lintas batas negara dalam kerangka konektivitas ASEAN
- 3) Tersedianya layanan transportasi serta komunikasi dan informatika di perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya melalui:
- a. Meningkatnya sistem jaringan dan pelayanan transportasi perdesaan yang menghubungkan wilayah-wilayah perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan lokal dan wilayah.
 - b. Terselenggaranya integrasi pelayanan transportasi perintis di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluar.
 - c. Jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 persen di wilayah USO.
 - d. Jangkauan siaran LPP RRI dan LPP TVRI terhadap populasi masing-masing mencapai 90 persen dan 88 persen.

- 4) Tersedianya layanan pita lebar (*broadband*) dengan tujuan:
 - a. Terhubungnya jaringan tulang punggung serat optik nasional di seluruh pulau besar dan kabupaten/kota.
 - b. Tingkat penetrasi fixed broadband di perkotaan 71 persen rumah tangga dan 30 persen populasi, di perdesaan 49 persen rumah tangga dan 6 persen populasi.
- 5) Tersedianya layanan e-Government dan dikelolanya data sebagai aset strategis nasional melalui:
 - a. Indeks *e-Government* nasional mencapai 3,4 (skala 4,0).
 - b. Jumlah pegawai pemerintah yang paham TIK menjadi 100 persen.

Upaya terobosan dalam rangka mengatasi *bottlenecking* pembangunan infrastruktur konektivitas, diantaranya:

- 1) Menempatkan transportasi laut sebagai tulang punggung sistem logistik nasional melalui pengembangan pelabuhan-pelabuhan berkapasitas tinggi yang ditunjang dengan fasilitas pelabuhan yang memadai serta membangun *short sea shipping* pada jalur logistik nasional yang diintegrasikan dengan moda kereta api dan jalan raya, untuk mengurangi (*share*) beban angkutan jalan;
- 2) Mendorong skema pembiayaan jalan daerah melalui *cost sharing* yang melibatkan kontribusi APBN dan APBD pada jalan-jalan strategis di daerah dengan pola insentif, serta secara bertahap melakukan penyiapan regulasi untuk pendanaan jalan (*road fund*);
- 3) Pelaksanaan DAK Bidang Transportasi yang lebih terintegrasi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi, seperti pembangunan jalan provinsi, kabupaten/kota dan jalan non status yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan di daerah, berikut fasilitas keselamatan, serta sarana transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah;
- 4) Pembangunan “Jalan Tol Informasi” melalui penyediaan akses internet berkecepatan tinggi yang memungkinkan pertukaran informasi dan transaksi elektronik dalam jumlah besar secara cepat untuk mempercepat transformasi perekonomian dan meningkatkan daya saing.

Arah Kebijakan dan Strategi

1. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan

melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi (jalan, bandara, pelabuhan laut dan penyeberangan, kapal perintis, bus, dan kereta ekonomi) di wilayah perbatasan, perbatasan, dan pulau terluar.

2. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband termasuk di daerah perbatasan negara melalui:
 - a. Membangun hub/simpul sebagai opsi gateway internasional.
 - b. Mendorong pembangunan dan penggunaan bersama infrastruktur pasif seperti dark fiber, *duct*, tiang, menara, *right of way*, fasilitas pusat data (*data center*) dan pemulihan data (*data recovery center*).

4.2 Membangun Transportasi Massal Perkotaan

Sasaran

- 1) Meningkatnya pelayanan angkutan massal perkotaan,
 - a. *Modal share* (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di Kota Megapolitan/Metropolitan/Besar minimal 32 persen.
 - b. Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan/atau rel minimal 29 kota.
- 2) Meningkatnya kinerja lalu lintas jalan perkotaan yang diukur dengan kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar minimal 20 km/ jam.

Arah Kebijakan dan Strategi

- 1) Mengembangkan transportasi perkotaan dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan serta pemanfaatan *Intelligent Transport System* (ITS), melalui strategi:
 - a. Peningkatan Akses terhadap Angkutan Umum dengan Pembangunan Berorientasi Angkutan (*TOD*), *Park and Ride*, sistem informasi lalu lintas secara *real time*, Penerapan ATCS/ ITS, Pengembangan *Virtual Mobility* (*e-commerce*, *teleconference*, *teleworking*)
 - b. Penyediaan fasilitas pendukung untuk alih moda angkutan umum dengan moda transportasi lainnya.
 - c. Penguatan mekanisme implementasi sistem transportasi perkotaan dan penurunan kemacetan transportasi perkotaan melalui Manajemen Permintaan Transportasi dengan pendekatan *Push and Pull*.

- 2) Pengembangan angkutan umum massal yang modern dan maju dengan berorientasi berbasis kepada bus (BRT) maupun rel (LRT, tramway, MRT) dengan fasilitas alih moda terpadu, melalui strategi:
 - a. Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel (MRT di wilayah Jabodetabek, monorail dan Tram Surabaya, monorail Bandung, jalan layang *loopleft* KA Jabodetabek).
 - b. Pengembangan kereta perkotaan di 10 kota metropolitan: Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar.
 - c. Pengembangan BRT di 29 kota besar antara lain Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo, dan Ambon.
 - d. Penyediaan dana subsidi yang terarah untuk angkutan massal perkotaan.
- 3) Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota
 - a. Memperbesar rasio jalan kota minimum 10 persen dari luas wilayah sepanjang memungkinkan.
 - b. Pengembangan kapasitas dan kualitas jalan yang mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik.
 - c. Penataan kembali status Jalan Nasional di perkotaan.

4.3 Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar

Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar meliputi air minum, sanitasi, perumahan dan ketenagalistrikan. Salah satu fokusnya adalah Pembangunan Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi

Sasaran

- 1) Terfasilitasinya penyediaan hunian layak untuk 18,6 juta rumah tangga berpenghasilan rendah yakni pembangunan baru untuk 9 juta rumah tangga melalui bantuan stimulan perumahan swadaya untuk 5,5 juta rumah tangga dan pembangunan rusunawa untuk 514.976 rumah tangga, serta peningkatan kualitas hunian sebanyak 9,6 juta rumah tangga dalam pencapaian pengentasan kumuh 0 persen.
- 2) Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia melalui (1) pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 3.099 kawasan MBR, 2.144 Ibukota Kecamatan, 16.983 desa, 7.557 kawasan khusus, dan 28 regional; (2) Pembangunan Penampung Air Hujan (PAH) sebanyak 381.740 unit; (3) Fasilitasi optimasi bauran sumber daya air

domestik di 27 kota metropolitan dan kota besar; (4) Fasilitas 38 PDAM sehat di kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil; (5) Fasilitas *business to business* di 315 PDAM; (6) Fasilitas restrukturisasi utang 394 PDAM; (6) Peningkatan jumlah PDAM Sehat menjadi 253 PDAM, penurunan jumlah PDAM kurang sehat menjadi 80 PDAM, dan penurunan jumlah PDAM sakit menjadi 14 PDAM.

- 3) Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar yaitu (i) untuk sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat di 430 kota/kab (melayani 33,9 juta jiwa), penambahan pengolahan air limbah komunal di 227 kota/kab (melayani 2,99 juta jiwa), serta peningkatan pengelolaan lumpur tinja perkotaan melalui pembangunan IPLT di 409 kota/kab; (ii) untuk sarana prasarana pengelolaan persampahan dengan pembangunan TPA *sanitary landfill* di 341 kota/kab, penyediaan fasilitas 3R komunal di 334 kota/kab, fasilitas 3R terpusat di 112 kota/kab; (iii) untuk sarana prasarana drainase permukiman dalam pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman; serta (iv) kegiatan pembinaan, fasilitas, pengawasan dan kampanye serta advokasi di 507 kota/kab seluruh Indonesia.

Arah Kebijakan dan Strategi

- 1) Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai melalui strategi :
 - a. Peningkatan peran fasilitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional yang efektif dan efisien termasuk pengembangan subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, bantuan stimulan, memperluas program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta integrasi tabungan perumahan dalam sistem jaminan sosial nasional. Sementara peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, pembangunan kampung deret, serta bantuan stimulan dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman kumuh yang berbasis komunitas.

- b. Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan melalui: i) penguatan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar; ii) penguatan peran lembaga keuangan (*bank/non-bank*); serta iii) revitalisasi Perum Perumnas menjadi badan pelaksana pembangunan perumahan sekaligus pengelola Bank Tanah untuk perumahan.
 - c. Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun sewa dan rumah susun milik serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (*land consolidation*), bank tanah (*land banking*), serta pemanfaatan lahan milik BUMN, tanah terlantar, dan tanah wakaf.
 - d. Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (*incremental housing*).
 - e. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan. Sarana air minum dan sanitasi menjadi infrastruktur bingkai bagi terciptanya hunian yang layak.
- 2) Menjamin ketahanan sumber daya air domestik melalui optimalisasi bauran sumber daya air domestik melalui strategi:
- a. Jaga Air, yakni strategi untuk mengarusutamakan pem-bangunan air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan) serta mening-katkan kesadaran masyarakat akan *hygiene* dan sanitasi.
 - b. Simpan Air, yakni strategi untuk menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (*rain water harvesting*) sebagai sumber air baku air minum maupun *secondary uses* pada skala rumah tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi), serta pengelolaan drainase berwawasan lingkungan.
 - c. Hemat Air, yakni strategi untuk mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada melalui pengurangan kebocoran air hingga 20 persen, pemanfaatan *idle capacity*; dan pengelolaan

kebutuhan air di tingkat penyelenggara dan skala kota.

- d. Daur Ulang Air, yakni strategi untuk memanfaatkan air yang telah terpakai melalui pemakaian air tingkat kedua (*secondary water uses*) dan daur ulang air yang telah dipergunakan (*water reclaiming*).
- 3) Penyediaan infrastruktur produktif melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur yang sudah terbangun melalui strategi :
- a. Penerapan tarif atau iuran bagi seluruh sarana dan prasarana air minum dan sanitasi terbangun yang menuju prinsip tarif pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*)/memenuhi kebutuhan untuk Biaya Pokok Produksi (BPP). Pemberian subsidi dari pemerintah bagi penyelenggara air minum dan sanitasi juga dilakukan sebagai langkah jika terjadi kekurangan pendapatan dalam rangka pemenuhan *full cost recovery*.
 - b. Pengaturan kontrak berbasis kinerja baik perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset infrastruktur.
 - c. Rehabilitasi dan optimalisasi sarana dan prasarana air minum dan sanitasi yang ada saat ini dan peningkatan pemenuhan pelayanan sarana sanitasi komunal.
- 4) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat melalui strategi:
- a. Peningkatan kualitas Rencana Induk-Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) yang didasari dengan neraca keseimbangan air domestik kota/kabupaten dan telah mengintegrasikan pengelolaan sanitasi sebagai upaya pengamanan air minum;
 - b. Upaya peningkatan promosi *hygiene* dan sanitasi yang terintegrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi;
 - c. Implementasi Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) yang berkualitas melalui pengarusutamaan SSK dalam proses perencanaan dan penganggaran formal;
 - d. Peningkatan peran, kapasitas, serta kualitas kinerja Pemerintah Daerah di sektor air minum dan sanitasi.
 - e. Advokasi kepada para pemangku kepentingan di sektor air minum dan sanitasi, baik eksekutif maupun legislatif serta media.
- 5) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi melalui sinergi dan koordinasi antar pelaku program dan kegiatan mulai tahap perencanaan sampai implementasi baik secara vertikal maupun horizontal melalui strategi:

- a. Pelaksanaan sanitasi sekolah dan pesantren, sinergi pengembangan air minum dan sanitasi dengan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta integrasi pembangunan perumahan dan penyediaan kawasan permukiman dengan pembangunan air minum dan sanitasi.
- b. Pelaksanaan pelayanan dasar berbasis regional dalam rangka mengatasi kendala ketersediaan sumber air baku air minum dan lahan serta dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah yang mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi.

4.4 Peningkatan Efektivitas, dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur

Sehubungan dengan keterbatasan anggaran pemerintah serta meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur maka pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting untuk dapat didorong melalui alternatif pembiayaan lainnya, salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Secara umum, sasaran yang ingin dicapai pada RPJMN periode ke-3 tahun 2015-2019 adalah menjadikan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) sebagai *development approach* dalam pembangunan infrastruktur sektoral maupun lintas sektor serta meningkatnya peran serta badan usaha dan masyarakat dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur.

Sasaran

- 1) Implementasi KPS sebagai salah satu pendekatan pembangunan (*development approach*) infrastruktur. Adapun indikator pencapaiannya adalah:
 - a. Terharmonisasikannya peraturan perundangan terkait KPS.
 - b. Adanya peraturan terkait skema KPS dan *creative financing* lainnya dalam mendukung percepatan penyediaan infrastruktur.
 - c. Telah dilakukannya *debottlenecking* kebijakan yang ada serta dilakukan secara berkala.
 - d. Tersedianya PPP *Planning Tool* diantaranya *Value For Money* (VFM) atau *Public Sector Comparator* (PSC) dan *Social Discount* untuk membantu integrasi proses perencanaan dan penganggaran proyek-proyek infrastruktur melalui skema KPS.
- 2) Tersedianya dukungan pembiayaan dalam pemenuhan target infrastruktur melalui penyediaan alternatif pembiayaan di luar pendanaan pemerintah baik melalui skema KPS maupun *creative financing* lainnya. Adapun indikator pencapaiannya adalah:

- a. Tersedianya dana penyiapan dan transaksi proyek diseluruh PJPk.
 - b. Tersedianya dana dukungan pemerintah yang cukup melalui mekanisme VGF oleh Kementerian Keuangan dan dana dukungan dimasing-masing Kementerian/Lembaga penyedia infrastruktur.
- 3) Terciptanya efisiensi pengelolaan infrastruktur serta meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur baik yang disediakan oleh pemerintah maupun melalui badan usaha. Adapun indikator pencapaiannya adalah:
- a. Tersedianya mekanisme insentif dan disinsentif bagi PJPk dalam melakukan skema KPS maupun *creative financing* lainnya.
 - b. Tercantumnya target investasi dan proyek strategis yang akan dibiayai melalui skema KPS maupun *creative financing* lainnya dalam renstra K/L berikut dukungan dana penyiapan dan transaksinya.
- 4) Percepatan proses pengambilan keputusan serta peningkatan kapasitas SDM. Adapun indikator pencapaiannya adalah:
- a. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) beroperasi optimal dalam membantu percepatan pembangunan infrastruktur prioritas.
 - b. Terbentuknya Pusat KPS yang berfungsi sebagai *gate keeper* perencanaan dan pelaksanaan proyek KPS.
 - c. Terbentuknya Simpul KPS di seluruh K/L infrastruktur dan 50 persen di kota-kota besar.
 - d. Terlaksananya diklat dan pelatihan baik di dalam dan luar negeri kepada aparatur negara dalam melaksanakan skema KPS dan *creative financing* lainnya.

Arah Kebijakan dan Strategi

Dalam rangka merealisasikan kebijakan penggunaan skema KPS sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur, maka diperlukan strategi kebijakan serta harmonisasi regulasi terkait pembiayaan infrastruktur yang dilakukan dengan melakukan (i) Integrasi kebijakan KPS dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (ii) Integrasi kebijakan KPS dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (iii) Penerbitan peraturan perundang-undangan tentang Infrastruktur sebagai jembatan dengan peraturan perundang-undangan sektoral, dan (iv) harmonisasi peraturan perundangan terkait infrastruktur dalam rangka *mainstreaming* KPS dan *creative financing* lainnya.

Peningkatan kapasitas SDM aparatur negara terkait KPS dan *creative financing* lainnya pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPk) melalui strategi seperti berikut: (i)

Peningkatan pemahaman dan kapasitas SDM aparatur negara pada kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, (ii) Peningkatan pemahaman dan kapasitas SDM aparatur negara pada lembaga pendukung seperti anggota legislatif, Auditor (BPK, BPKP, Inspektorat K/L maupun daerah), Kejaksaan, Kepolisian, serta Kementerian dan lembaga lainnya baik pusat maupun daerah, dan (iii) Peningkatan kapasitas SDM sektor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan KPS seperti kemampuan konsultan lokal pelaksana proyek infrastruktur.

Untuk memperkuat proses pengambilan keputusan pada pelaksanaan proyek infrastruktur maka dilakukan dengan beberapa strategi sebagai berikut: (i) Operasionalisasi KPPIP sebagai *clearinghouse* KPS dan berfungsi sebagai *champion at the top*, (ii) Pembentukan Pusat KPS yang berfungsi sebagai *gate keeper* perencanaan dan pelaksanaan proyek KPS, (iii) Pembentukan dan penguatan simpul-simpul KPS pada kementerian sektor dan pemerintah daerah yang belum mempunyai simpul KPS, dan (iv) Penguatan peran lembaga pertanahan agar mampu menyelesaikan permasalahan pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur.

Selain itu, untuk mendukung peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan dan pengelolaan infrastruktur maka diperlukan strategi sebagai berikut: (i) memberlakukan mekanisme *risk sharing*, insentif dan disinsentif serta *debottlenecking* kebijakan yang ada, (ii) Regionalisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, (iii) memanfaatkan potensi *creative financing* secara optimal, (iv) melakukan *social engineering* pada masyarakat pengguna layanan infrastruktur dengan mengkampanyekan prinsip pakai bayar, serta (v) mengutamakan pemanfaatan skema KPS dan *creative financing* lainnya dalam membangun infrastruktur di wilayah perkotaan dan maju.

4.5 Penguatan Investasi

Sasaran

Sasaran pembangunan untuk Penguatan Investasi dalam lima tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunnya waktu pemrosesan perijinan investasi nasional di pusat dan di daerah menjadi maksimal 15 hari per jenis perizinan pada tahun 2019
- 2) Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (*starting a business*) menjadi 7 hari dan menjadi 5 prosedur pada tahun 2019, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada Ease of Doing Business (EoDB).
- 3) Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 11,5 persen pada tahun 2019.

- 4) Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp 933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9 persen.

Tabel 3.2
Pertumbuhan Investasi dan Rasio PMDN

	2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0
Rasio PMDN (%) terhadap total realisasi investasi	33,8	35,0	36,3	37,6	38,9

Asumsi Nilai Tukar : Rp. 12.000,-/USD

Arah Kebijakan dan Strategi

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu *pertama* adalah Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan *kedua* adalah Peningkatan Investasi yang inklusif terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Arah kebijakan yang ditempuh dalam *pilar pertama* penguatan investasi adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan. Adapun strategi yang ditempuh adalah:

- 1) Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha, yang terutama dilakukan melalui:
 - 1) Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu upayanya adalah dengan penyusunan Peta Jalan Harmonisasi Regulasi terkait Investasi.
 - 2) Penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha,
 - 3) Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perijinan, baik di pusat maupun di daerah,
 - 4) Penyediaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perijinan lokasi usaha dan investasi.

- 2) Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan jasa, antara lain: sektor migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam.
- 3) Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha, melalui:
 - 1) Optimalisasi penyelenggaraan PTSP di daerah, antara lain dengan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/ instansi yg memiliki kewenangan,
 - 2) Pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Nasional (PTSP-N), untuk menyatukan perijinan tingkat pusat pada satu tempat layanan perijinan. Adapun langkah yang akan dilakukan, antara lain adalah:
 - (i) Pengembangan kelembagaan PTSP-N
 - (ii) Penyederhanaan dan standarisasi prosedur, pengembangan proses perijinan secara paralel untuk menghemat waktu, serta pengembangan layanan pengaduan permasalahan perijinan
 - (iii) Penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perijinan, sehingga dapat meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan.
 - (iv) Pengembangan *tracking system* perijinan di PTSP-N
- 4) Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan, yang dapat:
 - 1) Mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur dengan mengedepankan keseimbangan sebaran investasi antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa
 - 2) Mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional
 - 3) Mendorong pengembangan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana
 - 4) Mendorong investor terutama investor dalam negeri untuk mengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri
 - 5) Mendorong investasi sektor minyak dan gas yang mempertimbangkan aspek kesulitan geologi dan meningkatkan produktivitas sumur-sumur tua, daerah baru, dan laut dalam.
- 5) Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.

- 6) Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif,
(dimana rincian strateginya dituangkan dalam bagian Ketenagakerjaan).
- 7) Peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan, melalui:
 - a. Reposisi dan penguatan kelembagaan KPPU,
 - b. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktek anti persaingan usaha yang sehat (seperti: monopoli dan kartel) yang mendistorsi pasar
 - c. Pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistik,
 - d. Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat,
 - e. Pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro.

Arah kebijakan yang ditempuh dalam **pilar kedua** penguatan investasi adalah mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal yang akan dilaksanakan melalui strategi:

- 1) Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor:
 - a. Yang mengolah sumber daya alam mentah menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi, terutama sektor pengolah hasil pertanian, produk turunan migas, dan hasil pertambangan;
 - b. Yang mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapat menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. Yang mendorong penyediaan barang konsumsi untuk kebutuhan pasar dalam negeri;
 - d. Yang berorientasi ekspor, terutama produk olahan nonmigas berbasis sumber daya alam;
 - e. Yang mendorong pengembangan partisipasi Indonesia dalam jaringan produksi global (*Global Production Network*), baik sebagai perusahaan *subsidiary*, *contract manufacturer*, maupun *independent supplier*;
 - f. Yang mendorong penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industri dalam negeri, baik berupa bahan setengah jadi, komponen, maupun sub komponen.
- 2) Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih beragam:

- a. Pengembangan potensi investasi daerah (*regional champions*) sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi;
 - b. Promosi investasi di daerah, untuk mendorong *investor awareness and willingness* untuk berinvestasi di daerah, yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah;
 - c. Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah, terutama untuk UKM
 - d. Pengembangan mekanisme konsultasi Pemerintah dan Pelaku Bisnis (terutama: UKM)
- 3) Peningkatan kemitraan antara PMA dan UKM lokal, terutama melalui:
- a. Pembinaan kemitraan antara PMA dengan UKM dengan mengedepankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
 - b. Perkuatan rangkaian proses kemitraan yang dimulai dengan pengenalan calon mitra usaha, pemahaman posisi keunggulan dan kelemahan usaha, pengembangan strategi kemitraan, fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha, serta monitoring dan evaluasi kemitraan PMA dan UKM.
- 4) Peningkatan efektivitas strategi dan Upaya promosi investasi melalui:
- a. Pengembangan mekanisme promosi investasi yang lebih efektif yang antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi *Tourism, Trade and Investment* (TTI), pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu, serta optimalisasi peran kantor perwakilan investasi di luar negeri (*IIPC: Indonesian Investment Promotion Center*);
 - b. Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif yang dapat :
 - (i) Mendukung pengembangan sektor industri dalam negeri dalam jangka pendek, menengah dan panjang
 - (ii) Mendorong persebaran investasi di luar Pulau Jawa dengan mempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daerah
 - c. Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah.
- 5) Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan dunia usaha. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu alternatif pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas.
- 6) Pengembangan investasi lokal, terutama melalui investasi antar wilayah yang dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah.

- 7) Pengembangan investasi keluar (*outward investment*), diutamakan pada ketahanan energi (*energy security*) dan ketahanan pangan (*food security*) dengan mengutamakan kegiatan investasi yang dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap perekonomian nasional.
- 8) Pengurangan dampak negatif dominasi PMA terhadap perekonomian nasional, yang secara bertahap akan dilakukan melalui tiga jalur proses pengalihan, yaitu: (i) alih kepemilikan ke masyarakat domestik melalui pasar modal; (ii) alih teknologi/keahlian kepada pengusaha dan pekerja domestik; serta (iii) alih proses produksi dengan secara bertahap meningkatkan porsi pemasok domestik bagi kebutuhan bahan baku, barang setengah jadi, serta jasa-jasa industri.

Strategi dan kebijakan bidang investasi ini akan didukung oleh pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah agar dapat berdaya saing terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

4.6 Pengembangan Kapasitas Perdagangan Nasional

Sasaran

Perdagangan Dalam Negeri

Sasaran perdagangan dalam negeri dalam rangka meningkatkan aktivitas perdagangan domestik pada tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Menurunkan rasio biaya logistik terhadap PDB sebesar 5,0 persen per tahun sehingga menjadi 19,2 persen di tahun 2019.
- 2) Menurunkan rata-rata *dwelling time* menjadisebesar 3-4 hari.

Rincian sasaran bidang perdagangan dalam negeri diperlihatkan pada Tabel berikut.

Tabel 3.3
Sasaran Perdagangan Dalam Negeri dan Efisiensi Sistem Logistik Nasional

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata rasio biaya logistik terhadap PDB (%)	23,6	22,4	21,3	20,2	19,2
2	Rata-rata <i>dwelling time</i> (hari)	5 – 6	4 – 5	4 – 5	3 – 4	3 – 4
3	Pertumbuhan PDB riil subsektor perdagangan besar dan eceran (%)	6,7	7,7	8,0	8,3	8,5
4	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antarwaktu (%)	< 9,0	< 9,0	<9,0	< 9,0	< 9,0

Perdagangan Luar Negeri

Sasaran perdagangan luar negeri dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa pada tahun 2015-2019 adalah:

- 1) Pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata sebesar 10,5 persen per tahun,
- 2) Rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun.
- 3) Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar 65 persen.

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Peningkatan Ekspor

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertumbuhan Ekspor Produk Non-Migas	7,0%	9,0%	10,5%	12,0%	14,0
2	Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB	2,7%	2,8%	2,9%	3,2%	3,5%
3	Kontribusi produk Manufaktur terhadap Total Ekspor	44,0%	47,0%	51,0%	57,0%	65,0
4	Kontribusi produk Primer terhadap Total Ekspor	56,0%	53,0%	49,0%	43,0%	35,0

Arah Kebijakan dan Strategi

Pengembangan kapasitas perdagangan nasional dilakukan melalui dua pilar arah kebijakan, yaitu: (1) pengembangan perdagangan dalam negeri dan (2) pengembangan perdagangan luar negeri. Kedua kebijakan ini dilakukan secara sinergis dan inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkeadilan.

1) Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

Arah kebijakan untuk mencapai sasaran bidang perdagangan dalam negeri adalah meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri melalui pembenahan system distribusi bahan pokok dan system logistik rantai suplai agar lebih efisien dan lebih andal dan pemberian insentif perdagangan domestik sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta peningkatan daya saing produk local melalui standardisasi produk. Adapun strategi pembangunan untuk pengembangan perdagangan dalam negeri adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis, terutama untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok;
- b) Mengembangkan sistem logistik dan distribusi termasuk sistem informasinya, melalui integrasi layanan secara elektronik dari proses pre-clearance sampai dengan *post clearance*, optimalisasi sistem perijinan ekspor dan impor secara elektronik yang terintegrasi antarsektor, serta pengembangan sistem informasi logistik lainnya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi biaya;
- c) Meningkatkan ketersediaan sarana distribusi perdagangan dan meningkatkan kelayakan sarana distribusi perdagangan terutama yang telah berumur di atas 25 tahun untuk memperlancar arus distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis, terutama di daerah yang masih minim sarana perdagangannya;
- d) Mengembangkan rantai suplai dingin (*cold supply chain*) terutama untuk mendukung distribusi barang yang mudah rusak (*perishable goods*) di pasar domestik;
- e) Meningkatkan ketersediaan dan kapasitas SDM dan pelaku jasa Logistik, agar dapat bersaing baik di pasar lokal dan internasional;
- f) Meningkatkan efisiensi logistik pelabuhan, terutama pengurangan waktu tunggu di pelabuhan dan penghapusan biaya kepelabuhanan yang tidak perlu;
- g) Mendorong pengembangan kawasan logistik terpadu, terutama di bandara dan pelabuhan yang menjadi hub internasional dan di kawasan *dry-port*.

2) Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

Arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran bidang perdagangan luar negeri adalah meningkatkan daya saing produk ekspor non-migas dan jasa melalui peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dan

peningkatan kualitas agar lebih kompetitif di pasar internasional, serta optimalisasi upaya pengamanan perdagangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun strategi pembangunan untuk mendorong pengembangan perdagangan luar negeri adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan ekspor barang bernilai tambah lebih tinggi dan berdayasaing di pasar global, agar dapat memberikan efek pengganda yang lebih besar terhadap perekonomian nasional dan mengurangi tingkat kerentanan ekspor Indonesia terhadap gejolak harga komoditas dunia. Untuk itu, pengembangan ekspor bernilai tambah tinggi akan dititikberatkan pada: produk manufaktur yang berbasis sumber daya alam, produk olahan hasil tambang, serta produk olahan hasil pertanian/perikanan.
- b) Memanfaatkan Rantai Nilai Global dan Jaringan Produksi Global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur yang dapat mendorong proses alih teknologi, meningkatkan kemitraan dengan pelaku usaha lokal serta meningkatkan daya saing produk nasional;
- c) Mengembangkan fasilitasi perdagangan yang lebih efektif, terutama guna mempercepat proses perizinan dan memperlancar aktivitas ekspor dan impor melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan skema pembiayaan ekspor, skema harmonisasi regulasi terkait ekspor dan impor;

5 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sector strategis ekonomi domestic, yang tertuang dalam focus prioritas ketujuh;

Ketahanan Air

Ketahanan air dicerminkan pada kondisi terpenuhinya air yang layak dan yang berkelanjutan untuk seluruh kebutuhan hidup dan kemampuan mengurangi risiko kekurangan dan akibat kelebihan air pada masa-masa tertentu. Oleh karena itu, dimensi ketahanan air tersebut mencakup 5 (lima) dimensi: yaitu memelihara dan memulihkan sumber air dan ekosistem, terutama di tingkat hulu (*catchment area*); 2) keterpenuhan air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, 3) keterpenuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, 4) ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk akibat dampak dari perubahan iklim, dan didukung 5) kelembagaan dan tatalaksana yang mantap. Ketahanan air nasional diarahkan pada terwujudnya penyediaan air dan perlindungan ekosistem pendukungnya bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata baik untuk pemenuhan

kebutuhan sehari-hari (kebutuhan domestik) maupun untuk mendukung pembangunan nasional yaitu pertanian, produksi, energi, industri dan lain-lain.

Sasaran

Berdasarkan kondisi di atas, sasaran utama pembangunan ketahanan air adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelesaikan status DAS Lintas Negara
- 2) Mengurangi luasan lahan kritis, melalui rehabilitasi di dalam KPH seluas 5,5 juta hektar.
- 3) Pemulihan kesehatan 4 DAS prioritas nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas dan DAS Siak), dan 30 26 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019
- 4) Meningkatkan perlindungan mata air di 4 DAS prioritas nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas dan DAS Siak) dan 30 26 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019 melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan, gully plug, di daerah hulu DAS, serta sumur resapan.
- 5) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), pengembangan ekowisata skala kecil, serta hasil hutan bukan kayu.
- 6) Internalisasi 108 RPDAST yang sudah disusun ke dalam RTRW.
- 7) Pembangunan embung dan dam pengendali skala kecil dan menengah di daerah hulu 30 DAS Prioritas.
- 8) Membangun tampungan air sejumlah 3 miliar meter kubik serta optimalisasi penampung air terbangun dalam rangka meningkatkan kapasitas tampung air per kapita serta penyediaan energi terbarukan dan pengendalian daya rusak, dengan indikator terbangunnya 30 buah waduk (daya tampung 3 milyar m³).
- 9) Mempercepat pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber energi listrik (PLTA).
- 10) Mengurangi area rawan genangan melalui solusi struktural pengendalian banjir, sedimen/lahar gunung berapi dan pengamanan pantai serta solusi non struktural manajemen banjir antara lain kesiapsiagaan banjir serta penataan kawasan. Indikator sasaran tersebut adalah terbangunnya *flood management* di 33 Balai Wilayah Sungai beserta penerapan perangkat manajemen pengendalian banjirnya.
- 11) Pembangunan prasarana air baku dalam rangka mendukung pencapaian pelayanan air bersih dari kapasitas sebelumnya sebesar 51,44 m³/det menjadi 118,6 m³/det, dengan indikator terbangunnya prasarana air baku

sebesar 67,16 m³/det.

- 12) Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai, dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.

Arah Kebijakan dan Strategi

Untuk mewujudkan sasaran diatas, arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air adalah:

- 1) **Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat melalui strategi:**
 - a. Pembangunan saluran pembawa air baku dengan prioritas pemenuhan air untuk kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah defisit air, wilayah tertinggal, wilayah strategis, pulau-pulau kecil dan terdepan, kawasan terpencil serta daerah perbatasan;
 - b. Penyediaan sumber air keperluan rumah tangga yang tidak tersambung SPAM konvensional termasuk *conjunctive use* antara air permukaan dan air tanah sesuai ketersediaan sumber air lokal;
 - c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi pengolahan air yang murah dan ramah lingkungan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya air berbasis lingkungan berkelanjutan (*Eco-Sustainable Water Infrastructure/ ESWIN*);
 - d. Mempermudah dan memberikan insentif jaringan distribusi dan sambungan air skala rumah tangga yang belum layak secara finansial;
 - e. Mengembangkan sistem penyediaan air baku yang bersifat regional yang juga didukung dengan memanfaatkan inter basin transfer;
 - f. Pengendalian pencemaran air ke sumber-sumber air, dan mendorong penerapan insentif kebijakan tarif air terkait pengelolaan limbah cair rumah tangga;
 - g. Menerapkan prinsip-prinsip efisiensi pemanfaatan air melalui prinsip *reduce, reuse, dan recycle*, termasuk menerapkan insentif penghematan air misalnya melalui produksi dan penggunaan peralatan rumah tangga hemat air;
 - h. Mendorong peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas air dan operasi pemeliharaan jaringan distribusi air serta mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan prasarana air baku.

2) Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, melalui strategi:

- a. Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan pangan nasional;
- b. Peningkatan penyediaan air baku bagi industri dan perkotaan, serta penerapan insentif pengendalian kualitas air;
- c. Pengembangan penggunaan air dari *"rain water harvesting"* untuk keperluan refinery industri; serta penggunaan non konsumsi lainnya seperti perkantoran dan lain-lain;
- d. Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan yang diiringi dengan percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif;
- e. Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip *reduce, reuse, dan recycle*;
- f. Percepatan pemanfaatan SDA untuk pembangunan PLTA, melalui Pembangunan waduk serba guna, Sinkronisasi Pola dan RUPTL, serta penataan perizinan SIPPA dan tarif BJPSDA.

3) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya, dengan strategi:

- a. Pengelolaan kawasan hulu DAS secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan kapasitas sumber daya air, melalui:
 - (i) Pengelolaan DAS terpadu, melalui: (i) Penyelesaian status DAS Lintas Negara; (ii) Implementasi pemulihan 4 (empat) DAS prioritas nasional dan 26 DAS prioritas lainnya; (iii) Perlindungan mata air di 4 DAS prioritas nasional dan 26 DAS prioritas lainnya;
 - (ii) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS;
 - (iii) Rehabilitasi hutan di dalam KPH dengan mempertimbangkan jenis tanah dan jenis tanamannya;
 - (iv) Peningkatan kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah (kabupaten/kota) dengan berbasis DAS melalui perbaikan koordinasi dan pemahaman para pihak;
 - (v) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mendorong keseimbangan pendekatan non struktural dan struktural melalui penerapan paradigma *eco-sustainable water infrastructure* (ESWIN) dan *more room for river*;

- (vi) Penataan aktivitas masyarakat, pertanian, industri berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah dalam rangka menjamin ketersediaan dan kualitas air.

b. Konservasi sumber daya air, melalui:

- (i) Percepatan pembangunan dan pengelolaan sumber/tampungan air seperti waduk serbaguna, embung, situ dengan penekanan :
 - (a) Mempercepat persiapan dan pelaksanaan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, dan situ) pada daerah-daerah krisis dan wilayah-wilayah strategis;
 - (b) Menyelesaian hambatan perizinan, pembiayaan, penyediaan lahan termasuk lahan hutan, dan penanggulangan masalah sosial penduduk;
 - (c) Memperkuat Unit Pengelolaan Bendungan dengan melengkapi peralatan, sistem, dan sumber daya manusia;
 - (d) Rehabilitasi waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsi dan kapasitas tampung.
- (ii) Peningkatan dan pelestarian sumber-sumber air, antara lain melalui penetapan status sumber air serta fasilitasi penyusunan rencana aksi terintegrasi dan terkonsolidasi berdasarkan dokumen perencanaan pemangku kepentingan (RP-DAS, Pola Rencana, RKPD);
- (iii) Perbaikan Sistem Monitoring Hidrologis dan Kualitas Air di 15 Danau prioritas/Situ-Situ kritis, dan danau cemar sedang;
- (iv) Melanjutkan revitalisasi 15 Danau Prioritas melalui pemberdayaan masyarakat di *catchment area* dan sekitar danau, serta penataan Garis Sempadan Danau;
- (v) Mitigasi pencemaran sungai melalui upaya struktural dan non struktural seperti percepatan pembangunan sanitasi dan pengolahan limbah di wilayah bantaran Sungai;
- (vi) Pembangunan struktur pengendali sedimen secara selektif dan sistemik;
- (vii) Pengelolaan/restorasi sungai terpadu antara lain di WS Citarum

dan WS Ciliwung Cisadane;

- (viii) Pengembangan metode pengelolaan rawa berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi yang dituangkan dalam RTRW, dimana pemanfaatan lahan rawa dilakukan secara adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan.

4) Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui strategi:

- a. Pengembangan kesiapsediaan masyarakat terhadap bencana melalui perkuatan *Flood Proofing* sebagai kapasitas adaptasi bencana banjir dan kapasitas mitigasi institusi serta masyarakat, serta peningkatan kemampuan prediksi terhadap peningkatan aliran sungai dan dampak yang ditimbulkannya;
- b. Percepatan penyusunan *Flood Risk Map* sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai;
- c. Penerapan *adaptive water management* mulai dari peningkatan upaya monitoring serta permodelan klimatologis, hidrologis dan kualitas air termasuk peningkatan keterlibatan masyarakat hingga penegakan hukumnya;
- d. Penerapan pendekatan *Flood Management* (pencegahan, penanggulangan dan pengelolaan) mencakup *Flood Forecasting Warning System*; termasuk di dalamnya juga integrasi sistem drainase makro dan mikro daerah perkotaan, penerapan kebijakan “pembangunan area parkir air” (*retention/retarding basin*) serta penataan lahan yang mencakup garis sempadan sungai;
- e. Prioritas penanganan daya rusak air pada wilayah yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi tinggi (JABODETABEK dan kawasan metropolitan);
- f. Konservasi air tanah melalui pengelolaan sumber daya air tanah yang berkelanjutan;
- g. Pengelolaan wilayah pantai secara berkelanjutan dengan mengkombinasikan secara seimbang antara pendekatan non-struktural dan struktural, melalui:
 - (i) Pembangunan pengaman pantai khususnya pada pantai yang

terdampak langsung oleh kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, termasuk pulau-pulau terdepan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI;

- (ii) Optimalisasi fungsi pengaman pantai yang telah ada;
- (iii) Penyusunan zonasi area terbangun dan area publik pantai untuk diintegrasikan ke RDTR;
- (iv) Pengembangan dan restorasi pantai untuk keperluan preservasi ekosistem dan pariwisata;
- (v) Perbaikan sistem monitoring dan pemeliharaan daerah pantai;
- (vi) Perbaikan kualitas air di muara sungai dan perairan pantai;
- (viii) Pembangunan dan perlindungan tata air tambak secara berkelanjutan.

5) Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi, melalui strategi:

- a. Melengkapi peraturan perundangan turunan UU No. 7 Tahun 2004 serta penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai pedoman teknis pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya air.
- b. Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan:
 - (i) Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten;
 - (ii) Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk;
 - (iii) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air, termasuk kelembagaan operasi dan pemeliharaan.
- c. Meningkatkan kordinasi dan kolaborasi antarpemerintah dan antarsektor dalam hal pengelolaan daerah hulu dan hilir, aspek konservasi dan aspek fisik; serta pengelolaaan banjir dan pengendalian pencemaran air.
- d. Menumbuhkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap upaya pengelolaan sumber daya air melalui proses

pendampingan, penyuluhan dan pembinaan, serta sistem kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya air.

- e. Mendorong terbentuknya jaringan informasi sumber daya air antarpemangku kepentingan untuk mewujudkan jaringan basis data, standarisasi, kodefikasi, klasifikasi, proses dan metode/prosedur baik pengumpulan dan pembaharuan maupun sinkronisasi data dan informasi yang handal.
- f. Meningkatkan kapasitas operasional dan pemeliharaan melalui pemenuhan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) untuk setiap infrastruktur sumber daya air.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BP-Batam

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional 2015-2019 yang tertuang dalam strategi dan arah kebijakan nasional bagi pencapaian sasaran dan prioritas nasional, melalui visi pembangunan nasional dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka BP Batam telah menetapkan visi dan misinya dalam mendukung visi nasional tersebut yang diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi dan menunjang iklim usaha yang sehat serta penerapan reformasi birokrasi yang utuh. Oleh karena itu BP Batam telah menyusun agenda pembangunan yang diharapkan dapat menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan baik bagi pihak *stakeholders* maupun melakukan pembenahan kedalam (internal) dengan berpedoman pula pada *roadmap* pengembangan kawasan Batam Bintan Karimun tahun 2010-2020. Adapun arah kebijakan dan strategi BP-Batam yang tertuang dalam agenda pembangunan BP-Batam yang sejalan dengan misi yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut:

1. Memantapkan pengelolaan kawasan investasi yang professional;
2. Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan Agenda Pembangunan tersebut, disusun fokus agenda pembangunan yang terdiri dari target, sasaran, dan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Memantapkan Pengelolaan Kawasan Investasi yang Profesional

Agenda pembangunan ini berkaitan dengan tujuan BP Batam dalam rangka meningkatkan peran kelembagaan yang sejalan dengan Nawacita kedua (2) (Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya). Fokus agenda pembangunan ini adalah:

- a. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dengan target yang ingin dicapai yaitu meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara efektif dan modern.

Sasaran :

Berdasarkan semangat membangun transparansi dan akuntabilitas, seperti yang tercantum diatas, maka BP Batam dalam rencana kerja lima tahun kedepan mewujudkan seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan maupun pelaporan kinerja menerapkan system yang dapat diakses oleh public. Hal ini diwujudkan dengan rencana kegiatan baik rutin maupun kegiatan baru di BP Batam melalui system online yang bermitra dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa (LKPP), pemantapan implementasi system akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) di BP Batam dengan mitra dari Bappenas dan Kementerian Keuangan serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja dilingkungan BP Batam, diantaranya:

- 1) Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan internal, melalui strategi penyempurnaan system dan manajemen serta pelaporan dalam pengelolaan KPBPB seperti pemantapan implementasi SAKIP, LAKIP, E-Monev dan sebagainya;
- 2) Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka control dalam penyelenggaraan tata kelola yang ada di BP Batam melalui penyediaan ruang partisipasi public dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan tata kelola pengelolaan KPBPB di Batam, dengan strategi perluasan kapasitas dalam ruang partisipasi public;
- 3) Penerapan system informasi dan teknologi yang terintegrasi guna mendukung bisnis proses yang efektif, efisien dan transparan, melalui strategi penguatan kebijakan dalam IT yang mendukung e-government.

- b. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dengan target yang ingin dicapai yaitu meningkatnya kualitas tatakelola KPBPB Batam dalam mendukung peningkatan dan daya saing serta kinerja yang professional.

Sasaran:

Demi terwujudnya penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan KPBPB Batam maka akan dilakukan system penguatan manajemen kinerja pada sumber daya yang ada di BP Batam, dengan langkah awal melakukan review mengenai kualitas dan kuantitas SDM BP Batam dan terwujudnya Grand Design SDM sehingga diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan bagi public yang didukung oleh pemantapan standar pelayanan minimal yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk mewujudkan peningkatan kualitas RBN dilingkungan BP Batam, diantaranya:

- 1) Penyempurnaan kelembagaan KPBPB Batam, mencakup penataan tugas, fungsi dan kewenangan serta harmonisasi antar lembaga, institusi maupun instansi, dengan strategi penyempurnaan desain struktur pengelolaan KPBPB Batam yang lebih efisien;
 - 2) Penyempurnaan regulasi dan kebijakan pelayanan public KPBPB Batam, melalui strategi penguatan kebijakan pengelolaan KPBPB Batam yang mendukung pelayanan public dan reformasi birokrasi;
 - 3) Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif serta berbasis reward dan punishment, dengan strategi penerimaan dan penilaian serta penempatan pegawai yang transparan, kompetitif dan berbasis kompetensi.
- c. Meningkatkan partisipasi public dalam proses pengambilan kebijakan public dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan public dan pengelolaan badan public yang baik.; dengan target yang ingin dicapai adalah meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan kebijakan public dan pengelolaan KPBPB yang profesional.

Sasaran:

Dalam rangka meningkatkan partisipasi public bagi proses pengambilan kebijakan public demi meningkatkan pengambilan keputusan

kebijakan dan pengelolaan KPBPB Batam yang professional, maka BP Batam akan melakukan penyempurnaan penyediaan ruang public dengan melakukan peningkatan kapasitas maupun kualitas publikasi serta sosialisasi terhadap rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan BP Batam termasuk proses program kebijakan.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk meningkatkan partisipasi public dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pengambilan kebijakan dilingkungan BP Batam, diantaranya:

- 1) Melaksanakan keterbukaan informasi public sesuai dengan UU No.14 tahun 2008, melalui strategi pengelolaan dan pelayanan informasi secara berkualitas oleh pengelola KPBPB Batam;
- 2) Mendorong public untuk memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan KPBPB Batam, melalui strategi pemanfaatan media social dan layanan website BP Batam untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi antara pengelola KPBPB Batam dengan pemerintah maupun masyarakat;

2. Mewujudkan kawasan investasi yang memiliki infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);

Agenda Pembangunan ini sejalan dengan misi BP Batam dalam mendukung Nawacita ke-tiga (Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan) dan Nawacita ke-enam (Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional). Fokus agenda pembangunan ini adalah:

- I. Fokus dalam mendukung Nawacita dalam Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
 - a. Pengurangan ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat; dengan target meningkatnya investasi padat kerja untuk memperluas kesempatan pekerjaan serta meningkatnya akses usaha mikro dan kecil untuk mengembangkan keterampilan, pendampingan, modal usaha dan pengembangan teknologi.

Sasaran:

Dalam rangka mengurangi ketimpangan antar kelompok ekonomi masyarakat serta meningkatkan akses usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan keterampilan dan kesempatan usaha, maka BP Batam akan mewujudkan usaha dalam mendukung penciptaan rantai penawaran (*supply chain*) dalam mendukung industri yang berorientasi ekspor. Hal ini sejalan dengan rencana sasaran pokok BP Batam dalam meningkatkan nilai real investasi pada 8 (delapan) focus industry yaitu bidang ICT (*Information, Communication and Telecommunication*), *Green Industry*, *Logistic-Transshipment*, Electronic, Galangan Kapal, Minyak dan Gas, Pariwisata serta *Share Service Outsourcing*.

Arah Kebijakan dan Strategi :

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh BP Batam untuk mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat dan memperluas kesempatan kerja, diantaranya:

- 1) Meningkatkan pelayanan dasar bagi investor melalui strategi sinkronisasi dan atau harmonisasi kerangka regulasi serta kebijakan pemerintah terutama dalam aturan perdagangan kegiatan yang berhubungan dengan ekspor dan impor;
 - 2) Membuka kesempatan kerja pada sector industri dengan strategi meningkatkan iklim investasi yang bersifat padat pekerja;
 - 3) Mengembangkan pemberdayaan usaha melalui strategi pemberdayaan dan perluasan akses permodalan baik dalam maupun luar negeri.
- II. Fokus dalam mendukung Nawacita dalam Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
- a. Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan; dengan target meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana dan keterpaduan system transportasi.

Sasaran:

Upaya dalam rangka meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana serta keterpaduan system transportasi di kawasan PBPB Batam, maka BP Batam merencanakan :

- 1) Mendukung peningkatan kemantapan jalan strategi nasional menjadi 100%, melalui rencana pembangunan jalan baru sepanjang sekitar 200 km (pengembangan wilayah pengelolaan di Pulau Rempang dan

Galang);

- 2) Menurunkan waktu tempuh rata-rata perkoridor jalan arteri utama dari 30 Km/ jam menjadi 40 Km/ jam;
- 3) Membangun dan mengembangkan dermaga curah terminal pelabuhan CPO Kabil dengan dermaga wharf sepanjang 216 m, dan trestle sepanjang 273.5m, sehingga dapat melayani kapal barang hingga bobot 35.000 DWT;
- 4) Membangun dan mengembangkan terminal penumpang Bandara Hang Nadim Batam tahap-2, sehingga dapat menampung penumpang dari 3,5 juta/ tahun menjadi 7 juta/ tahun;
- 5) Pengembangan terminal cargo Bandara Hang Nadim dengan rencana luas pengembangan untuk bangunan seluas 9.600 m², sehingga dapat menampung cargo dengan kapasitas dari 120.000 ton menjadi 600.000 ton;
- 6) Pengembangan dermaga utara terminal Batu Ampar dengan total panjang dermaga 670 m dan lebar 171 m, serta mampu menampung kapasitas hingga 600.000 TEUs;
- 7) Pengembangan pelabuhan domestic Sekupang dengan rencana pengembangan terminal seluas 1350 m², sehingga dapat meningkatkan kapasitas penumpang dari 650 ribu orang per-tahun menjadi 2 juta orang per-tahun;
- 8) Pengembangan general cargo pelabuhan Sekupang, rencana pengembangan dermaga hingga 691 m dan trestle sepanjang 84 m, yang diharapkan dapat menampung kapasitas 200.00 ton cargo pertahun;
- 9) Pengembangan pelabuhan transshipment container di Tanjung Sauh, dengan total kapasitas hingga 4 juta TEUs;
- 10) Pengembangan jangkauan akses informasi dan teknologi melalui terhubungnya jaringan tulang punggung serat optic di seluruh Pulau Batam serta peningkatan kapasitas dan kecepatan broadband dalam mendukung layanan e-goverment.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh BP Batam untuk mendukung

pembangunan konektivitas nasional dalam mencapai keseimbangan pembangunan, diantaranya:

- 1) Melakukan upaya pengembangan usaha melalui strategi, mendorong skema pembiayaan dengan metoda cost sharing;
 - 2) Mempercepat pembangunan system transportasi multimoda melalui strategi, membangun system dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung kawasan dan pusat investasi.
 - 3) Mendorong pembangunan fixed/ wireline broadband di KPBPB Batam, melalui strategi membangun hub simpul sebagai opsi gateway internasional.
 - 4) Mendorong pembangunan bangunan Data Centre sebagai pusat data Nasional
- b. Membangun transportasi massal perkotaan; dengan target meningkatnya pelayanan angkutan massal perkotaan.

Sasaran:

- 1) Rencana pembangunan jalan tol sepanjang sekitar 40 km dengan jalur Batu Ampar-Muka Kuning- Batu Besar, serta memperbaiki jalan (preservasi) sepanjang sekitar 223,5 Km;
- 2) Rencana pembangunan monorail, dengan total jalur monorail sepanjang 27.4 km dari Batam Centre – Tanjung Uncang pada tahap 1 dan tahap selanjutnya sepanjang 28.6 km dari Batu Ampar – Bandara Hang Nadim;

Arah kebijakan dan strategi

- 1) Mengembangkan system transportasi dengan berbasis pada *Intelligent Transport System (ITS)* melalui strategi pengembangan angkutan umum massal yang modern dan terintegrasi;
 - 2) Melakukan upaya pengembangan usaha transportasi melalui strategi Mendorong skema pembiayaan dengan metoda cost sharing.
- C. Membangun infrastruktur/ Prasarana dasar; dengan target pembangunan/ pengembangan air minum dan perumahan.

Sasaran:

- 1) Rencana pembangunan rumah susun twinblok dengan kapasitas 2500 kamar tidur bagi pekerja beserta sarana dan prasarana penunjangnya;

- 2) Pemanfaatan potensi air baku pada Sungai Gong hingga 150lt/detik dan Sungai Rempang hingga 300l/ detik, sebagai cadangan air minum bagi pengembangan Pulau Rempang dan Pulau Galang.
- 3) Menjaga potensi ketersediaan Air Baku dari enam waduk existing sebagai sumber air bersih

Arah Kebijakan dan strategi :

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh BP Batam untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana dasar, diantaranya:

- 1) Peningkatan kemudahan akses pekerja di Batam terhadap hunian yang layak, aman dan terjangkau dengan strategi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, melalui strategi peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen pengelolaan rumah susun sewa;
- 2) Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi melalui strategi peningkatan kualitas rancangan penyediaan air minum yang didasari dengan neraca keseimbangan air domestik;
- d. Peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur; dengan target skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) sebagai peningkatan peran pembangunan dan pembiayaan infrastruktur.

Sasaran:

- 1) Pembiayaan cost sharing dalam rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan transshipment container di Tanjung Sauh; pembangunan monorail; pengembangan bandara dan pelabuhan laut serta rencana pembangunan jembatan P.Batam – P.Tanjung Sauh dan P. Bintan.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh BP Batam untuk mendukung efektifitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur, diantaranya:

- 1). Harmonisasi regulasi terkait pembiayaan infrastruktu, dengan strategi melakukan integrasi kebijakan KPS; harmonisasi peraturan perundangan terkait infrastruktur dalam rangka *mainstreaming* KPS dan *creative financing* lainnya; serta memerlakukan mekanisme *risk sharing*, insentif dan disinsentif.
- e. Penguatan investasi; dengan target menurunnya waktu pemrosesan perijinan investasi dan meningkatnya pertumbuhan investasi.

Sasaran:

- 1) Proses perijinan investasi satu pintu pada KPBPB Batam maksimal 15 hari perjenis perijinan;
- 2) Peningkatan nilai real investasi pada focus 8 cluster industry diharapkan dapat mencapai rata-rata sekitar US\$ 585 Juta pertahun, sehingga dalam lima tahun dapat mencapai US\$ 2,9 miliar.

Arah Kebijakan dan Strategi :

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh BP Batam untuk mendukung penguatan investasi, diantaranya:

- 1) Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, melalui strategi penghapusan regulasi dan peraturan yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha, serta pemberian insentif serta fasilitasi investasi berupa insentif fiskal dan non fiskal yang lebih selektif dengan proses transparan;
 - 2) Mengembangkan dan memperkuat investasi disektor riil, melalui strategi mendorong pengembangan paritsipasi KPBPB Batam dalam jaringan produksi global serta pengembangan peningkatan efektifitas strategi dan upaya promosi investasi yang lebih efektif.
- f. Pengembangan kapasitas perdagangan nasional; dengan target meningkatkan perdagangan dalam negeri dan meningkatkan aktivitas perdagangan domestic.

Sasaran :

- 1) Menurunkan rata-rata dwelling time sarana perhubungan transportasi dalam dukungan perdagangan menjadi 3 hari bagi akses perdagangan dan ekonomi.

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh BP Batam untuk mendukung pengembangan kapasitas perdagangan nasional, diantaranya:

- 1) Meningkatkan aktivitas perdagangan melalui strategi mendorong pengembangan kawasan logistic terpadu, terutama di bandara dan pelabuhan yang menjadi hub internasional.
- 2) Meningkatkan daya saing produk ekspor non migas dan jasa melalui peningkatan nilai tambah yang lebih tinggi dan kualitas yang kompetitif di

pasar internasional melalui strategi, memanfaatkan rantai nilai global dan jaringan produksi global untuk meningkatkan ekspor barang terutama produk manufaktur yang dapat mendorong proses alih teknologi, kemitraan dengan pelaku usaha local serta meningkatkan daya saing produk nasional.

3. Mewujudkan kawasan investasi yang berwawasan lingkungan.

Agenda pembangunan ini berkaitan dengan Nawacita ke-lima (meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia) dan Nawacita ke-tujuh (Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik) yang akan dilaksanakan dengan fokus pada:

- I. Fokus Dalam Rangka Mendukung Nawacita Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
 - a. Pembangunan Kesehatan khususnya pelaksanaan program Indonesia Sehat; dengan target mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif dari infrastruktur yang mendukung.

Sasaran:

- 1) Penyempurnaan pengembangan penyediaan air baku dengan rencana operasional waduk tembesi yang diharapkan mampu melayani sekitar 250 ribu jiwa dengan kapasitas 600l/ detik;
- 2) Peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dari 2.850m³/ hari menjadi 20.000 m³/ hari;
- 3) Peningkatan pelayanan kesehatan dalam bidang penyakit generative seperti stroke/kepala dan jantung untuk Propinsi Kepulauan Riau dan sarana prasarana yang mendukungnya;

Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh BP Batam untuk mendukung pembangunan kesehatan, diantaranya:

- 1) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas melalui strategi peningkatan mutu fasilitas pelayanan dan system pengendalian mutu layanan di Rumah Sakit BP Batam;
- 2) Memberikan pelayanan yang berkualitas standard (terakreditasi) dengan cirri khas yang berbeda, melalui penerapan standar pelayanan yang dilengkapi dengan *standard operating procedure* bagi seluruh unit

pelayanan yang berdampak terhadap meingkatnya kepuasan pelanggan;

- 3) Perbaikan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan berkaitan dengan penggunaan teknologi canggih (terbaru) dalam bidang kedokteran guna mendukung peningkatan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan serta tetap terjangkau bagi masyarakat;
- 4) Melakukan upaya penyempurnaan layanan kesehatan dan infrastruktur yang mendukung, melalui strategi mendorong skema pembiayaan dengan metoda *cost sharing*.

II. Fokus Dalam Rangka Mendukung Nawacita Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik

- a. Peningkatan Kedaulatan Pangan; dengan target Ketahanan Air., Ketahanan air di Batam diarahkan untuk terwujudnya penyediaan air dan perlindungan ekosistem yang sebagai pendukung bagi masyarakat di Batam secara merata untuk pemenuhan hidup sehari-hari maupun untuk kebutuhan industry.

Sasaran:

Berdasarkan target dan kondisi diatas, sasaran pembangunan ketahanan air adalah sebagai berikut:

- 1) Penyempurnaan operasional waduk Sei Tembesi yang telah dibangun pada Tahun 2008;
- 2) Pengembangan dalam kualitas dan kuantitas air di Batam.

Arah kebijakan dan strategi

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh BP Batam untuk mendukung ketahanan air, diantaranya:

- 1) Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan masyarakat dan ekonomi produktif, melalui strategi peningkatan penyediaan air baku bagi industry dan perkotaan serta penerapan insentif pengendalian kualitas air;
- 2) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat, melalui strategi mengembangkan dan menerapkan teknologi pengolahan air yang murah dan ramah lingkungan sesuai dengan kaidah pengelolaan sumber daya air berbasis lingkungan berkelanjutan (*eco sustainable water infrastructure*).

3.2.1 Peran BP Batam dalam Pengembangan Daerah Batam

Merujuk dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 yang telah menetapkan Kawasan Batam sebagai kawasan bebas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dimana BP Batam diberi tugas dan fungsi untuk mengembangkan daerah Batam dalam bidang ekonomi yang meliputi sector Perhubungan, Perdagangan, Industri, Maritim, Pariwisata, Perbankan dan sektor lainnya, maka dalam lima tahun kedepan BP Batam mengambil peranan penting dalam mendukung program pemerintah dalam peningkatan investasi PMA yang kompetitif dan lingkungan bisnis yang sehat di Batam sebagai kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) meliputi:

1. Pemantapan dalam manajemen pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam (KPBPB-Batam), melalui penciptaan peraturan dan regulasi yang mendukung iklim investasi yang sehat serta peningkatan profesionalisme sumber daya pengelola KPBPB-Batam;
2. Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pertanahan di kawasan PBPB – Batam, serta pengelolaan pengaman lahan dan asset investasi;
3. Percepatan pembangunan konektivitas, melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan laut, Bandar udara serta transportasi darat;
4. Peningkatan iklim investasi dan iklim usaha, melalui pelayanan lalu lintas barang serta pelayanan investasi dan pemasaran;
5. Membangun kontinuitas jaringan teknologi informasi nasional, melalui pembangunan fasilitas pusat data/ *data centre* dan pemulihan data/ *data recovery centre*;
6. Membangun infrastruktur prasarana dasar, meliputi pengelolaan dan penyelenggaraan air dan lingkungan serta pemukiman dan perumahan pekerja;
7. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan rujukan yang berkualitas, melalui pengelolaan dan penyelenggaraan fasilitas kesehatan umum.

3.3 Kerangka Regulasi

Sejalan dengan RPJMN 2015-2019, sinergi antara kebijakan dan kerangka regulasi dilakukan untuk memantapkan pembangunan nasional di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mewujudkan daya saing perekonomian berlandaskan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi.

Salah satu yang membuat Batam menjadi perhatian khusus Pemerintah sejak dahulu hingga sekarang adalah karena kawasan ini memiliki potensi untuk memberi kontribusi terhadap kemajuan perekonomian nasional maupun kawasan Batam dan sekitarnya, posisinya yang sangat strategis dengan Negara Singapura yang menjadi pusat jasa dan keuangan dunia, membuat kawasan ini sangat berpotensi untuk saling bersinergi dengan kawasan tersebut. Berkaitan dengan perkembangan Batam maka beberapa regulasi yang telah disusun terkait dengan pengelolaan KPBPBP- Batam, yaitu :

1. **Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2007** tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang.
2. **Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2007** tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
3. **Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2008** tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
4. **Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2011** tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
5. **Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2011** tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan dan Karimun.
6. **Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1970** tentang Pelaksanaan Pembangunan Pulau Batam.
7. **Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1973** tentang Daerah Industri Pulau Batam.
8. **Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1974** tentang Penunjukkan dan Penetapan Beberapa Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam.
9. **Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1978** tentang Penetapan Seluruh Daerah Industri Pulau Batam Sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse.
10. **Keputusan Presiden RI Nomor 56 Tahun 1984** tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse.

11. **Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1992** tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya Sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone).
12. **Keputusan Presiden RI Nomor 113 Tahun 2000** tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam.
13. **Keputusan Presiden RI No. 25 Tahun 2005** tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam.
14. **Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2008** tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
15. **Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008** tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
16. **Surat Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam No. KPTS/6/DK/IX/2008** tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Sejalan dengan perkembangan lingkungan wilayah dan politik, keterbukaan pengelolaan serta akuntabilitas, maka dirasakan bahwa regulasi yang sudah dikeluarkan diatas, perlu dilakukan penambahan dan harmonisasi khususnya dalam bidang-bidang penataan ruang (tata ruang), pariwisata dan Industri.

Dalam bidang tata ruang, terkait dengan belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah dan regulasi resmi lainnya untuk memasukan daerah Tanjung Sauh – Kepulauan Riau sebagai bagian dalam Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Pemasukan daerah tersebut menjadi bagian KPBPB-Batam merupakan bagian dari rencana pembangunan pelabuhan transshipment peti kemas yang diharapkan melalui target kapasitas mencapai 4 juta TEUs sehingga dapat mengambil potensi lalu lintas cargo di selat Malaka. Hal senada dalam bidang hal penetapan dukungan dalam bidang tata ruang KPBPB di Batam, yaitu belum diterbitkan hak pengelolaan lahan terhadap Pulau Rempang hingga Pulau Galang Baru untuk masuk dalam pengelolaan KPBPB Batam, hingga Januari 2015 ini status lahan pada pulau tersebut dianggap masih berstatus quo sehingga berbagai aktifitas investasi dan pengembangan di Pulau Rempang hingga Pulau Galang Baru belum bisa dilakukan secara optimal. Diharapkan melalui Peraturan Pemerintah dan

regulasi yang mendukung KPBPB Batam akan menghapus hambatan terhadap rencana pengembangan dan investasi yang akan tumbuh meningkat tidak hanya pada kedua daerah tersebut akan tetapi berdampak multi bagi daerah dan kegiatan ekonomi disekitarnya.

Bidang industry pariwisata dan kreatif di Batam saat ini cukup berkembang dengan pesat, yang ditandai dengan tidak hanya tingginya jumlah kunjungan mancanegara yang melakukan kegiatan wisata di Batam akan tetapi peningkatan industry pariwisata di Batam berkembang seiring dengan meningkatnya teknologi informasi digitalisasi dalam industry kreatif Batam yang cukup dikenal oleh mancanegara, melihat hal ini KPBPB Batam memerlukan dukungan pemerintah pusat dalam hal penetapan Peraturan Pemerintah yang mengatur regulasi industry pariwisata dan kreatif yang ada di wilayah KPBPB Batam, yang diharapkan regulasi yang mendukung pada KPBPB Batam tidak hanya memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata, melainkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghapus kemiskinan, dan mengatasi pengangguran disamping tetap melestarikan lingkungan alam dan sumberdaya serta hak cipta atas karya bangsa yang lahir pada kawasan PBPB di Batam ini yang dapat menjadi pedoman pengembangan industry pariwisata dan kreatif pada PBPB Batam.

Untuk bidang industry, PBPB Batam masih perlu mengeluarkan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Kepala PBPB Batam, yang memuat mengenai harmonisasi antara para stakeholders dan investor guna penciptaan iklim investasi yang kondusif di KPBPB Batam, terutama dalam pemberian insentif yang menanamkan investasinya di Batam baik jangka pendek maupun jangka panjang, melalui harmonisasi dan pemberian intensif serta ruang kebijakan fiskal yang berpihak pada para investor diharapkan roda pergerakan ekonomi dapat berjalan secara dinamis dan progresif sehingga mampu melampaui target real investasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Selain hal diatas PBPB Batam memandang perlu dilakukan harmonisasi sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 yang telah menetapkan Kawasan Batam sebagai kawasan bebas perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dimana PBPB Batam diberi tugas dan fungsi untuk mengembangkan daerah Batam dalam bidang ekonomi yang meliputi sector Perhubungan, Perdagangan, Industri, Maritim, Pariwisata, Perbankan dan sektor lainnya, yang mana perlu disempurnakan kembali hal yang

berkaitan dengan tariff, renumerasi dan pembentukan serta tindak lanjut mengenai badan usaha yang berkaitan dengan bandara dan pelabuhan laut.

3.4 Kerangka Kelembagaan

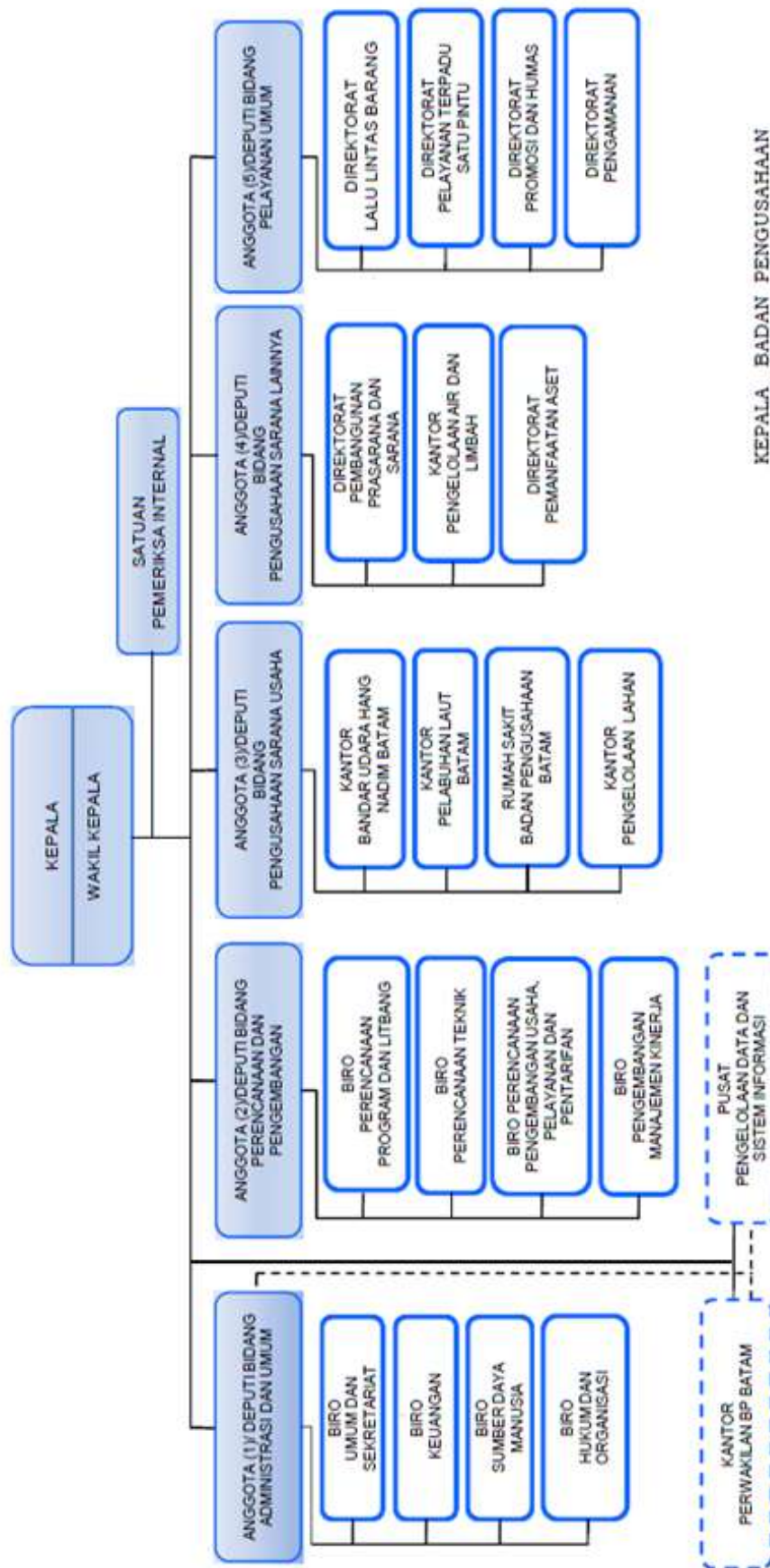
Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, akan mengubah struktur kelembagaan Otorita Batam mengingat dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa “kelembagaan” terdiri dari Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau yang disingkat Badan Pengusahaan Batam (BPKPBP – Batam) atau BP Batam.

Melalui perkembangan yang terjadi dan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011, BP-Batam mempunyai tugas; melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Kawasan Batam). Dengan fungsi pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan bebas Batam. Berdasarkan penetapan oleh Peraturan Pemerintah diatas, maka sesuai Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Dibawah Anggota/ Deputi Dilingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam maka susunan organisasi terdiri dari; Kepala, Wakil Kepala, Anggota 1/ Deputi Bidang Administrasi dan Umum, Anggota 2/ Deputi Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Anggota 3/ Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha, Anggota 4/ Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya, Anggota 5/ Deputi Bidang Pelayanan Umum, Satuan Pemeriksa Internal, Kantor Perwakilan Badan Pengusahaan Batam, dan Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.

Adapun struktur organisasi BP-Batam dapat dilihat pada gambar 3.1.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGUSAHAAN BATAM

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 5 Tahun 2015
Tanggal: 24 April 2015



KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUSTOFA WIDJAJA

Berdasarkan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam No. 14 Tahun 2013 tanggal 4 Oktober 2013 telah ditetapkan bahwa unsur pimpinan terdiri dari Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan dengan membawahi 5 anggota dengan tugas masing-masing : Anggota (1) ditugaskan dalam bidang Administrasi Umum; Anggota (2) ditugaskan dalam bidang Perencanaan dan Pengembangan; Anggota (3) dalam bidang Pengusahaan Sarana Usaha; Anggota (4) dalam bidang Pengusahaan Sarana Lainnya dan Anggota (5) bidang Pelayanan Umum. Dan mengacu pada Surat Keputusan Dewan Kawasan PBPB Batam, KPBPB Batam dibentuk pula Dewan Pengawas yang terdiri dari 5 anggota.

Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan lingkungan yang cepat, posisi unsur pimpinan di KPBPB Batam yang dibawah Dewan Kawasan dirasa kurang dapat menjawab tantangan lingkungan eksternal yang dinamis, mengingat jalur kebijakan maupun keputusan dan koordinasi tertumpu pada Dewan Kawasan yang perlu berkoordinasi dengan struktur diatasnya yaitu Dewan Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka dapat kami sampaikan bahwa bentuk kelembagaan KPBPB Batam, akan lebih efektif dan efisien bila langsung dibawah binaan Dewan Nasional yang beranggotakan dari Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri dan ditambah beberapa anggota juga dari Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Negara Riset dan Teknologi serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal., sehingga segala bentuk kebijakan dan regulasi yang mendukung penciptaan iklim investasi dan ekonomi dapat terlaksana dengan efisien. Adapun fungsi Dewan Kawasan dan Dewan Pengawas di KPBPB tetap melekat melalui fungsi-fungsi koordinasi bidang perencanaan dan teknis.

Adapun hal mendasar lain yang mengikutinya dikarenakan harus dilakukan restrukturisasi kelembagaan di BP Batam mencakup evaluasi berbagai penyempurnaan diantaranya :

1. Evaluasi peningkatan kualitas aparatur negara/ SDM BP Batam terhadap reformasi birokrasi yang berkarakter.

2. Membangun tata kelola yang transparan efektif, dan efisien yang sesuai dengan fungsi institusi BP Batam.
3. Struktur organisasi yang ada belum disusun sesuai dengan fungsi jenjang struktural sehingga kurang efektifnya pelaksanaan pengelolaan di BP Batam.
4. Ditetapkannya BP-Batam menjadi instansi pemerintah non-struktural SDM yang ber-status PNS belum diatur secara spesifik, menyebabkan jenjang karier PNS di BP Batam menjadi ambigu. (jumlah PNS di BP-Batam berjumlah 1989 pegawai).
5. Peningkatan kualitas pelayanan pada layanan yang ada di BP-Batam guna peningkatan kepuasan kepada masyarakat dan stakeholders.
6. Penerapan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu merujuk Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Dengan memperhatikan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan BP Batam, maka target kinerja dan kerangka pendanaan BP Batam Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

4.1 Target Kinerja

1. Pencapaian target performance kinerja aparatur dilingkungan BP Batam

Dalam rangka mendukung terwujudnya misi pertama yang salah satu tujuannya adalah Meningkatkan peran kelembagaan yang professional dalam mengantisipasi persaingan ekonomi dan perdagangan global maka perlu ditetapkan target performance kinerja aparatur. Adanya indikator ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya personil BP Batam professional, serta sebagai 'tool' untuk evaluasi performance kinerja aparatur dilingkungan BP Batam. Target Performance kinerja aparatur di BP Batam ditetapkan dengan skala persentase (%) rata-rata dari nilai performance kinerja seluruh aparatur. Penilaian akan dilakukan pada setiap tahun, dengan meninjau performance kinerja aparatur dalam tahun terakhir ini maka untuk tahun 2015 ditetapkan nilai persentase target kinerja aparatur dilingkungan BP Batam adalah 64% dan dengan ekspektasi peningkatan rata-rata tiap tahunnya 2% maka diharapkan pada akhir 2015 nilai persentase target performance kinerja aparatur dilingkungan BP Batam mencapai nilai 74%.

2. Pencapaian kesesuaian pelaksanaan kegiatan program terhadap rencana kerja BP Batam

Agar dapat terwujudnya sarana prasarana kepelabuhanan yang menghubungkan simpul jasa kawasan investasi yang berstandar internasional, maka perlu adanya kesesuaian antara kegiatan program yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Sehingga diharapkan dapat memacu pembangunan sarana prasarana dengan cepat dan tepat. Pada tahun 2015 ditargetkan minimal 70% kegiatan program yang dijalankan sudah sesuai dengan rencana kerja dan di tahun 2019 kesesuaiannya semakin meningkat menjadi 80%.

3. Pencapaian akuntabilitas laporan

Untuk mendukung terwujudnya misi pertama dalam menerapkan prinsip *good governance* dan *good corporate governance*, yang salah satu unsurnya adalah pemerintahan yang bersih (*clean government*) maka target akuntabilitas laporan audit BPKnya adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam kurun waktu 5 tahun kedepan (2015-2019).

4. Investasi dan PDRB

Dengan adanya rencana reformasi regulasi yang nantinya akan berpihak pada pengembangan investasi, optimalisasi peran PTSP dalam memberikan kemudahan perizinan, pemberian insentif bagi investor dan pembangunan sarana prasarana yang berstandar internasional maka diharapkan dalam 5 tahun kedepan pertumbuhan investasi dan PDRB di Batam dapat meningkat pesat. Berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional dalam 5 tahun kedepan antara 7% sd 8%, serta nilai total rata-rata perkembangan investasi real PMA selama kurun waktu 2010-2014 di Batam yang berkisar sebesar 15.8% dan merujuk telah dicanangkannya rencana nilai realisasi investasi oleh pemerintah pusat (BKPM) yang mencapai Rp.3.500 trilyun (270 Miliar USD) untuk skala nasional maka total nilai real investasi PMA yang diharapkan dapat dicapai BP Batam hingga tahun 2019 yang sebesar 2.9 Miliar USD melalui 8 fokus industri terpilih. Adapun untuk nilai PDRB berdasarkan perhitungan dari nilai realisasi yang direncanakan diatas serta perhitungan ICOR sebesar 4 maka diharapkan nilai PDRB pada tahun 2019 (kumulatif dari 2015) dapat mencapai nilai Rp. 9.5 Trilyun.

5. Penyerapan tenaga kerja

Seiring dengan ekspektasi target pertumbuhan investasi yang meningkat pesat untuk 5 tahun kedepan maka hal ini tentunya juga akan memberikan dampak langsung jumlah tenaga kerja di Batam. Dengan banyaknya investor yang masuk ke Batam untuk berinvestasi dalam bidang industri manufaktur maupun jasa maka jumlah lapangan kerja akan meningkat. Berdasarkan perbandingan perhitungan antara jumlah investasi dan tenaga kerja, maka pada tahun 2015 target jumlah tenaga kerja pada 8 fokus industri di Batam diperkirakan mampu menyerap sejumlah 33% dari total tenaga kerja di Batam yaitu sebanyak 120.000 orang; tahun 2016 sebanyak 126.500 orang, tahun 2017 sebanyak 134.000 orang, tahun 2018 sebanyak 142.000 orang dan di tahun 2019 mencapai 149.000 orang.

6. Pencapaian kepuasan stakeholder terhadap penyelenggaraan pelayanan public

Dalam rangka menerapkan Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka control penyelenggaraan manajemen pengelolaan yang merupakan salah satu strategi untuk menjaga kinerja kelembagaan yang professional terutama dalam hal memberikan pelayanan public, maka salah satu ukuran target kinerja dari BP Batam adalah persentase (%) tingkat kepuasan stakeholder. Untuk tahun 2015 diharapkan minimal dapat mencapai 76% dan terus ditingkatkan sampai 84% pada tahun 2019.

PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	USULAN INDIKATOR	USULAN TARGET					UNIT PENANGGUNG JAWAB
			2015	2016	2017	2018	2019	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam	Terwujudnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebagai upaya pengelolaan pengembangan kawasan pelabuhan bebas dan perdagangan bebas batam	1 Pencapaian target performance kinerja aparatur dilingkungan BP-Batam	64	68	70	72	74	Biro SDM, Biro Pengembangan Manajemen Kinerja,
		2 Pencapaian kesesuaian pelaksanaan kegiatan program terhadap rencana kerja BP Batam	70%	75%	75%	80%	80%	Biro Perencanaan Program dan Litbang, Biro Perencanaan Teknik, Satuan Pemeriksa Internal,
		3 Pencapaian akuntabilitas laporan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Biro Keuangan, Satuan Pemeriksa Internal,
Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB Batam	Terwujudnya nilai ekonomis tinggi bagi masyarakat dan duia usaha di Barelang	Pendaftaran nilai investasi PMA	\$608,400,000	\$719,160,000	\$888,888,000	\$1,163,385,600	\$1,405,422,720	Direktorat Pembangunan Sarana Prasarana, Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Direktorat Promosi & Humas, Direktorat Lalu Lintas Barang, Kantor Pengelolaan Lahan, Biro Perencanaan Pengembangan Usaha Pelayanan dan Pentarifan,
		1 Realisasi nilai investasi PMA	\$359,417,326	\$447,833,988	\$558,001,149	\$695,269,432	\$866,305,712	
		PDRB berdasarkan berdasarkan realisasi PMA	\$89,854,332	\$111,958,497	\$139,500,287	\$173,817,358	\$216,576,428	
		2 Penyerapan tenaga kerja	120,000	126,500	134,000	142,000	149,000	Direktorat Pemanfaatan Asset, Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		3 Pencapaian kepuasan stakeholder terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	76%	78%	80%	82%	84%	Biro Perencanaan Program dan Litbang, Satuan Pemeriksa Internal, Kantor Bandar Udara HN, Kantor Pelabuhan Laut, RSBP, Pusat PDSI, Kantor Perwakilan, Direktorat Pengamanan, Kantor Pengelolaan Lahan,

Tabel 4.1 Rencana Target Indikator Utama BP Batam 2015-2019

4.2 Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran serta alokasi sumberdaya.

Arah kebijakan keuangan BP Batam adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja kegiatan yang dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip secara efektif dan efisien.

Pendapatan BP Batam adalah pendapatan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sumber pendapatan BP Batam berasal dari:

1. Pengelolaan data center dan system informasi;
2. Pengelolaan dan penyelenggaraan pertanahan di Kawasan PBPB –Batam;
3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan laut;
4. Pengelolaan dan penyelenggaraan Bandar udara;
5. Pengelolaan dan penyelenggaraan fasilitas kesehatan umum;
6. Pelayanan lalu lintas barang ke kawasan PBPB-Batam;
7. Pengelolaan dan penyelenggaraan air dan lingkungan;
8. Pengelolaan dan penyelenggaraan pemukiman dan perumahan pekerja;

Berikut dapat disampaikan perkembangan realisasi pendapatan dan rencana pendapatan BP Batam hingga tahun 2014 pada tabel-tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Perkembangan Realisasi Pendapatan BP Batam 2008-2013

Kode	PENDAPATAN/PENERIMAAN BP BATAM	TA 2008	TA 2009	TA 2010	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TOTAL 2010-2013
TARGET PENDAPATAN		490.000.000.000	534.057.000.000	499.717.000.000	528.174.000.000	595.338.350.000	687.279.000.000	2.310.508.350.000
41	Penerimaan Usaha	481.000.000.000	522.539.000.000	482.710.000.000	511.244.000.000	576.981.000.000	668.329.000.000	2.239.264.000.000
1	Penerimaan Usaha Kantor Pusat (Perizinan & Retribusi Lainnya)	270.000.000.000	287.969.000.000	240.000.000.000	230.000.000.000	271.700.000.000	288.512.000.000	1.030.212.000.000
2	Penerimaan Usaha Bandar Udara	56.000.000.000	71.190.000.000	72.000.000.000	79.200.000.000	88.500.000.000	110.515.000.000	350.215.000.000
3	Penerimaan Usaha Pelabuhan Laut	71.000.000.000	75.600.000.000	81.500.000.000	96.250.000.000	105.650.000.000	144.689.000.000	428.089.000.000
4	Penerimaan Usaha Rumah Sakit	70.000.000.000	73.500.000.000	75.000.000.000	82.500.000.000	82.500.000.000	88.569.000.000	328.569.000.000
5	Penerimaan Usaha Kantor Air	14.000.000.000	14.280.000.000	14.210.000.000	23.294.000.000	28.631.000.000	36.044.000.000	102.179.000.000
411	Penerimaan Usaha Lainnya	9.000.000.000	11.518.000.000	17.007.000.000	16.930.000.000	18.357.350.000	18.950.000.000	71.244.350.000
1	Hasil Kerjasama/KSO Dengan Pihak Lain						3.790.000.000	3.790.000.000
2	Pendapatan Sewa	4.000.000.000	6.518.000.000	12.007.000.000	11.930.000.000	13.357.350.000	1.326.500.000	38.620.850.000
3	Pendapatan Jasa Perbankan	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.685.000.000	20.685.000.000
4	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda						2.842.500.000	2.842.500.000
5	Pendapatan Lain-lain						3.411.000.000	3.411.000.000
6	Keuntungan Lainnya						1.895.000.000	1.895.000.000
REALISASI PENERIMAAN		495.921.435.033	457.037.472.687	449.304.756.287	542.254.223.321	621.871.377.005	902.851.737.802	2.516.282.094.414
41	Penerimaan Usaha	484.384.692.575	445.792.461.869	438.541.968.956	519.782.451.306	579.561.170.323	874.481.992.674	2.412.367.583.259
1	Penerimaan Usaha Kantor Pusat (Perizinan & Retribusi Lainnya)	267.057.996.472	204.970.008.613	202.919.656.795	248.610.737.695	308.702.553.980	540.695.938.526	1.300.928.886.997
2	Penerimaan Usaha Bandar Udara	56.738.322.372	63.986.815.686	74.501.872.584	73.208.201.965	72.970.186.673	87.359.102.533	308.039.363.754
3	Penerimaan Usaha Pelabuhan Laut	71.416.311.317	86.358.208.801	81.614.948.914	106.288.360.685	108.168.545.235	139.519.686.361	435.591.541.196
4	Penerimaan Usaha Rumah Sakit	72.947.295.220	77.480.496.412	64.801.194.061	72.716.835.328	73.133.412.559	81.111.701.405	291.763.143.353
5	Penerimaan Usaha Kantor Air	16.224.767.194	12.996.932.356	14.704.296.601	18.958.315.632	16.586.471.876	23.233.158.919	73.482.243.029
6	Penerimaan Usaha Kantor Perwakilan						2.562.404.930	
411	Penerimaan Usaha Lainnya	11.536.742.459	11.245.010.818	10.762.787.331	22.471.772.015	42.310.206.682	28.369.745.128	103.914.511.156
1	Hasil Kerjasama/KSO Dengan Pihak Lain	-	-	-	-	15.310.519.041	22.307.909.244	37.618.428.285
2	Pendapatan Sewa	3.907.777.295	5.984.623.068	5.976.082.847	15.557.817.996	18.257.717.980	-	39.791.618.823
3	Pendapatan Jasa Perbankan	7.628.965.164	5.260.387.750	4.786.704.484	6.663.698.836	8.028.491.418	4.876.856.152	24.355.750.891
4	Pendapatan atas Sanksi, Klaim dan Denda	-	-	-	-	436.664.921	644.614.873	1.081.279.794
5	Pendapatan Lain-lain	-	-	-	250.255.182	276.813.322	96.814.045	623.882.549
6	Keuntungan Lainnya	-	-	-	-	-	443.550.814	443.550.814
Jumlah TARGET Pendapatan		490.000.000.000	534.057.000.000	499.717.000.000	528.174.000.000	595.338.350.000	687.279.000.000	2.310.508.350.000
Jumlah REALISASI Penerimaan		495.921.435.033	457.037.472.687	449.304.756.287	542.254.223.321	621.871.377.005	900.289.332.872	2.513.719.689.484
% Realisasi terhadap Target		101,21%	85,58%	89,91%	102,67%	104,46%	130,99%	108,80%

Tabel 4.3 Realisasi Penerimaan BP-Batam TA. 2014

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan	TA.2014	
		Target	Realisasi
5116	Unit : Biro Keuangan		
	Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam		
	Kegiatan : Pelayanan Administrasi Keuangan		
	A. Pendapatan BLU	15,393,085,000	17,171,863,610
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum		-
B.	2. Pendapatan Kerjasama	15,393,085,000	17,171,863,610
	3. Pendapatan BLU Lainnya		-
	Penerimaan RM		-
	Total Pendapatan Biro Keuangan	15,393,085,000	17,171,863,610
5123	Unit : Direktorat Pengelolaan Lahan		
	Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam		
	Kegiatan : Pengelolaan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PEPB Batam		
	A. Pendapatan BLU	284,829,680,000	535,851,627,995
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	280,829,680,000	529,607,983,058
B.	2. Pendapatan Kerjasama		-
	3. Pendapatan BLU Lainnya	4,000,000,000	6,243,644,937
	Penerimaan RM		-
	Total Pendapatan Dir. Pengelolaan Lahan	284,829,680,000	535,851,627,995
5119	Unit : PDSI		
	Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam		
	Kegiatan : Pengelolaan Data Center & Sistem Informasi		
	A. Pendapatan BLU	775,000,000	2,375,528,956
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	775,000,000	2,375,528,956
B.	2. Pendapatan Kerjasama		-
	3. Pendapatan BLU Lainnya		-
	Penerimaan RM		-
	Total Pendapatan PDSI	775,000,000	2,375,528,956
5133	Unit : Dir. Pemukiman dan Lingkungan		
	Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam		
	Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemukiman dan Perumahan Pekerja		
	A. Pendapatan BLU	4,575,000,000	7,191,620,807
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	4,575,000,000	7,191,620,807
B.	2. Pendapatan Kerjasama		-
	3. Pendapatan BLU Lainnya		-
	Penerimaan RM		-
	Total Pendapatan Dir. Pemukiman dan Lingkungan	4,575,000,000	7,191,620,807
5114	Unit : Biro Umum		
	Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam		
	Kegiatan : Pelayanan Kerumahaan Organisasi dan Bantuan Hukum		
	A. Pendapatan BLU	2,500,000,000	6,957,175,446
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum		-
B.	2. Pendapatan Kerjasama	2,500,000,000	6,957,175,446
	3. Pendapatan BLU Lainnya		-
	Penerimaan RM		-
	Total Pendapatan Biro Umum	5,000,000,000	6,957,175,446
5129	Unit : Direktorat Lalu Lintas Barang		
	Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam		
	Kegiatan : Pelayanan Lalu Lintas Barang ke Kawasan PEPB Batam		
	A. Pendapatan BLU	150,000,000	341,400,700
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	150,000,000	341,400,700
B.	2. Pendapatan Kerjasama		-
	3. Pendapatan BLU Lainnya		-
	Penerimaan RM		-
	Total Pendapatan Direktorat Lalu Lintas Barang	150,000,000	341,400,700

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/Alun Pendapatan	TA 2014	
		Target	Realisasi
5125	Unit : Kantor Bandara Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandara A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 2. Pendapatan Kerjasama 3. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM	112,172,725,000 93,103,361,750 16,825,908,750 2,243,454,500	96,948,903,066 86,153,868,385 10,277,164,684 517,869,998 -
	Total Pendapatan Unit Bandara	112,172,725,000	96,948,903,066
5124	Unit : Kantor Pelabuhan Laut Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 2. Pendapatan Kerjasama 3. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM	150,749,591,000 125,836,357,260 24,413,233,740 500,000,000 193,992,200,000	186,548,798,992.120 143,228,093,221 42,853,813,297 466,892,474 193,283,036,620
	Total Pendapatan Unit Pelabuhan Laut	344,741,791,000	379,831,835,612
5126	Unit : Rumah Sakit Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Umum A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 2. Pendapatan Kerjasama 3. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM	89,897,535,000 89,897,535,000	86,532,912,009 86,532,912,009 -
	Total Pendapatan Unit Rumah Sakit	89,897,535,000	86,532,912,009
5130	Unit : Kantor Air dan Limbah Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam Kegiatan : Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Lingkungan A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 2. Pendapatan Kerjasama 3. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM C. penerimaan PHLN	36,764,880,000 22,843,508,321 13,852,111,548 69,260,131 67,102,439,000 108,009,000,000	29,955,777,718 17,934,176,094 12,012,785,435 8,816,189 65,536,819,881 -
	Total Pendapatan Unit Kantor Air	211,876,319,000	95,492,597,599
5118	Unit : Kantor Perwakilan Program : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam Kegiatan : Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Swasta A. Pendapatan BLU 1. Pendapatan Jasa Layanan Umum 2. Pendapatan Kerjasama 3. Pendapatan BLU Lainnya B. Penerimaan RM	-	1,705,410,000 1,705,410,000 -
	Total Pendapatan Unit Kantor Perwakilan	-	1,705,410,000
TOTAL PENDAPATAN USAHA		697,807,496,000	971,581,019,298.96
TOTAL PENERIMAAN RM		261,094,639,000	258,819,856,501
TOTAL PENERIMAAN PHLN		108,009,000,000	-

Tabel 4.4 Proyeksi Pendapatan BP-Batam 2014-2019

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan		TA. 2014	TA. 2015	TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA.2019
5116	Unit :	Biro Keuangan						
	Program :	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam						
	Kegiatan :	Pelayanan Administrasi Keuangan						
	A.	Pendapatan Jasa Usaha	15,393,085,000	22,012,111,000	26,414,533,000	30,825,760,000	33,027,644,000	39,633,172,000
	1.	Pendapatan Jasa Usaha						
	2.	Pendapatan Kerjasama						
	3.	Pendapatan BLU Lainnya	15,393,085,000	22,012,111,000	26,414,533,000	30,825,760,000	33,027,644,000	39,633,172,000
	Total Pendapatan Biro Keuangan		15,393,085,000.000	22,012,111,000	26,414,533,000	30,825,760,000	33,027,644,000	39,633,172,000
5123	Unit :	Direktorat Pengelolaan Lahan						
	Program :	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam						
	Kegiatan :	Pengelolaan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB Batam						
	A.	Pendapatan Jasa Usaha	284,829,680,000	385,489,024,000	462,586,828,000	541,200,561,000	579,858,516,000	695,830,219,000
	1.	Pendapatan Jasa Usaha	280,829,680,000	378,259,424,000	453,911,308,000	531,076,230,000	569,011,005,000	682,813,206,000
	2.	Pendapatan Kerjasama						
	3.	Pendapatan BLU Lainnya	4,000,000,000	7,229,600,000	8,675,520,000	10,124,331,000	10,847,511,000	13,017,013,000
	Total Pendapatan Dir. Pengelolaan Lahan		284,829,680,000.000	385,489,024,000	462,586,828,000	541,200,561,000	579,858,516,000	695,830,219,000
5119	Unit :	PDSI						
	Program :	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam						
	Kegiatan :	Pengelolaan Data Center & Sistem Informasi						
	A.	Pendapatan Jasa Usaha	775,000,000	1,511,904,000	1,814,284,000	2,117,269,000	2,268,505,000	2,722,206,000
	1.	Pendapatan Jasa Usaha	775,000,000	1,511,904,000	1,814,284,000	2,117,269,000	2,268,505,000	2,722,206,000
	2.	Pendapatan Kerjasama						
	3.	Pendapatan BLU Lainnya						
	Total Pendapatan PDSI		775,000,000	1,511,904,000	1,814,284,000	2,117,269,000	2,268,505,000	2,722,206,000
5133	Unit :	Dir. Pemukiman dan Lingkungan						
	Program :	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam						
	Kegiatan :	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemukiman dan Perumahan Pekerja						
	A.	Pendapatan Jasa Usaha	4,575,000,000	7,482,019,000	8,978,422,000	10,477,818,000	11,226,248,000	13,471,497,000
	1.	Pendapatan Jasa Usaha	4,575,000,000	7,482,019,000	8,978,422,000	10,477,818,000	11,226,248,000	13,471,497,000
	2.	Pendapatan Kerjasama						
	3.	Pendapatan BLU Lainnya						
	Total Pendapatan Dir. Pemukiman dan Lingkungan		4,575,000,000	7,482,019,000	8,978,422,000	10,477,818,000	11,226,248,000	13,471,497,000
5114	Unit :	Biro Umum						
	Program :	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam						
	Kegiatan :	Pelayanan Kerumahtanggaan Organisasi dan Bantuan Hukum						
	A.	Pendapatan Jasa Usaha	2,500,000,000	6,753,339,000	8,104,006,000	9,457,375,000	10,132,915,000	12,159,498,000
	1.	Pendapatan Jasa Usaha						
	2.	Pendapatan Kerjasama						
	3.	Pendapatan BLU Lainnya	2,500,000,000	6,753,339,000	8,104,006,000	9,457,375,000	10,132,915,000	12,159,498,000
	Total Pendapatan Biro Umum		2,500,000,000	6,753,339,000	8,104,006,000	9,457,375,000	10,132,915,000	12,159,498,000
5129	Unit :	Direktorat Lalu Lintas Barang						
	Program :	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam						
	Kegiatan :	Pelayanan Lalu Lintas Barang ke Kawasan PBPB Batam						
	A.	Pendapatan Jasa Usaha	150,000,000	283,930,000	340,716,000	397,615,000	426,016,000	511,219,000
	1.	Pendapatan Jasa Usaha	150,000,000	283,930,000	340,716,000	397,615,000	426,016,000	511,219,000
	2.	Pendapatan Kerjasama						
	3.	Pendapatan BLU Lainnya						
	Total Pendapatan Direktorat Lalu Lintas Barang		150,000,000	283,930,000	340,716,000	397,615,000	426,016,000	511,219,000

Kode	Uraian Unit/Program/Kegiatan/Akun Pendapatan		TA. 2014	TA. 2015	TA. 2016	TA. 2017	TA. 2018	TA.2019
5125	Unit :	Kantor Bandara						
	Program :	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam						
	Kegiatan :	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandara						
	A.	Pendapatan Jasa Usaha	112,172,725,000.000	160,406,995,000	192,488,392,000	224,633,952,000	240,679,553,000	288,815,462,000
	1.	Pendapatan Jasa Usaha	93,103,361,750.000	133,137,807,000	159,765,368,000	186,446,184,000	199,764,034,000	239,716,840,000
	2.	Pendapatan Kerjasama	16,825,908,750.000	24,061,049,000	28,873,258,000	33,695,092,000	36,101,932,000	43,322,318,000
	3.	Pendapatan BLU Lainnya	2,243,454,500.000	3,208,139,000	3,849,766,000	4,492,676,000	4,813,587,000	5,776,304,000
	Total Pendapatan Unit Bandara		112,172,725,000.000	160,406,995,000	192,488,392,000	224,633,952,000	240,679,553,000	288,815,462,000
5124	Unit :	Kantor Pelabuhan Laut						
	Program :	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam						
	Kegiatan :	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut						
	A.	Pendapatan Jasa Usaha	150,749,591,000.000	232,798,132,000	279,357,758,000	326,010,503,000	349,297,432,000	419,156,917,000
	1.	Pendapatan Jasa Usaha	125,836,357,260.000	179,945,990,000	215,935,188,000	251,996,364,000	269,996,464,000	323,995,756,000
	2.	Pendapatan Kerjasama	24,413,233,740.000	52,137,142,000	62,564,570,000	73,012,853,000	78,228,161,000	93,873,793,000
	3.	Pendapatan BLU Lainnya	500,000,000.000	715,000,000	858,000,000	1,001,286,000	1,072,807,000	1,287,368,000
	B.	Penerimaan RM						
	Total Pendapatan Unit Pelabuhan Laut		150,749,591,000.000	232,798,132,000	279,357,758,000	326,010,503,000	349,297,432,000	419,156,917,000
5126	Unit :	Rumah Sakit						
	Program :	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam						
	Kegiatan :	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Umum						
	A.	Pendapatan Jasa Usaha	89,897,535,000.000	128,553,475,000	154,264,170,000	180,026,286,000	192,885,563,000	231,462,675,000
	1.	Pendapatan Jasa Usaha	89,897,535,000.000	128,553,475,000	154,264,170,000	180,026,286,000	192,885,563,000	231,462,675,000
	2.	Pendapatan Kerjasama						
	3.	Pendapatan BLU Lainnya						
	Total Pendapatan Unit Rumah Sakit		89,897,535,000.000	128,553,475,000	154,264,170,000	180,026,286,000	192,885,563,000	231,462,675,000
5130	Unit :	Kantor Air dan Limbah						
	Program :	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam						
	Kegiatan :	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Lingkungan						
	A.	Pendapatan Jasa Usaha	36,764,880,000	52,573,785,000	63,088,541,000	71,878,550,000	77,012,834,000	92,415,400,000
	1.	Pendapatan Jasa Usaha	22,843,511,400	32,666,221,000	39,199,465,000	44,000,000,000	47,142,920,000	56,571,504,000
	2.	Pendapatan Kerjasama	13,852,108,059	19,808,522,000	23,770,226,000	27,739,853,000	29,721,310,000	35,665,572,000
	3.	Pendapatan BLU Lainnya	69,260,540	99,042,000	118,850,000	138,697,000	148,604,000	178,324,000
	Total Pendapatan Unit Kantor Air		36,764,880,000	52,573,785,000	63,088,541,000	71,878,550,000	77,012,834,000	92,415,400,000
5118	Unit :	Kantor Perwakilan						
	Program :	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya BP Batam						
	Kegiatan :	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Swasta						
	A.	Pendapatan Jasa Usaha	-	2,500,000,000	3,000,000,000	3,501,000,000	3,751,076,000	4,501,291,000
	1.	Pendapatan Jasa Usaha		2,500,000,000	3,000,000,000	3,501,000,000	3,751,076,000	4,501,291,000
	2.	Pendapatan Kerjasama						
	3.	Pendapatan BLU Lainnya						
	Total Pendapatan Unit Kantor Perwakilan		-	2,500,000,000	3,000,000,000	3,501,000,000	3,751,076,000	4,501,291,000
TOTAL PENDAPATAN USAHA			697,807,496,000.000	1,000,364,714,000	1,200,437,650,000	1,400,526,689,000	1,500,566,302,000	1,800,679,556,000

Tabel 4.5 Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja BP-Batam 2010-2014

TAHUN	TARGET PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	PERSENTASE REALISASI PENDAPATAN	TARGET BELANJA	REALISASI BELANJA	PERSENTASE REALISASI BELANJA
2010						
Rupiah Murni	140,000,000,000	140,000,000,000	100	140,000,000,000	129,406,930,000	92.43
PNBP/BLU	499,717,000,000	449,304,756,287	90	499,717,000,000	466,760,713,000	93.41
PHLN			-			
2011						
Rupiah Murni	140,000,000,000	140,000,000,000	100	140,000,000,000	139,429,898,948	99.59
PNBP/BLU	528,174,000,000	542,254,223,321	103	528,174,000,000	516,923,526,000	97.87
PHLN						
2012						
Rupiah Murni	140,000,000,000	140,000,000,000	100	140,000,000,000	139,336,542,963	99.53
PNBP/BLU	595,338,350,000	621,871,377,005	104	595,338,350,000	564,918,882,600	94.89
PHLN						
2013						
Rupiah Murni	225,234,106,000	225,234,106,000	100	225,234,106,000	223,594,193,625	99.27
PNBP/BLU	711,943,706,000	516,897,648,765	73	959,677,812,000	846,889,841,832	88.25
PHLN	22,500,000,000	22,500,000,000	100	22,500,000,000	-	0.00
2014						
Rupiah Murni	261,094,636,000	261,094,636,000	100	261,094,636,000	258,819,856,501	99.13
PNBP/BLU	950,218,415,000	754,721,497,854	79	950,218,415,000	800,398,341,767	84.23
PHLN	108,009,000,000	108,009,000,000	100	108,009,000,000	-	0.00

Sumber : Biro Perencanaan Program dan Litbang; Biro Keuangan BP-Batam

Arah pembiayaan pengelolaan keuangan BP Batam merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk membiayai biaya operasional dan pengembangan kegiatan, pembiayaan tersebut bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Sendiri (PNBP BLU) dan Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN).

Tabel 4.6 Rencana Proporsi Pembiayaan Pengelolaan BP-Batam 2015-2019

(JUTA RUPIAH)

KODE		PROGRAM	SUMBER PENDANAAN	PRAKIRAAN MAJU					TOTAL ALOKASI
BA	PROG			T.A 2015	T.A 2016	T.A 2017	T.A 2018	T.A 2019	2015 - 2019 (Juta Rupiah)
112	01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP Batam	a. Rp. Murni	-	8,350	2,100	1,850	-	12,300
			b. BLU	512,603	554,761	600,601	651,154	705,884	3,025,002
			c. PLN	-	-	-	-	-	-
			SUB TOTAL	512,603	563,111	602,701	653,004	705,884	3,037,302
112	06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB Batam	a. Rp. Murni	214,679	3,630,635	3,968,111	4,231,783	4,311,729	16,356,937
			b. BLU	246,369	280,108	317,755	359,038	405,327	1,608,598
			c. PLN	123,556	225,360	233,970	17,114	-	600,000
			SUB TOTAL	584,604	4,136,103	4,519,836	4,607,935	4,717,056	18,565,534
JUMLAH			a. Rp. Murni	214,679	3,638,985	3,970,211	4,233,633	4,311,729	16,369,237
			b. BLU	758,972	834,869	918,356	1,010,192	1,111,211	4,633,600
			c. PLN	123,556	225,360	233,970	17,114	-	600,000
TOTAL				1,097,207	4,699,214	5,122,537	5,260,939	5,422,940	21,602,836.58

Sumber : Biro Perencanaan Program dan Litbang; Biro Keuangan BP-Batam.

Adapun matriks kinerja dan pendanaan 2015-2019 BP Batam terlampir pada lampiran 1.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) BP Batam Tahun 2015-2019 ini akan menjadi pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan dan pembangunan pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, yang terpadu dan searah dengan rencana pembangunan nasional lima tahun mendatang guna menunjang tercapainya sasaran strategis RPJMN.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra BP Batam Tahun 2015-2019 ditentukan oleh dukungan, koordinasi dan kerjasama yang sinergis baik secara internal maupun eksternal dan dalam mewujudkannya agar ditempuh dengan cara professional yang dilandasi dengan kerangka peraturan dan perundangan yang jelas sehingga dapat dijadikan landasan gerak yang terpadu, efektif dan efisien sehingga mampu menghasilkan target yang optimal.

KEPALA BP BATAM

MUSTOFA WIDJAJA

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BP-BATAM 2015

							(Juta rupiah)	
Kode	Program/Kegiatan/Output/Komponen			VOLUME		PRAKIRAAN MAJU		Penanggungjawab
				2015	Satuan	2015		
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam					533.525,00		
5113	Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan					8.150,00		
	001	Dokumen ketersediaan bahan penelitian dan pengembangan		9	Dokumen	2.420,00		Biro Perencanaan Program dan Litbang
	002	Dokumen ketersediaan bahan perencanaan pengembangan wilayah		5	Dokumen	2.560,00		
	003	Dokumen ketersediaan bahan perencanaan program dan penganggaran		6	Dokumen	2.985,00		
	994	Layanan Perkantoran		12	Bulan Lay anan	63,00		
	996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		3	Unit	60,50		
	997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		3	Unit	61,50		
5114	Pelayanan Kerumahtanggaan, Penataan Organisasi dan Bantuan Hukum					106.624,00		
	001	Kepuasan Internal Terhadap pelayanan Biro Umum		10	Bantuan	3.640,00		Biro Umum
	002	Terwujudnya pengelolaan Aset		3	Dokumen	6.834,00		
	994	Layanan Perkantoran		12	Bulan Lay anan	95.701,00		
	997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		20	Unit	449,00		
5115	Penyusunan Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian					364.255,00		
	001	SDM yang Mengikuti Peningkatan Pendidikan Teknis		3104	Orang	3.130,00		Biro Kepegawaian
	002	SDM yang Mengikuti Peningkatan Pendidikan Formal		20	Orang	400,00		
	994	Layanan Perkantoran		12	Bulan Lay anan	360.725,00		
5116	Pengelolaan Administrasi Keuangan					4.224,00		
	001	Pengelolaan Dokumen Anggaran		3	Dokumen	871,50		Biro Keuangan
	002	Pengelolaan Perbendaharaan		3	Dokumen	2.037,20		
	003	Penyusunan Laporan Keuangan BP Batam		8	Dokumen	979,90		
	994	Layanan Perkantoran		12	Bulan Lay anan	305,40		
	996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		2	Unit	30,00		
5117	Pelayanan Keprotokolan, Kesekretariatan dan Kepustakaan					10.439,00		
	001	Laporan hasil pelaksanaan keprotokolan, kesekretariatan dan kepustakaan		33	Laporan	2.614,00		Biro Sekretariat dan Protokol
	002	Pelayanan Prima Keprotokolan		12	Bulan	5.189,00		
	994	Layanan Perkantoran		12	Bulan	1.536,00		
	998	Gedung/Bangunan		400	M2	1.100,00		

LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BP-BATAM 2015

						(Juta rupiah)			
Kode	Program/Kegiatan/Output/Komponen			VOLUME		PRAKIRAAN MAJU		Penanggungjawab	
				2015	Satuan	2015			
5118	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta					16.891,00		Kantor Perwakilan Jakarta	
	001	Laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah		8	Laporan	1.594,00			
	002	Laporan hasil koordinasi antar lembaga swasta		6	Laporan	371,00			
	994	Lay anan Perkantoran		12	Bulan	14.600,00			
	997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		8	Unit	326,00			
5119	Pengelolaan Data Centre dan Sistem Informasi					17.098,00		PPDSI	
	001	Sistem dan aplikasi yang dikembangkan		3	Sistem dan Aplikasi	2.393,00			
	002	Data centre yang dikelola		1400	M2	12.483,00			
	003	Training centre yang dikelola		60	Orang	861,00			
	004	Laporan data perkembangan Batam		10	Buku	1.186,00			
	994	Lay anan Perkantoran		12	Bulan	141,00			
	996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		3	Unit	34,00			
5120	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Bidang Teknik dan Pembangunan					971,00		Direktorat Pengendalian teknik : Direktorat Pengendalian Pembangunan	
	002	Laporan Hasil Pemeriksaan di Bidang Teknik dan Pembangunan		19	Dokumen	492,00			
	003	Kegiatan Evaluasi Bidang Pelay anan Investasi dan Lahan		10	Dokumen	416,00			
	994	Lay anan Perkantoran		12	Bulan	63,00			
5121	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Bidang Organisasi dan Kinerja					801,00		Direktorat Pengendalian Organisasi dan Kinerja	
	001	Pedoman Sistem Pengendalian Bidang Organisasi		2	Pedoman	150,00			
	002	Pemeriksaan Operasional Unit Kerja		6	Laporan	588,00			
	994	Lay anan Perkantoran		12	Bulan	63,00			
5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Bidang Keuangan dan Umum					4.072,00		Inspektorat; Direktorat Pengendalian Keuangan	
	001	Pedoman sistem pengendalian di Bidang Keuangan		12	Dokumen	614,00			
	002	Laporan Hasil Pemeriksaan di Bidang Umum		20	Dokumen	951,00			
	003	Monitoring dan Evaluasi Bidang Keuangan Unit Mandiri		15	Dokumen	1.631,00			
	004	Monitoring dan Evaluasi Bidang Keuangan Unit Penunjang		24	Dokumen	813,00			
	994	Lay anan Perkantoran		12	Bulan Lay anan	63,00			

LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BP-BATAM 2015

Kode	Program/Kegiatan/Output/Komponen	VOLUME		(Juta rupiah)	Penanggungjawab
		2015	Satuan	PRAKIRAAN MAJU	
				2015	
06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam			563.682,00	
5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam			35.779,00	
001	Lahan yang dibebaskan	160	Ha	16.378,00	Direktorat Pengelolaan Lahan
003	Lahan yang dialokasikan	50	Ha	4.034,00	
004	Lahan yang bersertifikat	120	Ha	12.801,00	
994	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	1.956,00	
996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5	Unit	460,00	
997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	3	Unit	150,00	
5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut			211.171,00	
001	Fasilitas Pelabuhan Bongkar Muat Barang Container yang ditingkatkan	2	Unit	126.131,00	Kantor Pelabuhan Laut
002	Fasilitas Pelabuhan Bongkar Muat Cargo yang ditingkatkan	1	Unit	4.474,00	
003	Fasilitas Terminal penumpang Pelabuhan Domestik yang Ditingkatkan	1	Unit	73.755,00	
994	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	6.235,60	
996	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	25	Unit	46,30	
997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	42	Unit	529,10	
5125	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara			46.702,00	
002	Fasilitas Gedung Terminal yang Ditingkatkan	1	Unit	9.684,00	Kantor Bandar Udara
003	Fasilitas Pemanduan Pergerakan Pesawat yang Ditingkatkan	5	Pesawat	23.401,00	
994	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	13.617,00	
5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Umum			76.735,00	
001	Peralatan medis yang diadakan	4	Unit	3.423,00	RSBP
002	Fasilitas Gedung yang Ditingkatkan	750	M2	5.579,00	
003	Fasilitas Non Medis yang Diadakan	4	Unit	4.037,00	
994	Layanan Perkantoran	12	Bulan Layanan	63.696,00	
5127	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat			1.792,00	
001	Jalan yang diperbaiki	0,25	KM	684,00	Direktorat Perencanaan dan Pembangunan
002	Ketersediaan sarana Transportasi Massal	1	Dokumen	367,00	
003	Drainase Primer yang diperbaiki	32	M	559,00	
994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	182,00	
5128	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa			576,00	
001	Barang dan jasa yang dilelang melalui elektronik lelang	90	Pengadaan	393,00	Unit Layanan Pengadaan
994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	183,00	

LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BP-BATAM 2015

(Juta rupiah)					
Kode	Program/Kegiatan/Output/Komponen	VOLUME		PRAKIRAAN MAJU	Penanggungjawab
		2015	Satuan	2015	
5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang ke Kawasan PBPB-Batam			7.470,00	Direktorat Lalu Lintas Barang
001	Jumlah Pelayanan Perijinan Lalu Lintas Barang	16	Kegiatan	7.107,00	
994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	363,00	
5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Lingkungan			144.179,00	Direktorat Pengelolaan Air dan Limbah
001	Fasilitas Kawasan Waduk dan DTA yang Ditingkatkan	2	Unit	4.928,00	
002	Fasilitas Kawasan Pengelolaan Limbah Industri B3 yang ditingkatkan	2	Unit	1.511,00	
004	Fasilitas Pengelolaan Limbah Domestik yang Ditingkatkan	2	Unit	137.187,00	
994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	553,00	
5131	Pelayanan Investasi dan Pemasaran Kawasan PBPB-Batam			14.484,00	Direktorat Investasi dan Pemasaran
002	Jumlah Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	17	Kegiatan	1.321,00	
003	Kegiatan Pemasaran Promosi Investasi	20	Kegiatan	12.991,00	
994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	172,00	
5132	Pelayanan Perijinan Terpadu ke Kawasan PBPB-Batam			8.413,00	Direktur PTSP
002	Jumlah Pelayanan Perizinan	12	Kegiatan	3.740,00	
003	Kegiatan Pameran Publikasi	24	Kegiatan	4.288,00	
994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	385,00	
5133	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemukiman dan Perumahan Pekerja			10.296,00	Direktorat Pemukiman, Lingkungan dan Agribisnis
001	Kamar Rumah Susun Sewa bagi Pekerja	500	Kamar	3.662,00	
002	Penyelesaian Dokumen Legalitas Kavling Siap Bangun	600	Dokumen	1.395,00	
004	Sarana Reklame yang dikelola	340.800	M2	3.532,00	
005	Fasilitas Kawasan Industri Pertanian Terpadu yang Dimanfaatkan	1,03	Ha	1.322,00	
994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	385,00	
5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi			6.085,00	Direktorat Pengamanan
002	Luas Aset Kawasan yang diamankan	59.500.000	M2	5.220,00	
994	Layanan Perkantoran	12	Bulan	765,00	
997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	10	Unit	100,00	
	TOTAL			1.097.207,00	

LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BP-BATAM 2015

Kode Keg	Program/Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Juta)				PenanggungJawab
			Rencana	Prakiraan Maju *				Rencana 2016	Prakiraan Maju			
			Volume	2016	2017	2018	2019			2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP- Batam	1 Pencapaian target performance kinerja aparatur dilingkungan BP-Batam		68	70	72	74	468,672.912	492,106.56	514,251.35	537,392.66	
		2 (%) Pencapaian Kesesuaian pelaksanaan kegiatan program terhadap rencana kinerja BP Batam		75	75	80	80					
		3 Pencapaian akuntabilitas laporan		WTP	WTP	WTP	WTP					
5113	Penyusunan Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan							7,015.54	7,366.32	7,697.81	8,044.21	Biro Perencanaan Program dan Litbang
		001 Jumlah Dokumen bahan penelitian dan pengembangan	Dokumen	11	11	11	11	2244.05	2,356.26	2462.28827	2573.091242	
		002 Jumlah Dokumen bahan perencanaan dan evaluasi penganggaran	Dokumen	14	14	14	14	2600.00	2,730.00	2852.85	2981.23	
		003 Jumlah Dokumen bahan perencanaan program dan pengembangan wilayah	Dokumen	13	13	13	13	2062.5	2,165.63	2263.078125	2364.92	
		994 Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	108.99	114.44	119.5892775	124.97	
5114	Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa							61,478.45	64,552.37	67,457.23	70,492.81	Biro Umum dan Sekretariat
		001 Jumlah Laporan hasil pelaksanaan kesekretariatan dan kepastakaan	Laporan	8	8	8	8	3505	3,680.25	3845.86125	4018.93	
		002 Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Pelayanan Prima Keprotokolkan Pimpinan	Dokumen	2	2	2	2	210	220.50	230.42	240.79	
		003 Jumlah Kegiatan Operasional layanan dan koordinasi pimpinan	Kegiatan	210	210	210	210	8,794.67	9,234.40	9,649.95	10,084.19	
		004 Jumlah Laporan Pelayanan Kerumahtangga	Laporan	2	2	2	2	12,978.50	13,627.43	14,240.66	14,881.49	
		005 Jumlah Kegiatan Paket Barang/Jasa yang dilelang	Kegiatan	123	123	123	123	425.00	446.25	466.33	487.32	
		006 Jumlah Dokumen Laporan BMN	Dokumen	4	4	4	4	3,187.50	3,346.88	3,497.48	3,654.87	
		994 Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	32,377.79	33,996.68	35,526.53	37,125.22	
5115	Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian							366,630.31	384,961.83	402,285.11	420,387.94	Biro SDM
		001 Jumlah Orang yang dikelola	Orang	3,568	3,568	3,568	3,568	3,772.50	3,961.13	4,139.38	4,325.65	
		002 Jumlah Kegiatan Administrasi dan Disiplin Pegawai	Kegiatan	16	16	16	16	335.00	351.75	367.58	384.12	
		994 Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	362,522.81	380,648.95	397,778.16	415,678.17	

LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BP-BATAM 2015

Kode Keg	Program/Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Juta)				Penanggungjawab
			Rencana	Rencana 2016	Prakiraan Maju *			Rencana 2016	Prakiraan Maju			
			Volume		2017	2018	2019		2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5116	Pengelolaan Administrasi Keuangan							4,166.02	4,374.32	4,571.17	4,776.87	
		001	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan	Dokumen	10	10	10	1,650.00	1,732.50	1,810.46	1,891.93	Biro Keuangan
		002	Jumlah Dokumen laporan keuangan BP Batam	Dokumen	8	8	8	1,950.00	2,047.50	2,139.64	2,235.92	
		994	Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	566.02	594.32	621.07	649.01	
5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum							1,618.97	1,699.92	1,776.41	1,856.35	Biro Hukum dan Organisasi
		001	Jumlah Regulasi BP Batam yang tersusun	Regulasi	10	10	10	762.50	800.63	836.65	874.30	
		002	Jumlah Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum	Kegiatan	5	5	5	225.00	236.25	246.88	257.99	
		003	Jumlah Dokumen Organisasi dan Tata Laksana	Dokumen	6	6	6	537.50	564.38	589.77	616.31	
		994	Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	93.97	98.67	103.11	107.75	
5118	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Swasta							15,120.66	15,876.70	16,591.15	17,337.75	Kantor Perwakilan Jakarta
		001	Jumlah Kegiatan Koordinasi antar lembaga pemerintah	Kegiatan	10	10	10	1,162.50	1,220.63	1,275.55	1,332.95	
		002	Jumlah Kegiatan Koordinasi antar lembaga Swasta	Kegiatan	5	5	5	350.00	367.50	384.04	401.32	
		994	Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	13,608.16	14,288.57	14,931.56	15,603.48	
5119	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan							1,826.43	1,917.75	2,004.05	2,094.23	Biro Perencanaan Teknis
		001	Jumlah Dokumen bahan perencanaan tata guna lahan dan utilitas	Dokumen	2	2	2	600.00	630.00	658.35	687.98	
		002	Jumlah Dokumen bahan perencanaan Perhubungan	Dokumen	2	2	2	750.00	787.50	822.94	859.97	
		003	Jumlah Dokumen bahan perencanaan Lingkungan	Dokumen	2	2	2	375.00	393.75	411.47	429.98	
		994	Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	101.43	106.50	111.29	116.30	

LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BP-BATAM 2015

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Juta)				Penanggungjawab
			Rencana	Rencana 2016	Prakiraan Maju *			Rencana 2016	Prakiraan Maju			
Keg			Volume			2017	2018		2019		2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5120	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha							1,262.81	1,325.95	1,385.62	1,447.97	Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan pentarifan
		001	Jumlah Dokumen pengembangan usaha	Dokumen	3	3	3	375.00	393.75	411.47	429.98	
		002	Jumlah Dokumen Bahan Perencanaan pelayanan dan Pentarifan	Dokumen	4	4	4	687.50	721.88	754.36	788.31	
		994	Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	200.31	210.33	219.79	229.68	
5121	Penyusunan dan Pengawasan Manajemen Kinerja Organisasi							913.93	959.63	1,002.81	1,047.94	Biro Pengembangan Manajemen Kinerja
		001	Jumlah Dokumen perencanaan dan pedoman manajemen kinerja	Dokumen	5	5	5	812.50	853.13	891.52	931.63	
		994	Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	101.43	106.50	111.29	116.30	
5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan							8,639.78	9,071.77	9,480.00	9,906.60	Satuan pemeriksa Internal
		001	Jumlah Dokumen pemeriksaan Unit Kerja Mandiri	Dokumen	13	13	13	3,375.00	3,543.75	3,703.22	3,869.86	
		002	Jumlah Dokumen pemeriksaan Unit Kerja Penunjang	Dokumen	8	8	8	1,800.00	1,890.00	1,975.05	2,063.93	
		003	Jumlah Dokumen Pedoman sistem pengendalian internal	Dokumen	1	1	1	340.00	357.00	373.07	389.85	
		004	Jumlah Dokumen Evaluasi Dewan Pengawas	Dokumen	2	2	2	3,000.00	3,150.00	3,291.75	3,439.88	
		994	Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	124.78	131.02	136.91	143.08	

LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BP-BATAM 2015

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Juta)				Penanggungjawab
			Rencana	Rencana 2016	Prakiraan Maju *			Rencana 2016	Prakiraan Maju			
Keg			Volume			2017	2018		2019		2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam	1. (US\$)Realisasi nilai investasi PMA		447,833,988	558,001,149	695,269,432	866,305,712	739,093.620	607,506.10	597,308.88	954,890.28	
		(US\$) PDRB berdasarkan realisasi PMA		111,958,497	139,500,287	173,817,358	216,576,428					
		2. (orang) Penyerapan Tenaga Kerja		386,000	406,000	426,000	446,000					
		3. (%)Pencapaian kepuasan stakeholder terhadap penyelenggaraan pelayanan publik		78	80	82	84					
5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB Batam							25,615.09	26,895.84	28,106.16	29,370.93	Kantor Pengelolaan Lahan
		001 Luas Lahan yang dibebaskan	Ha	500	500	500	500	14,950.00	15,697.50	16,403.89	17,142.06	
		002 Luas Lahan yang dialokasikan	Ha	400	400	400	400	2,300.00	2,415.00	2,523.68	2,637.24	
		003 Luas Lahan yang Bersertifikat	Ha	1,000	1,000	1,000	1,000	7,375.00	7,743.75	8,092.22	8,456.37	
		994 Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	990.09	1,039.59	1,086.38	1,135.26	
5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut							221,114.92	195,068.17	184,933.74	542,405.75	Kantor PePelabuhan Laut
		001 Jumlah Kapasitas Bongkar Muat Barang Container	Unit	2	2	2	2	114,232.08	55,443.68	111,588.65	437,785.14	
		002 Luas Kapasitas Bongkar Muat Barang Cargo	M3	4,000	4,000	4,000	4,000	24,317.00	117,032.85	49,736.83	79,949.99	
		003 Luas Kapasitas Penumpang Pelabuhan Domestik	M3	12,000	12,000	12,000	12,000	64,300.00	3,412.50	3,566.06	3,726.54	
		994 Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	18,265.84	19,179.13	20,042.20	20,944.09	
5125	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara							68,479.94	71,903.94	75,139.61	78,520.90	Kantor Bandara Hang Nadim Batam
		001 Jumlah Fasilitas Gedung Terminal yang Ditingkatkan	Unit	5	5	5	5	24,518.00	25,743.90	26,902.38	28,112.98	
		002 Jumlah Fasilitas pemanduan pergerakan pesawat yang ditingkatkan	Unit	14	14	14	14	7,145.00	7,502.25	7,839.85	8,192.64	
		994 Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	36,816.94	38,657.79	40,397.39	42,215.27	

LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BP-BATAM 2015

Kode	Program/Kegiatan	Indikator		Target				Alokasi (Rp. Juta)				Penanggungjawab	
				Rencana	Rencana 2016	Prakiraan Maju *			Rencana 2016	Prakiraan Maju			
Keg			Volume			2017	2018	2019			2017	2018	2019
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan								110,488.96	182,190.80	171,766.88	161,048.89	Rumah Sakit BP Batam
		001	Jumlah Peralatan fasilitas medis yang diadakan	Unit	12	12	12	12	7,828.41	8,219.83	8,589.72	8,976.25	
		002	Luas Fasilitas gedung yang ditingkatkan	M2	10,500	10,500	10,500	10,500	18,693.58	85,805.65	71,044.40	55,793.90	
		003	Jumlah Pengadaan Fasilitas Non Medis	Unit	10	10	10	10	72,603.32	76,233.48	79,663.99	83,248.87	
		994	Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	11,363.66	11,931.84	12,468.77	13,029.87	
5127	Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Prasarana dan Sarana								20,251.81	21,264.40	22,221.29	23,221.25	Direktorat Pembangunan Prasarana dan sarana
		001	Panjang Jalan, jembatan dan Transportasi Massal	Km	3	3	3	3	16,637.50	17,469.38	18,255.50	19,076.99	
		002	Jumlah Laporan Pengendalian Mutu Pembangunan Gedung dan Utilitas	Laporan	3	3	3	3	900.00	945.00	987.53	1,031.96	
		003	Luas pertamanan dan penghijauan	M3	193,440	193,440	193,440	193,440	2,309.66	2,425.14	2,534.27	2,648.32	
		994	Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	404.65	424.88	444.00	463.98	
5128	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi								33,166.82	34,825.16	36,392.30	38,029.95	Pusat PDSI
		001	Jumlah aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi	2	2	2	2	18,240.00	19,152.00	20,013.84	20,914.46	
		002	Luas Data centre yang dikelola	M2	5,500	5,500	5,500	5,500	6,426.00	6,747.30	7,050.93	7,368.22	
		003	Jumlah Kegiatan Training yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	1	1	1,150.00	1,207.50	1,261.84	1,318.62	
		004	Jumlah Laporan data perkembangan Batam	Laporan	4	4	4	4	1,840.00	1,932.00	2,018.94	2,109.79	
		994	Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	5,510.82	5,786.36	6,046.75	6,318.85	

LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BP-BATAM 2015

Kode	Program/Kegiatan	Indikator		Target					Alokasi (Rp. Juta)				Penanggungjawab
				Rencana	Rencana 2016	Prakiraan Maju *			Rencana 2016	Prakiraan Maju			
				Volume		2017	2018	2019		2017	2018	2019	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang Kawasan PBPB Batam								2,249.28	2,361.74	2,468.02	2,579.08	Direktorat Lalu Lintas Barang
		001	Jumlah Kegiatan Pelayanan Lalu Lintas Barang	Kegiatan	3	3	3	3	2,100.00	2,205.00	2,304.23	2,407.92	
		994	Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	149.28	156.74	163.80	171.17	
5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah								196,892.72	9,120.27	9,530.68	9,959.57	Kantor Pengelolaan Air dan Limbah
		001	Jumlah Fasilitas kawasan waduk dan DTA	Unit	3	3	3	3	5,686.04	5,970.34	6,239.00	6,519.76	
		002	Jumlah Fasilitas kawasan pengelolaan limbah (B3)	Unit	10	10	10	10	981.74	1,030.83	1,077.21	1,125.69	
		003	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Limbah Domestik	Unit	6	6	6	6	189,140.83	980.78	1,024.92	1,071.04	
		994	Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	1,084.12	1,138.32	1,189.55	1,243.08	
5131	Pelayanan Pemasaran dan Kehumasan								18,530.80	19,457.34	20,332.92	21,247.90	Direktorat Promosi dan Hubungan Masyarakat
		001	Jumlah Kegiatan Pemasaran Promosi Investasi	Kegiatan	200	200	200	200	15,794.20	16,583.91	17,330.19	18,110.04	
		002	Jumlah Kegiatan Kehumasan dan publikasi	Kegiatan	50	50	50	50	1,850.00	1,942.50	2,029.91	2,121.26	
		994	Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	886.60	930.93	972.82	1,016.60	
5132	Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam								6,095.43	6,400.20	6,688.21	6,989.18	Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		001	Waktu Pelayanan perijinan Terpadu	Waktu pelayanan	5	5	5	5	2,100.00	2,205.00	2,304.23	2,407.92	
		002	Jumlah Kegiatan Pelayanan perijinan penanaman modal	Kegiatan	3	3	3	3	1,550.00	1,627.50	1,700.74	1,777.27	
		994	Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	2,445.43	2,567.70	2,683.25	2,803.99	

LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BP-BATAM 2015

Kode	Program/Kegiatan	Indikator	Target					Alokasi (Rp. Juta)				Penanggungjawab
			Rencana	Rencana 2016	Prakiraan Maju *			Rencana 2016	Prakiraan Maju			
Keg			Volume			2017	2018		2019		2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5133	Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset							24,185.99	25,395.29	26,538.08	27,732.29	Direktorat Pemanfaatan Aset
		001 Luas Pengelolaan kawasan agrowisata/Agribisnis	M3	100	100	100	100	805.00	845.25	883.29	923.03	
		002 Luas Pengelolaan Rumah Susun Sewa dan KSB bagi Pekerja	M3	2,500	2,500	2,500	2,500	12,519.75	13,145.74	13,737.30	14,355.47	
		003 Jumlah DokumenPemanfaatan Aset dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Aset	Dokumen	1,000	1,000	1,000	1,000	5,480.52	5,754.55	6,013.50	6,284.11	
		994 Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	5,380.72	5,649.76	5,903.99	6,169.67	
5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Aset Investasi							12,021.85	12,622.95	13,190.98	13,784.57	Direktorat Pengamanan
		001 Luas Aset Kawasan yang diamankan	M3	59,500,000	59,500,000	59,500,000	59,500,000	9,337.22	9,804.08	10,245.26	10,706.30	
		994 Bulan Layanan Perkantoran	Bulan Layanan	12	12	12	12	2,684.63	2,818.87	2,945.72	3,078.27	
TOTAL								1,207,766.532	1,099,612.66	1,111,560.23	1,492,282.94	

LAMPIRAN 2 : MATRIKS KERANGKA KELEMBAGAAN

No	Arah Kerangka Kelembagaan dan/atau Kebutuhan kelembagaan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Pembentukan SOTK yang diterbitkan Dewan Kawasan yang mengacu pada target capaian dan fungsi dalam Renstra BP Batam Tahun 2015-2019	Membangun tata kelola yang transparan efektif, dan efisien yang sesuai dengan fungsi institusi BP Batam.	Biro Hukum dan Organisasi	Internal: Biro SDM dan Biro Pengembangan Manajemen kinerja Eksternal : Menpan & RB dan Dewan Kawasan	2015
2	Pembentukan SOTK yang diterbitkan Dewan Kawasan yang mengacu pada fungsi Bp Batam dalam UU 46 Tahun 2007 dan PP 5 Tahun 2011	BP Batam memiliki fungsi sebagai pengelola pariwisata, dalam pelaksanaannya struktur organisasi BP Batam belum memiliki unit pengelola bidang industri pariwisata dan kreatif.	Biro Hukum dan Organisasi	Internal: Biro SDM dan Biro Pengembangan Manajemen kinerja Eksternal : Menpan & RB dan Dewan Kawasan	2015
3	Pembentukan Peraturan Kepala BP tentang Budaya Kerja di BP Batam	Evaluasi peningkatan kualitas aparatur negara/ SDM BP Batam terhadap reformasi birokrasi yang berkarakter.	Biro Hukum dan Organisasi	Internal: Biro SDM dan Biro Pengembangan Manajemen kinerja Eksternal : Menpan & RB	2015
4	Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang jenjang karier ASN di BP Batam, terkait tidak adanya pembina SDM atau pendelegasian	Ditetapkannya BP-Batam menjadi instansi pemerintah non-struktural SDM yang ber-status PNS belum diatur secara spesifik., menyebabkan jenjang karier PNS di BP Batam menjadi ambigu. (jumlah PNS di BP-Batam berjumlah 2075 pegawai).	Biro SDM	Internal: Biro Hukum dan Organisasi dan Biro Pengembangan Manajemen kinerja Eksternal : Menko Perekonomian, SekNeg, MenKum Ham, BAKN, Menpan RB	2015

No	Arah Kerangka Kelembagaan dan/atau Kebutuhan kelembagaan	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
5	Penerbitan SK Kepala Badan Pengusahaan Batam tentang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)	Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan BP Batam kepada stakeholders maka perlu diukur tingkat kepuasan pelayanan di BP Batam	Biro Perencanaan Program dan Litbang	Internal: -Biro Sumber Daya Manusia (SDM) -Direktorat Promosi dan Humas -Biro Pengembangan Manajemen Kinerja Eksternal : Menpan & RB	2015
6	Penerbitan SK Kepala Badan Pengusahaan Batam tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)	Belum dilaksanakan penyelenggaraan pendelegasian perijinan dan non perijinan yang menjadi urusan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/ kota ke BP-Batam Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014.	Biro Hukum dan Organisasi	Internal: -Biro Sumber Daya Manusia (SDM) -Direktorat Promosi dan Humas -Biro Pengembangan Manajemen Kinerja Eksternal: -Pemprov Kepri -Pemko Batam - Beacukai	2015
7	Penerbitan Peraturan Kepala BP Batam tentang Dewan Pengawas	Belum ditetapkan batasan pembiayaan dan target kinerja dari Dewan Pengawas yang mempengaruhi struktur anggaran	Biro Hukum dan Organisasi	Internal : - Biro Hukum dan Organisasi - Biro Pengembangan Manajemen kinerja - Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Eksternal : -KemenKeu -Bappenas	2016

LAMPIRAN 3 : MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi luar	Target Penyelesaian
1.	Pembentukan PP baru tentang p. Tanjung Sauh dan P. Ngenang sebagai KPBPB Batam	Adanya potensi pasar transshipment sebesar 50 juta TeUS di perairan selat Philips yang dapat ditarik ke Indonesia, namun mengingat pulau Tanjung Sauh dan P. Ngenang belum termasuk dalam wilayah KPBPB Batam, maka perlu ditetapkan Pulau Tj. Sauh dan P. Ngenang sebagai bagian dari wilayah kerja KPBPB Batam. Selain itu, Pemerintah pusat perlu segera menetapkan tanjung sauh sebagai pelabuhan HUB Transshipment untuk wilayah Indonesia Bagian Barat.	Biro Hukum dan Organisasi	Internal: Kantor Pengelolaan Lahan RoRenpro & Litbang. Kanwil jkt Eksternal : Menko Perekonomian, SekNeg, MenKum Ham, BPN	2016
2.	Pembentukan PP Baru yang berlaku Khusus di Wilayah KPBPB tentang keluar masuk barang kontainer	Harmonisasi hubungan kepelabuhanan dengan Kementerian Keuangan Cq. Bea dan Cukai terkait regulasi keluar masuknya barang kontainer di wilayah KPBPB Batam	Biro Hukum dan Organisasi	Internal: Kantor Pengelolaan Lahan RoRenpro & Litbang. Kanwil jkt Eksternal : Menko Perekonomian, SekNeg, MenKum Ham, BPN, Beacukai	2016
3.	Pembentukan Peraturan DK tentang Rencana Strategis KPBPB Batam Bintang Karimun	Harmonisasi DK dalam menetapkan kawasan unggulan pada masing-masing KPBPB di Kepulauan Riau	Biro Hukum dan Organisasi	Internal: Kantor Pengelolaan Lahan RoRenpro & Litbang. Kanwil jkt Eksternal : Menko Perekonomian, SekNeg, MenKum Ham, BPN, Bappenas	2016

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi luar	Target Penyelesaian
4.	Revisi Peraturan Kementerian kehutanan tentang Tata Batas Kawasan Hutan di Bareleng	Harmonisasi hubungan BPN pusat dan daerah terkait dengan Tata Batas Hutan di Kawasan Batam	Biro Hukum dan Organisasi dan Organisasi	Internal: Kantor Pengelolaan Lahan RoRenpro & Litbang. Kanwil jkt, Dir. Pemanfaatan Aset Eksternal : Menko Perekonomian, SekNeg, MenKum Ham, BPN	2016
5.	Revisi PP/Perda tentang Pelayanan Perijinan Investasi di Batam	Harmonisasi hubungan perizinan investasi antara pemerintah kota, instansi vertikal dan BP Batam terkait dengan adanya rencana Batam Single Window (BSW)	Biro Hukum dan Organisasi dan Organisasi	Internal: Kantor Pengelolaan Lahan RoRenpro & Litbang. Kanwil jkt, Dir. PTSP, Dir. Lalu Lintas Barang Eksternal : Menko Perekonomian, SekNeg, MenKum Ham, BPN, Beacukai	2016
6.	Pembentukan PP Baru tentang Pengelolaan HPL P. Rempang dan P. Galang.	Kepastian kewenangan pengelolaan Pulau Rempang dan Pulau Galang terkait pengelolaan HPL sehingga terhambatnya pengembangan investasi di pulau tersebut	Biro Hukum dan Organisasi dan Organisasi	Internal: Kantor Pengelolaan Lahan RoRenpro & Litbang. Kanwil jkt, Dir. Pemanfaatan Aset, Biro. Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan Eksternal : Menko Perekonomian, SekNeg, MenKum Ham, BPN, Bappenas	2016
7.	Pembentukan PP yang mengatur Hubungan Kerja antara BP Batam dengan Pemko Batam	Perlunya Regulasi yang mengatur hubungan unit kerja (antara BP Batam dengan Pemerintah Kota) terkait bidang Pariwisata dan PBK, Kehutanan, perikanan di kawasan DAM	Biro Hukum dan Organisasi dan Organisasi	Internal: Kantor Pengelolaan Lahan RoRenpro & Litbang. Kanwil jkt, Dir. Pembangunan Prasarana dan Sarana, Biro Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan Eksternal : Menko Perekonomian, SekNeg, MenKum Ham, BPN	2016

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
8	Penyusunan Peraturan tentang Tarif Layanan BP Batam	Belum sempurnanya Peraturan Tarif Layanan Eksisting di Badan Pengusahaan Batam (BP Batam)	Biro Keuangan	- Biro Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan -Kepala Unit Terkait -SPIP Eksternal: - Kemenkeu	2015
9	Pembuatan SK Kepala Badan Pengusahaan Batam Tentang Penerapan Remunerasi	Dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) perlu diterapkan pemberian tunjangan remunerasi.	Biro Sumber Daya Manusia (SDM)	Internal: -Biro Pengembangan Manajemen Kinerja - Biro Perencanaan Program dan Litbang - Biro Keuangan Eksternal: - Kemenpan & RB - Kemenkeu - Bappenas	2015
10	Tindak lanjut atas Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU)	Dengan Telah ditetapkan Bandar Udara Hang Nadim sebagai Badan Usaha Bandar Udara maka perlu ditindak lanjuti dengan pembentukan organisasi, pengalihan asset, dan penempatan SDM	-Kepala Kantor Bandara -Biro Hukum dan Organisasi	- Biro Hukum dan Organisasi - Biro Umum dan Sekretariat - Biro Perencanaan Program dan Litbang - Biro Sumber Daya Manusia (SDM) - Biro Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan - Dir. Pemanfaatan Aset -Dir. Pembangunan Prasarana dan Sarana External : -Kementerian Keuangan Republik Indonesia - Kementerian Perhubungan Republik Indonesia - Kemenpan R & B -Kemenko RI - Bappenas	2015

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
11	Penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan Laut	Belum ditetapkan peraturan pemerintah tentang pembentukan badan usaha pelabuhan laut di Batam	- Kepala Kantor Pelabuhan laut - Biro Hukum dan Organisasi	- Biro Hukum dan Organisasi -Biro Umum -Biro Perencanaan Program dan Litbang -Biro Sumber Daya Manusia (SDM) - Biro Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan - Dir. Pemanfaatan Aset External : -Kementerian Keuangan Republik Indonesia - Kementerian Perhubungan Republik Indonesia - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi -Kementerian Perekonomian Republik Indonesia -Bappenas	2015